



LAPORAN AKHIR

STUDI BASELINE SOSIAL EKONOMI DI LOKASI FOREST PROGRAMME V (KABUPATEN GARUT JAWA BARAT)



Tim Penyusun (Yayasan Kehutanan Masyarakat Indonesia)

Dr. (C) Mangarah Silalahi, S.Sos., MSC., MT

Rivani Noor, SE, M.Ling

Ir. Muayat Ali Muhshi

Ahmad Salman Alfarizy, B.BA

Samdhana Achmal Saidi, S.Tr.E.

Yayasan Kehutanan Masyarakat Indonesia (YKMI)/

Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM)

Didanai oleh:

Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat

Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan Republik Indonesia

Jakarta, 12 Desember 2025

RINGKASAN EKSEKUTIF

Studi *baseline* sosial ekonomi secara khusus *baseline* pendapatan rumah tangga Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) ini dilakukan di Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Tujuan dari studi ini adalah, (1) Menjelaskan sistem mata pencaharian masyarakat PS penerima manfaat Forest Programme V (FPV) dan melakukan analisis keterkaitan pendapatan masyarakat dengan kegiatan FPV, (2) Membangun data dasar (*baseline*) ekonomi sosial di tingkat masyarakat penerima manfaat PS dan mengintegrasikannya dengan sistem Monitoring & Evaluasi (M & E) FPV.

Studi lapangan dilaksanakan selama 5 minggu dari minggu kedua bulan November sampai dengan awal bulan Desember 2025. Sumber data bersifat sekunder yaitu data-data yang diambil dari berbagai laporan dan informasi yang didapat dari berbagai instansi dan juga dari internet. Sumber data primer didapatkan dari hasil 2 Diskusi Kelompok Terfokus (*Focus Group Discussion/FGD*), wawancara mendalam (*in depth interview*) dengan 9 informan kunci, dan observasi partisipatif (*participation observation*), serta penyebaran dan pengisian kuesioner ke 253 responden dari 49 KPS dengan menggunakan *Google Forms* oleh enumerator yang berasal dari pendamping KPS. Analisis data primer dan sekunder dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan kuantitatif sederhana.

Hasil survei menghasilkan pendapatan RT anggota KPS di Kabupaten Garut yang berasal dari areal PS (komoditas yang dikonsumsi sendiri dan di jual). Komoditas PS yang dikonsumsi sendiri antara lain tanaman buah-buahan, kacang-kacangan, umbi-umbian, jagung, dan sayuran. Sedangkan komoditi yang dijual, terdiri dari tanaman pangan (jagung, singkong, ubi), buah-buahan (pisang, pepaya), dan tanaman tahunan seperti kopi, alpukat, dan nangka. Adapun ringkasan pendapatan anggota KPS yang berasal dari areal PS dan Non PS sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan sumber pendapatan rumah tangga KPS di Kabupaten Garut

No	Jenis Pendapatan	Kabupaten Garut		
		Total (Rp)	Rata-rata/ tahun/KK (Rp)	Rata-rata/ bulan/ KK (Rp)
1	Pendapatan areal PS	1.688.707.480	6.674.733	556.228
2	Pendapatan non PS	4.400.520.000	17.393.360	1.449.447
Pendapatan anggota KPS		6.089.227.480	24.068.093	2.005.675
Pendapatan/ kapita			6.017.023	501.419

Dari Tabel 1 di atas, maka data dasar penghasilan anggota KPS dari areal PS **di Garut** adalah **Rp556.226/KK/bulan**. Pada masa akhir proyek FPV, maka diharapkan minimal peningkatan pendapatan per KK/bulan 15% x **Rp556.226**, atau **Rp83.433**, sehingga menjadi Rp639.433/KK/bulan. Sedangkan pendapatan total anggota KPS (baik yang berasal dari PS dan non PS) di Kabupaten Garut adalah **Rp24.068.093/tahun** atau **Rp2.005.675/KK/bulan**, atau **Rp501.419/kapita/bulan**.

Dari data pendapatan di atas, disimpulkan bahwa pendapatan rumah tangga KPS di Garut yang berasal dari areal PS adalah 28% dengan rata-rata penguasaan lahan per keluarga seluas 1.15 ha. Proporsi pendapatan anggota KPS dari areal PS cenderung kecil dibandingkan pendapatan dari luar PS dikarenakan pengelolaan areal PS di Kabupaten Garut yang belum optimal akibat kurangnya modal usaha, modal bibit, dan modal alat produksi, serta infrastruktur jalan dan air belum memadai. Selain itu, pendampingan yang belum optimal. Dan terakhir, anggota KPS di Kabupaten Garut juga memiliki lahan di luar PS serta banyaknya responden mempunyai pekerjaan di luar PS, yaitu sebesar 67%.

Jika dibandingkan dengan data BPS Kabupaten Garut tahun 2024, bahwa batas garis kemiskinan adalah **Rp393.464/kapita/bulan**, maka semua anggota KPS yang di Kabupaten Garut di lokasi FPV terkategori **tidak miskin**. Hal ini dapat dilihat dari rerata pendapatan per keluarga KPS di Kabupaten Garut adalah **Rp2.005.675/KK/tahun** atau **Rp501.419 /kapita/per bulan**. Pendapatan ini masih di atas garis kemiskinan di Garut. Dengan hasil survey rata-rata per KK memiliki 4 anggota keluarga, sehingga pendapatan per keluarga yang terkategori miskin adalah **Rp 1.573.856/KK/ bulan**.

Dapat disimpulkan bahwa dengan pemberian Persetujuan PS, maka anggota KPS di Kabupaten Garut memberikan dampak positif terhadap pendapatan dan mengurangi kemiskinan ekstrim bahkan keluar dari kategori miskin. Sebelum adanya PS, petani-petani ini harus bagi hasil atau bayar sewa ke Perhutani. Data dasar ini didukung oleh data excel *by name by address*, karakteristik responden, pendapatan responden dari areal PS dan juga sumber pendapatan lain yang dari luar PS sebagai acuan dalam penilaian di akhir proyek.

Selain pendapatan di atas, anggota KPS di Garut masih mendapatkan berbagai manfaat lainnya yang belum dihitung secara rupiah seperti sumber mata air, pemanfaatan kayu bakar, sumber papan dan juga obat-obatan. Ditambah dengan PS sebagai penyeimbang iklim mikro, penyedia sumber protein, dan tempat melanjutkan budaya bagi masyarakat adat. PS juga memberikan Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) yang tinggi. NTE KPS di Kabupaten Garut adalah Rp16.170.100.000/tahun berdasarkan dua sampel KPS.

Untuk mencapai peningkatan ekonomi rumah tangga KPS di Garut, maka beberapa rekomendasi adalah: meningkatkan tata kelola kelembagaan, meningkatkan kapasitas anggota KPS oleh pendamping, pemberian modal kerja produksi, dukungan bibit yang berkualitas dan perbaikan infrastruktur pengairan dan jalan. Selain itu, mereka membutuhkan jaringan pemasaran hasil produksi PS hingga ke tingkat nasional dan internasional.

Para anggota KPS di Garut yang menjadi target FPV di atas, merasa sangat senang dengan diberikan izin/persetujuan PS oleh pemerintah dan sangat bermanfaat bagi peningkatan pendapatan. Hal ini dikarenakan: adanya kepastian dalam pengelolaan hutan dan lahan, pengelolaan hutan dan lahan secara independen, menurunnya konflik pengelolaan hutan dan lahan dengan Perhutani, tidak adanya pungutan/bagi hasil, mendapatkan sumber-sumber pangan dan ekonomi rumah tangga, sumber pangan dan papan, serta mendapatkan asistensi dari pendamping mandatori dan mandiri.

EXECUTIVE SUMMARY

This study aims to develop a socio-economic baseline—particularly the baseline of household income—of Social Forestry Groups (Kelompok Perhutanan Sosial/KPS) in Garut Regency, West Java Province. The objectives of this assessment are twofold. First, it seeks to describe the livelihood systems of Social Forestry (SF) beneficiary communities under Forest Programme V (FPV) and to analyze how household income is connected to FPV activities. Second, it aims to establish a socio-economic baseline at the community level that can be integrated into the Monitoring and Evaluation (M&E) framework of FPV.

The study/survey was conducted over a period of five weeks, starting from the second week of November until early December 2025. The study employed both secondary and primary data sources. Secondary data were gathered from institutional reports and publicly accessible information. Meanwhile, primary data were collected through two Focus Group Discussions (FGDs), in-depth interviews with 9 key informants, participatory observation, and the distribution of questionnaires to 253 respondents from 49 SF Groups using Google Forms, administered by KPS facilitators acting as enumerators. The analysis of primary and secondary data was carried out using descriptive qualitative techniques complemented by simple quantitative analysis.

The findings of the survey present the structure of household income among KPS members in Garut, distinguishing between income generated from SF areas and from non-SF sources. Income from SF comes from consumed commodities and marketed SF products. In general, commodities consumed directly by households include staple food crops, fruits, legumes, corn, peanuts, and various vegetables. Commodities sold to markets comprise food crops—such as corn, cassava, and tubers—as well as fruits including banana and papaya, alongside perennial crops such as coffee and avocado. Other marketed products identified during the survey include cassava, corn, vegetables, spices, secondary crops, and jackfruit. A consolidated summary of KPS members' incomes originating from SF and non-SF areas is presented below.

Table 1. Summary of the Household Income of SF Groups in Garut Regency

No	Types of income	Garut Regency		
		Total (Rp)	HH Income/ year (IDR)	HH Income/ month (IDR)
1	Income from SF area	1.688.707.480	6.674.733	556.228
2	Income from non SF	4.400.520.000	17.393.360	1.449.447
Total SF income		6.089.227.480	24.068.093	2.005.675
Income per capita			6.017.023	501.419

*Based on the Table 1 (findings), the baseline of household income from SF area in Garut is **IDR556,228/HH/month**. So that the increase in household income (15%) in Garut Regency from SF area in the end of FPV program becomes IDR Rp639.433. This baseline is supported by detailed data—including by-name, by-address records, respondent characteristics, income from PS areas, and additional income from non-PS sources—which will be used for mid-project assessment and for final project evaluation.*

*The average income of KPS members from combined income from SF and non SF sources—for KPS households in Garut District amounts to IDR 24,068,093/family/year, or **IDR 2,005,675/ month** or IDR Rp**501.419/capita/month**. From these income figures, it can be concluded that household income derived from SF areas constitutes 28% of total income for KPS households. In Garut, the*

average landholding per household is 1.15 hectares. The contribution of income from SF area in Garut is small. This is due to limited working capital, insufficient seed capital, inadequate capacity, as well as poor road and water infrastructure. In addition, facilitation support has not been maximized. Lastly, many KPS members in Garut also own land outside SF areas, and a large proportion of respondents (67%) work in non- SF.

When compared with the 2024 poverty line published by Statistics Indonesia (BPS) for Garut District, all KPS households fall into the non-poor category. This is evident from the average household income of KPS members in Garut, which is **IDR 2,005,675 per month per family**, or **IDR 501,419 per capita per month**. These figures remain above the poverty line for Garut, which is **IDR 393,464 per capita per month**, or **IDR 1,573,856 per household per month** as based on survey an average household size of four members. In conclusion, SF licenses support community to exit from extreme poverty as the all income from SF are owned by community, they do not need to share their income to Perhutani.

Apart from these income sources, KPS members in both districts also gain various additional benefits that were not included in the income calculations, such as access to springs, the use of firewood, construction timber (such as manglit wood), and other materials used for housing. SF areas also provide water, microclimate atmosphere, protein sources, and spaces for sustaining cultural practices, particularly among indigenous communities.

SF has given a big economic transaction value. The economic transaction value of KPS activities in Garut District amounts to IDR 16,170,100,000 per year. This transaction values were calculated using a sample of 2 KPS in Garut.

To achieve economic improvement among KPS households in Garut, several recommendations emerge: strengthening institutional SF governance, enhancing member capacity through facilitation, providing working capital for production, supplying high-quality seedlings, and improving irrigation and road infrastructure. In addition, KPS members require broader market linkages for SF products, extending to national and even international markets.

KPS members in Garut Regency targeted under FPV expressed strong appreciation for the granting of Social Forestry permits/approvals by the government. The reasons include: greater certainty in forest and land management, reduced conflicts with Perhutani, the absence of levies and profit-sharing obligations, access to food and household economic resources from PS areas, food source board source, and ongoing facilitation support from mandatory and voluntary facilitators.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kuasa dan kehendak-Nya maka Laporan Penyusunan Data Dasar Sosial Ekonomi di Lokasi *Forest Programme V* di Kabupaten Garut dapat diselesaikan dengan baik.

Survei/Penelitian ini dibuat dalam kerangka menjelaskan sistem mata pencaharian masyarakat PS penerima manfaat dari *Forest Programme V* di Kabupaten Garut, serta menganalisis keterkaitan pendapatan masyarakat dengan kegiatan FPV. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi data dasar (*baseline*) sosial ekonomi di tingkat masyarakat penerima manfaat PS di lokasi Program V khususnya di Kabupaten Garut, serta mengintegrasikannya dengan sistem monitoring evaluasi FPV

Selaku Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan RI sekaligus *Project Executing Agency Forest Programme V* kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung kegiatan ini. Secara khusus kami ucapkan terima kasih kepada Tim Konsultan YKMI-FKKM yang telah dengan serius dan berkomitmen melakukan dan menyelesaikan pekerjaan ini.

Kami menyadari laporan ini belum sempurna dan belum dapat memenuhi harapan semua pihak yang terlibat, tetapi kami berharap laporan ini dapat bermanfaat dalam membangun database sosial ekonomi dalam sistem monitoring dan evaluasi *Forest Programme V*.

Jakarta, 11 Desember 2025.

Project Executing Agency
Forest Programme V

Julmansyah S.Hut., M.AP

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	i
<i>EXECUTIVE SUMMARY</i>	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Pengantar	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Keluaran.....	2
II. METODOLOGI	3
2.1. Metode Pengumpulan Data.....	3
2.1.1. Pengumpulan Data Sekunder.....	3
2.1.2. Pengumpulan Data Primer	3
2.2. Pembekalan Enumerator	6
2.3. Pelaksanaan Survei dan entry data.....	6
2.4. Metode Analisa Data:	6
III. HASIL PENELITIAN	8
3.1. Kondisi Umum Kabupaten Garut	8
3.1.1. Gambaran Singkat Perkembangan Perhutanan Sosial di Kabupaten Garut	13
3.1.2. Hasil Survei <i>Baseline</i> Sosial Ekonomi di Kabupaten Garut Jawa Barat	18
IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	46
4.1. Kesimpulan.....	46
4.2. Rekomendasi	48
DAFTAR PUSTAKA	49
LAMPIRAN	51
Lampiran 1. Panduan Wawancara (<i>interview</i> Guide).....	51
Lampiran 2. Daftar informan <i>in-depth interview</i> di Kabupaten Garut.....	52
Lampiran 3. Absensi FGD Garut	53
Lampiran 4. Panduan FGD	65
Lampiran 5. Instrumen Survei.....	67
Lampiran 6. Daftar responden di Kabupaten Garut.....	76
Lampiran 7. Daftar enumerator	85
Lampiran 8. Data Survei Kabupaten Garut	88

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Ringkasan sumber pendapatan rumah tangga KPS di Kabupaten Garut	i
Tabel 2. Jumlah sampling survei responden di Garut.....	5
Tabel 3. Jumlah, pertumbuhan, dan kepadatan penduduk Kabupaten Garut 2024	8
Tabel 4. Indikator kemiskinan kabupaten garut 2020 – 2024.....	10
Tabel 5. PDRB ADHK 2010 Kabupaten Garut tahun 2020 – 2024	10
Tabel 6. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Garut 2020 – 2024	11
Tabel 7. Pertumbuhan dan rata-rata pertumbuhan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Garut	12
Tabel 8. Daftar Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) di Kabupaten Garut	13
Tabel 9. Daftar KPS dampingan <i>Forest Programme V</i> di Kabupaten Garut.....	15
Tabel 10. Pembagian tugas pengelolaan PS berdasarkan posisi dalam keluarga di Garut.....	19
Tabel 11. Penguasaan lahan dalam areal PS oleh KPS di Kabupaten Garut.....	20
Tabel 12. Pendapatan anggota KPS dari areal PS dan non-PS di Garut	28
Tabel 13. Jenis-jenis komoditas PS yang dikonsumsi sendiri di Garut	29
Tabel 14. Pendapatan anggota KPS yang berasal dari komoditas PS yang dijual di Garut	30
Tabel 15. Sumber pendapatan rumah tangga responden yang berasal dari luar PS di Garut	31
Tabel 16. Pengolahan dan pemasaran hasil PS pasca panen Kabupaten Garut	32
Tabel 17. Nilai transaksi ekonomi KTH di Kabupaten Garut	34
Tabel 18. Status IDM Desa dengan produk unggulan KPS di Kab. Garut	35
Tabel 19. KPS <i>role model</i> dan faktor-faktor tata kelola yang mempengaruhi di Garut.....	36
Tabel 20. Analisis SWOT KPS Kabupaten Garut.....	37
Tabel 21. Persepsi masyarakat terhadap PS berdasarkan tematik sebelum dan sesudah persetujuan di Kabupaten Garut.....	42
Tabel 22. Keterampilan yang dimiliki dan dibutuhkan anggota KPS di Kabupaten Garut.....	43
Tabel 23. Ringkasan <i>baseline</i> data pendapatan rumah tangga petani KPS berdasarkan Kabupaten	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. FGD dengan LD Wanariksa dan KTH Karamat Jaya di Kecamatan Cisurupan, tanggal 15 November 2025	4
Gambar 2. Peta fungsi kawasan hutan dan areal PS di Kabupaten Garut	16
Gambar 3. Peta penggunaan lahan dan tutupan hutan di Kabupaten Garut	17
Gambar 4. Komposisi responden berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Garut	18
Gambar 5. Responden berdasarkan kelompok umur di Kabupaten Garut	18
Gambar 6. Responden berdasarkan asal-usul Kabupaten Garut	19
Gambar 7. Posisi responden dalam rumah tangga di Kabupaten Garut	19
Gambar 8. Pengambilan keputusan dalam pengelolaan keuangan keluarga responden Garut	20
Gambar 9. Tingkat pendidikan responden Kabupaten Garut	22
Gambar 10. Persepsi tentang pendidikan anak responden Kabupaten Garut	23
Gambar 11. Penyebab putus sekolah anak laki-laki Kabupaten Garut	23
Gambar 12. Penyebab putus sekolah anak perempuan Kabupaten Garut	24
Gambar 13. Kondisi rumah responden di Kabupaten Garut	24
Gambar 14. Kepemilikan rumah responden di Kabupaten Garut	25
Gambar 15. Sumber air bersih bagi KPS di Kabupaten Garut	25
Gambar 16. Rumah tangga responden yang memiliki sarana MCK di Garut	25
Gambar 17. Rumah tangga responden yang tidak memiliki sarana MCK sendiri di Garut	26
Gambar 18. Penggunaan bahan bakar memasak di Kabupaten Garut	26
Gambar 19. Pemanfaatan kayu bakar dari areal PS dan non-PS di Kabupaten Garut	26
Gambar 20. Kepemilikan televisi dan kulkas keluarga responden Garut	27
Gambar 21. Kepemilikan aset produksi bagi anggota KPS di Kabupaten Garut	27
Gambar 22. <i>Local champion</i> Garut, Ibu Hendah (Ketua KTH Griya Bukit Jaya) bersama	36
Gambar 23. Wawancara dengan Pak Jajang Ketua KTH Karamat Jaya, 15 November 2025	41
Gambar 24. Aktivitas penanaman di Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut.	42

I. PENDAHULUAN

1.1. Pengantar

Berdasarkan kebijakan nasional di sektor kehutanan yang menekankan penguatan peran masyarakat dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan, PS menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam mendorong pemerataan akses, peningkatan kesejahteraan, serta penguatan ketahanan pangan, energi dan ekologi di Indonesia. PS sebagaimana diatur dalam PermenLHK Nomor 9 Tahun 2021 merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dilakukan oleh masyarakat setempat atau Masyarakat Hukum Adat (MHA) dalam kawasan hutan negara, hutan hak, maupun hutan adat. Melalui lima skema PS Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA), dan Kemitraan Kehutanan (KK). Pemerintah memberikan akses PS dan pengakuan legal kepada masyarakat untuk Hutan Adat, sehingga masyarakat mengelola sumber daya hutan secara inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) melalui Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial (Ditjen PS) terus memperkuat implementasi PS dengan dua fokus utama: percepatan pemberian akses dan peningkatan kualitas KPS pasca persetujuan/izin. Penguatan KPS dan pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) menjadi strategi kunci untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat, khususnya melalui pengembangan komoditas unggulan seperti kopi, madu, damar, agroforestri, serta jasa lingkungan. Kualitas KUPS yang diklasifikasikan menjadi Biru, Perak, Emas, dan Platinum menjadi indikator kemajuan usaha, peningkatan kapasitas organisasi, serta kemampuan masyarakat dalam mengelola kawasan dan potensi hutan dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga.

Sebagai upaya memperkuat capaian tersebut, Pemerintah Republik Indonesia bekerjasama dengan Pemerintah Federal Republik Jerman didukung oleh BMZ–KfW melaksanakan program peningkatan ekonomi masyarakat dan peningkatan tutupan hutan melalui FPV. Program ini bertujuan mengharmonisasikan pembangunan ekonomi dengan perlindungan iklim dan sumber daya alam melalui peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan hutan yang berbasis sosial, ekologis, dan ekonomi. Dukungan FPV meliputi intervensi pada penanaman, perlindungan hutan, pengembangan agroforestri, serta penguatan kelembagaan dan usaha masyarakat melalui peningkatan nilai tambah komoditas dan penguatan rantai nilai.

Dalam kerangka Monitoring dan Evaluasi (M&E) FPV, penyusunan *Baseline* Sosial Ekonomi (*Baseline* Sosek) menjadi tahap penting untuk memahami kondisi awal kesejahteraan rumah tangga anggota KPS/KTH sebelum intervensi program dilaksanakan. *Baseline* ini digunakan sebagai dasar pembandingan untuk menilai efektivitas program, khususnya terkait perubahan pendapatan, struktur produksi, kapasitas kelembagaan, pemasaran, dan kontribusi ekonomi usaha PS melalui perhitungan Nilai Transaksi Ekonomi (NTE).

Berdasarkan data GoKUPS pada tanggal 30 Oktober 2025, pukul 14.05 WIB, Kabupaten Garut memiliki 56 izin KPS yang terdiri dari 11 HD (20%), 22 HKm (39%), dan 23 KK (41%), dengan total 77 KUPS. Kategori KUPS didominasi Perak (49%) dan Biru (40%), sementara KUPS Emas (9%) dan Platinum (6%) masih terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar usaha PS di Garut berada dalam tahapan pengembangan awal hingga menengah, sehingga masih membutuhkan pendampingan intensif baik pada aspek kelembagaan, pengembangan ekonomi (pengembangan produksi, akses pembiayaan, maupun pemasaran) dan aspek tata kelola kawasan. Dari 56 persetujuan PS di Garut, 49 KPS menjadi target program FPV sebagai dasar pembuatan *baseline* sosial ekonomi PS di Kabupaten Garut.

Baseline ini diperlukan untuk mengidentifikasi kondisi sosial ekonomi, kapasitas kelembagaan, peluang ekonomi, serta kendala KPS/KTH secara lebih mendalam meliputi aspek produksi, pemasaran, akses modal, serta potensi peningkatan NTE sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu, kegiatan *Baseline* Sosek telah dilaksanakan di Kabupaten Garut, melibatkan 253 responden yang berasal dari 49 KPS di Kabupaten Garut.

Hasil *baseline* ini diharapkan dapat memberikan gambaran faktual, terukur, dan komprehensif sebagai dasar perencanaan intervensi yang lebih tepat sasaran. Selain itu, *baseline* akan menjadi tolok ukur untuk analisis dampak program FPV pada tingkat rumah tangga dan kelembagaan PS, serta menjadi acuan dalam penguatan strategi peningkatan kondisi sosial-ekonomi masyarakat berbasis pengelolaan hutan lestari.

1.2. Tujuan

Pengumpulan data pendapatan rumah tangga anggota KPS diperlukan sebagai data dasar proyek dan menjadi bagian dari sistem M&E. Adapun tujuan dari kajian data pendapatan rumah tangga ini adalah:

- Menjelaskan sistem mata pencaharian pada masyarakat penerima manfaat FPV dan menganalisis keterkaitan pendapatan masyarakat dengan kegiatan FPV.
- Membangun data dasar (*baseline*) sosial-ekonomi di tingkat masyarakat penerima manfaat dan mengintegrasikannya dengan sistem M&E FPV.

Hasil analisa kondisi sosial ekonomi dan mata pencaharian akan mendorong terbangunnya data dasar dan indikator di tingkat proyek yang dapat digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi kegiatan di tingkat masyarakat. Indikator sosial ekonomi mencakup populasi, karakteristik, sumber pendapatan, tingkat pendapatan, sistem mata pencaharian dalam rumah tangga, tingkat kemiskinan dan pendidikan, keterampilan dan akses kepada pelayanan dasar dan akses ke infrastruktur jalan dan lain-lain.

1.3. Keluaran

Keluaran yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah:

- Data pendapatan rumah tangga dari anggota KPS sebagai dasar untuk monitoring dan evaluasi proyek
- Informasi tentang produk kayu dan non-kayu serta kegiatan usaha lain yang berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat
- Informasi tentang pelatihan yang dibutuhkan untuk Kelompok Usaha Perhutanan Sosial dan Kelompok Perhutanan Sosial.

II. METODOLOGI

Hipotesis yang dibangun dalam program FPV adalah “Anggota KPS akan meningkatkan pendapatannya dari areal PS sebagai dampak intervensi dari proyek FPV” sebesar 15% pada akhir program. Untuk mengukur peningkatan tersebut diperlukan *baseline* pendapatan Anggota KPS saat ini, terutama yang berasal dari hasil hutan bukan kayu di areal PS. Anggota KPS diharapkan memperoleh pemasukan ekonomi dari kegiatan manajemen hutan yang tangguh terhadap cuaca (*climate resilient*). Proses penyusunan data dasar sosial ekonomi dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu: (1) Pengumpulan data dan informasi baik itu sekunder dan primer; (2) Analisis data dan informasi secara kualitatif dan kuantitatif sederhana; serta (3) Pembuatan laporan dan rekomendasi. Metode analisis kualitatif dilakukan untuk mengkategorisasi data-data yang bersumber dari wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus/*focus group discussion* (FGD), dan observasi. Sementara metode kuantitatif sederhana digunakan untuk menganalisis data-data hasil kuesioner.

2.1. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan adalah berupa data sekunder dan data primer. Data sekunder dilakukan dengan mengumpulkan semua data dari laporan, publikasi, buku, dan sumber lainnya yang didapatkan dari pengumpulan data ke kantor dan instansi terkait dan dari internet. Sedangkan data primer didapatkan dengan melakukan *interview* mendalam, FGD, observasi lapangan partisipatif dan penyebaran kuesioner.

2.1.1. Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder meliputi data sosial, ekonomi, dan demografi desa, peta lokasi KPS, serta dokumen terkait PS dari Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, Balai PS Bogor, serta instansi terkait. Selain itu, data dan profil KPS, profil desa yang ada KPS-nya, laporan perkembangan desa dan penggunaan dana desa, informasi dan berita terkait perhutanan sosial, laporan FPV, peta dan rencana kerja KPS yang ada di Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat.

Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui penelusuran di internet dan meminta langsung dokumen, laporan, publikasi dan peta yang relevan kepada para pihak mulai dari: Kelompok Perhutanan Sosial, Kepala Desa, Pemerintah Daerah, FPV, Balai perhutanan Sosial Bogor, Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut, serta lembaga/institusi lain yang relevan. Pengumpulan data sekunder dilakukan pada awal November hingga Awal Desember 2025.

2.1.2. Pengumpulan Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan melalui 4 cara: wawancara mendalam, FGD, observasi dan penyebaran kuesioner.

A. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam dilakukan dengan menggunakan panduan wawancara (Lampiran 1). Wawancara mendalam dilakukan pada 15 informan kunci (13 laki-laki dan 2 perempuan) yang merupakan perwakilan KPS, KUPS, perempuan dan pemuda (daftar informan dapat dilihat pada Lampiran 2).

Wawancara mendalam dilaksanakan pada tanggal 18 November 2025, pertama dilakukan dengan Ibu Hendah yang merupakan Ketua KTH Griya Bukit Jaya. Kedua dilakukan wawancara dengan informan bernama Ade Rohana yang merupakan Ketua KUPS Warta Daya dan Humas dari KTH Relawan Dapur Areung. Wawancara ketiga dilakukan pada tanggal 19 November 2025 dengan informan atas nama Ade Juhana yang merupakan ketua KTH Karya Mekar Lestari. Wawancara terakhir dilakukan pada tanggal 20 November 2025 dengan anggota dari KTH Nangklak Jaya bernama Firman.

B. Focus Group Discussion (FGD)

Focus Group Discussion adalah metode pengumpulan data secara kualitatif dengan mengumpulkan 7-15 perwakilan anggota KPS dan dengan tema tertentu untuk menggali informasi yang

dibutuhkan. FGD ini dilakukan Tim Konsultan YKMI-FKKM bersama Pendamping PS dengan beberapa anggota KPS sebanyak dua kali (daftar peserta dapat dilihat pada Lampiran 3).

Jumlah peserta FGD di Kabupaten Garut adalah sebanyak 44 orang (laki-laki 29 orang dan perempuan/pemuda 15 orang) sebagai representasi 12 KPS. FGD dilakukan tim FKKM untuk mendapatkan informasi mendalam sebagai pelengkap kuesioner dan wawancara mendalam. Dalam melakukan FGD, tim FKKM menggunakan Panduan FGD yang dapat dilihat pada Lampiran 4. FGD dilakukan dengan melibatkan representasi pengurus dan anggota KPS, serta perempuan yang sudah berkegiatan aktif dalam KPS dan menghasilkan produk.

Rincian pelaksanaan FGD di Kabupaten Garut adalah sebagai berikut:

1. FGD melibatkan KPS Karamat Jaya, Desa Karamatwangi, Kecamatan Cisarupan Kabupaten Garut dengan peserta sebanyak 19 anggota KPS di mana 14 orang laki-laki dan 5 perempuan/pemuda. Diskusi juga diikuti oleh 1 Pendamping PS dan FPV. FGD dilaksanakan pada tanggal 15 November 2025 Pkl.09.30 – 12.00 di Agrowisata Tepas Papandayan Desa Karamatwangi.
2. FGD dengan KPS LD Wanariksa Desa Cikandang, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut. Peserta FGD sebanyak 25 orang, di mana 4 peserta di antaranya perempuan. Diskusi juga diikuti oleh 1 Pendamping PS dan perwakilan FPV. FGD dilakukan pada tanggal 15 November 2025 Pkl. 15.00 – 17.00 di Kantor Desa Cikandang, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut.



Gambar 1. FGD dengan LD Wanariksa dan KTH Karamat Jaya di Kecamatan Cisarupan, tanggal 15 November 2025

C. Observasi Lapangan

Observasi lapangan dilakukan dengan mengamati kondisi kehidupan responden, tempat usaha PS, lingkungan desa, serta lahan garapan Perhutanan Sosial. Observasi lapangan dilakukan di areal PS untuk mendapatkan gambaran situasi areal PS, tanaman dan sumberdaya hutan yang ada, lanskapnya serta aktifitas anggota KPS. Observasi di Kabupaten Garut dilakukan pada 6 KTH yaitu, KTH Karamat Jaya di Desa Kramatwangi di Kecamatan Cisarupan, KTH Griya Bukit Jaya di Desa Salam Nunggal di Kecamatan Cisarupan, LD Wanariksa di Desa Cikandang di Kecamatan Cikajang, KTH Rimba Jaya di Desa Margamulya di Kecamatan Cikajang, KTH Nangklak Jaya di Desa Sirnajaya di Kecamatan Cisarupan, KTH Karya Mekar Lestari di Desa Karyamekar di Kecamatan Pasirwangi.

Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa tata kelola PS di empat lokasi memiliki tingkat perkembangan yang beragam, namun secara umum masyarakat telah merasakan manfaat PS, tetapi masih membutuhkan penguatan kelembagaan, manajemen area/kawasan, tata kelola usaha, dan peningkatan kapasitas teknis terutama dalam pengolahan kopi.

D. Penyebaran Kuesioner

Penyebaran kuesioner dilakukan kepada 253 responden/rumah tangga dengan kriteria: (1) anggota KPS yang aktif mengelola garapannya (2) Anggota KPS dan KUPS yang telah memiliki produk dan hasil dari usaha PS. Selain itu, (3) pertimbangan keseimbangan komposisi responden di antara

pengurus dan anggota, serta perempuan. Kuesioner survei yang digunakan dalam survei rumah tangga ini dapat dilihat pada Lampiran 5. Adapun 253 responden dari Kabupaten Garut diperoleh dari 49 KPS, dengan jumlah responden sebanyak 5 responden per KPS (total terdapat 49 KPS) dan juga terdapat 8 responden tambahan. Daftar responden dapat dilihat pada Lampiran 6

E. Metode Sampling

Metode sampling adalah *purposive* (memiliki tujuan tertentu). Tujuan yang dimaksud adalah ditujukan untuk anggota KPS yang aktif, telah berproduksi dan komposisi responden. Tabel 2 di bawah menunjukkan ringkasan jumlah sampel di Kabupaten Garut.

Tabel 2. Jumlah sampling survei responden di Garut

Kabupaten	Jumlah KPS (unit)	Jumlah Pendamping	Jumlah sampling (responden)	Keterangan
Garut	49	17	$245 + 8 = 253$	1 KPS dipilih 5 Anggota KPS sebagai responden, dan ditambah 8 responden

Catatan : Responden terpilih mewakili anggota KPS yang ada di Garut

F. Parameter Utama yang Diukur di dalam Survei

- Keluarga:
 - Identitas responden
 - Jumlah anggota keluarga
 - Jenis mata pencaharian
- Pendidikan
 - Mengalami pendidikan sekolah
 - Alasan untuk tidak memasuki atau putus sekolah
- Struktur dasar rumah tangga
 - Tipe rumah
 - Aset produktif
 - Akses ke listrik
 - Akses ke air
 - Akses ke sanitasi
 - Akses ke gas untuk memasak
- Pemasaran komoditas pertanian
 - Komoditas utama
 - Penanganan paska panen
 - Potensi pasar
 - Tantangan dalam pemasaran
 - Pendapatan rumah tangga
 - Pendapatan rumah tangga akan diukur dari bentuk barang dan uang tunai. Ruang lingkup Hasil Hutan Bukan Kayu akan mengikuti Peraturan Menteri KLHK 35/2007, yang mencakup semua hasil hutan yang bersifat hayati, non-hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan
- Bentuk Natura (*in kind*)
 - *Multi Purpose Tree Species*
 - *Non-timber forest product*
 - Sumber pendapatan lain.
- Bentuk materi (*cash*)
 - *Multi Purpose Tree Species*

- *Non-timber forest product*
- Sumber pendapatan lain
- Keterampilan dan pengetahuan
 - Pengetahuan dan Keterampilan yang dimiliki
 - Jenis pelatihan yang pernah diikuti
 - Usulan kebutuhan pelatihan yang diinginkan

2.2. Pembekalan Enumerator

Enumerator adalah individu dalam hal ini pendamping KPS program dari CDK Kabupaten Garut, Jawa Barat yang dilatih khusus untuk mengumpulkan data dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner.

Pembekalan enumerator dilakukan sebanyak sekali di Kabupaten Garut dengan melibatkan 17 pendamping termasuk 3 perempuan, juga melibatkan Kepala CDK, serta perwakilan FPV. Pembekalan enumerator di Kabupaten Garut diberikan kepada 17 pendamping dilakukan pada tanggal 14 November 2025, di Aula Citarum, Komplek Perkantoran Kabupaten Garut (absensi enumerator dapat dilihat pada Lampiran 7).

Pembekalan enumerator dilakukan dengan memberikan penjelasan tentang kuesioner yang akan dipergunakan serta praktik pengisian kuesioner dengan menghadirkan masing-masing 15 anggota KPS. Dalam pembekalan enumerator penggunaan bahasa lokal sangat penting dilakukan. Tahapan uji coba ini penting bagi enumerator untuk menentukan strategi pengumpulan data yang cepat untuk dilakukan di wilayah dampingannya masing-masing. (daftar nama enumerator di Kabupaten Garut dapat dilihat pada Lampiran 4).

2.3. Pelaksanaan Survei dan *entry data*

Pelaksanaan survei di Kabupaten Garut dilakukan dari tanggal 15 November hingga tanggal 24 November 2025. Data Kuesioner kemudian di-*entry* ke dalam format excel oleh Tenaga ahli Lokal YKMI dan selesai pada pekan pertama bulan Desember.

2.4. Metode Analisa Data:

Analisa data dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif sederhana. Data sekunder dianalisis melalui *desk review*. Sementara data hasil FGD, *interview* dan observasi dilakukan secara kualitatif deskriptif dan analisis konten. Selain itu dilakukan juga triangulasi data untuk melihat konsistensi data.

Data-data yang diambil dengan menggunakan kuesioner dimasukkan dalam *Google Forms*, kemudian ditabulasi serta dianalisis secara kuantitatif. Hasil kuesioner dianalisis secara kuantitatif sederhana. Data tabulasi tersebut menyangkut profil keluarga, struktur dan kepemilikan rumah tangga, pemilahan pendapatan rumah tangga dari areal perhutanan sosial dan yang bukan dari areal PS, biaya memproduksi komoditas yang dijual, jenis keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki dan yang sebaiknya dimiliki. Kesimpulan data kuantifikasi tersebut dilaporkan secara grafik maupun tabel dengan kategori per komoditas serta sebagian ada yang per KPS.

Analisa gender dilakukan pada khususnya untuk perempuan dan anggota rumah tangga dalam sistem pertanian agroforestri. Data dan informasi terkait persepsi, jenis pelatihan yang dibutuhkan dan aspek *gender* dianalisis secara kualitatif untuk memberikan rekomendasi ke FPV dan mengetahui apakah dengan adanya KPS, pekerjaan perempuan semakin ringan dan juga keterlibatan perempuan semakin tinggi atau sebaliknya.

Hasil analisis deskriptif kemudian diintegrasikan dengan hasil kuantitatif sehingga memperkuat kesimpulan terhadap *baseline* data ekonomi rumah tangga KPS di Kabupaten Garut. Hasil analisis

tersebut disintesis dan disimpulkan menjadi data *baseline* pendapatan anggota KPS rerata di Kabupaten Garut untuk kemudian dijadikan dasar dalam proses monitoring dan evaluasi ke depan.

Adapun cara mendapatkan angka Pendapatan Rumah Tangga KPS yang berasal dari area PS adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan dari komoditas yang dikonsumsi sendiri yaitu menghitung jenis komoditas yang dikonsumsi oleh responden per tahun dikalikan dengan harga rata-rata komoditas tersebut di dusun atau desa. Atau dengan kata lain menghitung total jumlah komoditas yang dikonsumsi sendiri per tahun dikali harga rata-rata komoditas di lokasi.
2. Pendapatan dari komoditas yang dijual yaitu dengan cara menghitung penerimaan (jumlah kuantitas panen setahun oleh responden) dari masing-masing jenis komoditas yang dijual dikalikan dengan harga masing-masing komoditas yang dijual dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan. Singkatnya Pendapatan adalah penerimaan hasil penjualan dikurangi (-) dengan biaya produksi. Biaya yang dimaksud adalah biaya pembelian bibit, perawatan dan biaya transportasi penjualan komoditas/produk PS. Namun untuk biaya tenaga kerja petani KPS belum dihitung.

Dengan demikian pendapatan dari komoditas yang dijual adalah pendapatan bersih yang sudah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan petani untuk menghasilkan produk tersebut di luar biaya tenaga kerja anggota KPS.

III. HASIL PENELITIAN

3.1. Kondisi Umum Kabupaten Garut

Kabupaten Garut merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat dengan luas wilayah 3.074,07 km² dan pusat pemerintahan berada di Kecamatan Tarogong Kidul. Secara administratif, Garut terbagi menjadi 42 kecamatan, 21 kelurahan, dan 421 desa. Kabupaten ini berada pada koordinat 6°56'49" – 7°45'00" Lintang Selatan dan 107°25'8" – 108°7'30" Bujur Timur.

Secara geografis, Kabupaten Garut memiliki bentang alam yang beragam, mulai dari dataran rendah, dataran tinggi, hingga kawasan perbukitan dan pegunungan. Bagian Utara, Timur, dan Barat didominasi oleh dataran tinggi dengan kontur berbukit dan bergunung, sedangkan bagian selatan memiliki topografi yang lebih curam dengan lembah-lembah sempit. Berdasarkan tingkat kemiringan, wilayah Garut mencakup lahan dengan kemiringan 0–2° seluas 32.229 ha, 2–15° seluas 38.097 ha, 15–40° seluas 110.326 ha, dan kemiringan lebih dari 40° seluas 125.867 ha. Kondisi topografi yang kompleks ini sangat mempengaruhi pola pemanfaatan lahan, jenis komoditas pertanian, serta aksesibilitas masyarakat.

Batas wilayah Kabupaten Garut meliputi:

- **Utara:** Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang
- **Selatan:** Samudera Hindia
- **Timur:** Kabupaten Tasikmalaya
- **Barat:** Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur

Dari sisi hidrologi, Kabupaten Garut memiliki 33 sungai dengan 101 anak sungai dan total panjang aliran mencapai 1.397,34 km. Wilayah utara masuk ke dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Cimanuk yang bermuara ke Laut Jawa, sementara bagian selatan terdiri dari DAS Cikaengan dan Cilaki yang mengalir ke Samudera Hindia. Sungai-sungai di bagian Selatan umumnya lebih pendek dan berlembah, sedangkan sungai di utara cenderung lebih panjang dan memiliki fungsi hidrologis yang lebih luas.

Secara demografis, jumlah penduduk Kabupaten Garut pada tahun 2024 tercatat sebanyak 2.716.950 jiwa, menunjukkan skala populasi yang besar dan tersebar di 42 kecamatan dengan karakteristik wilayah yang beragam (lihat Tabel 3). Tingkat kepadatan penduduk rata-rata mencapai 886 jiwa per km², mencerminkan adanya tekanan penduduk terhadap ruang yang cukup tinggi, terutama pada kecamatan dengan konsentrasi penduduk besar seperti Cilawu, Bayongbong, dan Cisarupan. Berdasarkan proyeksi periode 2020–2024, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Garut mencapai 1,33%, yang mengindikasikan adanya peningkatan populasi dalam beberapa tahun terakhir.

Dari sisi komposisi jenis kelamin, rasio jenis kelamin (*sex ratio*) berada pada angka 104,57, yang berarti terdapat sekitar 105 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan. Angka ini memperlihatkan susunan penduduk yang relatif seimbang, dengan sedikit dominasi penduduk laki-laki sebagaimana terjadi di sebagian besar kecamatan. Variasi ini memperkuat gambaran bahwa struktur demografi Garut tidak hanya dipengaruhi oleh faktor alami seperti kelahiran dan kematian, tetapi juga dinamika mobilitas penduduk di tingkat lokal.

Tabel 3. Jumlah, pertumbuhan, dan kepadatan penduduk Kabupaten Garut 2024

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Ribu)	Pertumbuhan Penduduk (%)	Persentase Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (Orang/km ²)	Rasio Jenis Kelamin Penduduk (%)
Cisewu	34.2	0.66	1.26	198	105.7
Caringin	33.7	1.35	1.24	340	108
Talegong	29.5	0.66	1.08	271	108.4
Bungbulang	60.3	0.92	2.22	410	108.6
Mekarmukti	19.6	2.09	0.72	355	100
Pamulihan	19.4	1.11	0.71	146	103.6
Pakenjeng	70.7	0.92	2.6	356	106.4
Cikelet	46.9	1.39	1.72	272	105.2
Pameungpeuk	45	1.47	1.65	1019	103.2
Cibalong	47	1.45	1.73	220	105.8

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Ribu)	Pertumbuhan Penduduk (%)	Persentase Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (Orang/km ²)	Rasio Jenis Kelamin Penduduk (%)
Cisompet	55	1.11	2.02	319	105.6
Peundeuy	24.8	1.13	0.91	436	106.1
Singajaya	49	0.93	1.8	724	104.4
Cihurip	19.4	0.98	0.71	480	104.6
Cikajang	88	1.27	3.24	704	106.1
Banjarwangi	59.6	0.83	2.19	481	107.4
Cilawu	113.1	1.29	4.16	1456	103
Bayongbong	108.8	1.55	4	2284	106.1
Cigedug	46.6	1.88	1.72	1494	107.4
Cisurupan	102	0.9	3.75	1261	105.9
Sukaresmi	41.8	1.27	1.54	1188	104.7
Samarang	81.2	1.37	2.99	1360	105.2
Pasirwangi	67.4	1	2.48	1443	107
Tarogong Kidul	120	1.16	4.42	6168	100.5
Tarogong Kaler	102.6	1.81	3.78	2029	101.8
Garut Kota	131.8	0.87	4.85	4757	100.5
Karangpawitan	146.8	2.1	5.4	2820	103.6
Wanaraja	51	1.48	1.88	1447	106.2
Sucinaraja	31	1.68	1.14	916	102.8
Pangatian	44.4	1.45	1.63	2250	103.8
Sukawening	59.7	1.75	2.2	1536	104.4
Karangtengah	19.7	1.9	0.73	847	104.1
Banyuresmi	95.7	1.34	3.52	1998	103.4
Leles	88.2	1.49	3.25	1200	105.6
Leuwigoong	49.4	1.69	1.82	2554	103.8
Cibatu	77.5	1.39	2.85	1872	103.7
Kersamanah	40.6	1.38	1.5	2463	101.7
Cibiuk	37.1	1.88	1.36	1862	106.4
Kadungora	96.4	1.19	3.55	2584	104.3
Blubur Limb.	81	0.8	2.98	1101	107
Selaawi	44.5	1.73	1.64	1305	105.6
Malangbong	136.7	1.44	5.03	1480	105.3
Garut	2717	1.33	100	886	104.6

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut¹

Secara keseluruhan, indikator-indikator kependudukan ini menunjukkan bahwa Kabupaten Garut memiliki struktur demografi yang berkembang dengan baik, dengan pertumbuhan penduduk yang stabil, tingkat kepadatan yang mencerminkan pusat-pusat aktivitas tertentu, serta komposisi gender yang seimbang.

¹ Data dapat diakses pada tautan <https://garutkab.bps.go.id/id/statistics-table/3/V1ZSbFRUY3ITbFpEYTNsVWNGcDZjek53YkhsNFFUMDkjMyMzMjA1/jumlah-penduduk--laju-pertumbuhan-penduduk--distribusi-persentase-penduduk--kepadatan-penduduk--rasio-jenis-kelamin-penduduk--menurut-kecamatan-di-kabupaten-garut.html>

Tabel 4. Indikator kemiskinan kabupaten garut 2020 – 2024

Indikator Kemiskinan					
	2020	2021	2022	2023	2024
Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Blh)	310,437	320,050	335,134	367,681	393,464
Jlh Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)	262.78	281.36	276.67	260.5	259.32
Persentase Penduduk Miskin (P0)	9.98	10.65	10.42	9.77	9.68
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0.97	1.4	1.81	1.17	1.41
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0.15	0.29	0.45	0.23	0.29

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut 2024²

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Garut menunjukkan tren penurunan yang konsisten dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 262,78 ribu jiwa, dan angka ini terus menurun hingga mencapai 259,32 ribu jiwa pada tahun 2024. Pola penurunan yang sama juga terlihat pada persentase penduduk miskin, yang turun dari 9,98% pada 2020 menjadi 9,68% pada 2024, menandakan perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat meskipun berlangsung secara bertahap.

Garis kemiskinan di Kabupaten Garut juga mengalami peningkatan setiap tahunnya, mencerminkan penyesuaian terhadap inflasi dan naiknya harga kebutuhan dasar. Pada tahun 2020, garis kemiskinan berada pada angka Rp310.437 per kapita per bulan, kemudian meningkat menjadi Rp 393.464 pada tahun 2024. Sementara itu, indikator kedalaman kemiskinan (P1) dan keparahan kemiskinan (P2) menunjukkan fluktuasi namun tetap berada pada level yang relatif rendah, dengan P1 meningkat dari 0,97 pada 2020 menjadi 1,41 pada 2024, dan P2 meningkat dari 0,15 menjadi 0,29 pada periode yang sama.

Tabel 5. PDRB ADHK 2010 Kabupaten Garut tahun 2020 – 2024

Kategori Lapangan Usaha	PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	12483.74	12934.34	13507.5	13722.99	13879.41
Pertambangan dan Penggalian	811.71	822.17	821.39	820.29	810.96
Industri Pengolahan	3367.92	3567.01	3791.38	4096.43	4483.45
Pengadaan Listrik dan Gas	23.21	25.57	26.5	27.6	28.48
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	21.1	23.17	23.82	24.5	26.69
Konstruksi	2470.95	2639.53	2691.81	2921.11	3090.62
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7908.33	8151.74	8520.78	8930.76	9422.42
Transportasi dan Pergudangan	1464.03	1466.84	1641.32	1832.93	2049.02
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1525.26	1529.14	1789.4	1974.93	2042.75
Informasi dan Komunikasi	1482.96	1590.94	1687.52	1823.06	1997.34
Jasa Keuangan dan Asuransi	1116.36	1164.75	1166.99	1215.06	1274.22
Real Estate	784.84	863.16	901.98	958.48	1036.64

² Data dapat diakses melalui menu tabel dinamis situs web BPS Kabupaten Garut di tautan <https://garutkab.bps.go.id/id/query-builder>

Kategori Lapangan Usaha	PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)				
Jasa Perusahaan	207.35	225.07	247.53	265.53	274.75
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1165.49	1155.43	1151.8	1179.8	1255.53
Jasa Pendidikan	2047.08	2069.35	2126.6	2233.53	2382.44
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	307.18	330.49	354.46	379.79	399.1
Jasa lainnya	1410.94	1422.5	1562.18	1680.43	1817.09
Produk Domestik Regional Bruto	38598.43	39981.19	42012.96	44087.22	46270.92

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut³

Tabel 6. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Garut 2020 – 2024

Kategori Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0.55	3.61	4.43	1.6	1.14
Pertambangan dan Penggalian	-0.69	1.29	-0.09	-0.13	-1.14
Industri Pengolahan	-0.46	5.91	6.29	8.05	9.45
Pengadaan Listrik dan Gas	-1.21	10.18	3.62	4.14	3.2
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.42	9.82	2.82	2.83	8.97
Konstruksi	-5.58	6.82	1.98	8.52	5.8
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-6.72	3.08	4.53	4.81	5.51
Transportasi dan Pergudangan	-3.19	0.19	11.89	11.67	11.79
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-3.05	0.25	17.02	10.37	3.43
Informasi dan Komunikasi	23.15	7.28	6.07	8.03	9.56
Jasa Keuangan dan Asuransi	0.48	4.33	0.19	4.12	4.87
<i>Real Estate</i>	-0.15	9.98	4.5	6.26	8.15
Jasa Perusahaan	-13.45	8.54	9.98	7.27	3.47
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-1.74	-0.86	-0.31	2.43	6.42
Jasa Pendidikan	4.95	1.09	2.77	5.03	6.67
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-5.09	7.59	7.25	7.15	5.08
Jasa lainnya	-2.76	0.82	9.82	7.57	8.13
Produk Domestik Regional Bruto	-1.26	3.58	5.08	4.94	4.95

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut

Secara ekonomi, Kabupaten Garut menunjukkan pemulihan yang kuat pasca pandemi dengan peningkatan kinerja di hampir seluruh sektor lapangan usaha. Setelah mengalami kontraksi sebesar –

³ Data dapat diakses pada tautan <https://garutkab.bps.go.id/id/query-builder>

1,26% pada 2020, ekonomi Garut kembali tumbuh 3,58% pada 2021, meningkat menjadi 5,08% pada 2022, dan stabil pada 4,94% pada 2023, sebelum kembali naik menjadi 4,95% pada 2024. Pertumbuhan ini ditopang oleh kinerja sektor-sektor utama, terutama industri pengolahan yang tumbuh sangat tinggi, yakni 8,05% pada 2023 dan 9,45% pada 2024, serta sektor transportasi dan pergudangan yang mencatat pertumbuhan spektakuler hingga 11,67% pada 2023 dan 11,79% pada 2024. Sektor informasi dan komunikasi juga terus menguat dengan pertumbuhan 8,03% pada 2023 dan 9,56% pada 2024, sementara sektor konstruksi, perdagangan besar dan eceran, penyediaan akomodasi dan makanan-minuman turut mencatat perbaikan signifikan seiring meningkatnya mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat. Secara keseluruhan, nilai PDRB ADHK Kabupaten Garut meningkat dari Rp 44,087 triliun pada 2023 menjadi Rp 46,270 triliun pada 2024, mencerminkan kapasitas ekonomi yang terus berkembang dan struktur ekonomi yang semakin dinamis. Dapat dilihat pada Tabel 5 dan Tabel 6.

Mata pencaharian penduduk Kabupaten Garut sangat dipengaruhi oleh kondisi topografi yang didominasi kawasan pegunungan, lereng, dan bentang lahan pertanian. Sebagian besar penduduk menggantungkan hidup pada sektor pertanian, baik tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan, maupun berbagai bentuk agroforestri yang menjadi ciri khas pemanfaatan lahan di wilayah perdesaan Garut. Berbagai komoditas unggulan berkembang di sejumlah kecamatan, seperti kopi, padi, domba Garut, alpukat, rempah-rempah, dan madu, serta pemanfaatan biomassa sebagai sumber energi terbarukan yang mulai dikembangkan oleh kelompok tani dan pelaku usaha lokal.

Dalam konteks perhutanan sosial, desa-desa yang berada di sekitar dan di dalam areal Perhutanan Sosial pada umumnya dihuni oleh masyarakat lokal dengan struktur sosial komunitas yang kuat. Topografi pegunungan mendorong praktik kebun campur, agroforestri, pertanian lahan kering, serta penggunaan lahan berbasis kearifan lokal. Ketergantungan masyarakat pada sektor pertanian dan sumber daya alam menjadi faktor penting dalam perencanaan program FPV, terutama terkait peningkatan kapasitas, penguatan kelembagaan, dan pengembangan usaha perhutanan sosial.

Secara keseluruhan, Kabupaten Garut memiliki karakter geografis yang kompleks, potensi sumber daya alam yang besar, komposisi penduduk produktif yang mendominasi, serta dinamika sosial-ekonomi yang berkembang. Semua faktor ini menjadi landasan penting dalam melihat peluang dan tantangan pembangunan, khususnya dalam penguatan pengelolaan perhutanan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah ini.

Tabel 7. Pertumbuhan dan rata-rata pertumbuhan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 – 2021

Jenis Pendapatan Daerah Kabupaten Garut		Laju Pertumbuhan Pendapatan Pemerintah Kabupaten Garut Menurut Jenis Pendapatan		
		2019	2020	2021
Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15.49%	-2.45%	18.15%
	Pajak Daerah	2.77%	-11.59%	8.74%
	Retribusi Daerah	-25.56%	-29.59%	27.48%
	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.67%	24.29%	-8.56%
	Lain-lain PAD yang Sah	25.41%	2.10%	21.61%
Dana Perimbangan		8.29%	-10.90%	7.09%
	Bagi Hasil Pajak	-5.90%	2.06%	34.18%
	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	128.85%	-53.23%	184.75%
	Dana Alokasi Umum	3.38%	-9.46%	0.16%
	Dana Alokasi Khusus	8.97%	-5.44%	-2.91%
Lain-lain Pendapatan yang Sah		16.78%	1.63%	-5.25%
	Pendapatan Hibah	4.24%	9.25%	4.73%

Jenis Pendapatan Daerah Kabupaten Garut		Laju Pertumbuhan Pendapatan Pemerintah Kabupaten Garut Menurut Jenis Pendapatan		
	Dana Darurat	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	6.91%	0.75%	2.40%
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah	21.31%	7.52%	-3.27%
	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	27.23%	-10.39%	-20.70%
Jumlah		11.47%	-6.22%	4.17%

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut

3.1.1. Gambaran Singkat Perkembangan Perhutanan Sosial di Kabupaten Garut

Kabupaten Garut memiliki luas wilayah sebesar 310.705 hektare, dengan kawasan hutan mencapai 117.955 hektare atau sekitar 37,96% dari total wilayah. Kawasan hutan tersebut terdiri dari Hutan Konservasi seluas 13.011 hektare, Hutan Lindung seluas 73.488 hektare, serta Hutan Produksi seluas 14.379 hektare. Selain itu, terdapat pula Hutan Rakyat di luar kawasan hutan negara (APL) dengan luas sekitar 17.075 hektare. Kabupaten Garut juga memiliki kawasan PIAPS seluas kurang lebih 70.000 hektare, yang menjadi wilayah prioritas percepatan akses perhutanan sosial.

Dari sisi tata guna lahan, sebagian besar wilayah Garut merupakan perbukitan dan pegunungan, khususnya di bagian selatan yang memiliki kemiringan curam dan risiko erosi tinggi. Di sejumlah kecamatan, terutama lokasi prioritas IAD (*Integrated Area Development*), ditemukan area dengan tingkat kerawanan lahan kritis yang perlu mendapatkan penanganan rehabilitasi.

Sebanyak 213 desa atau 50,59% dari total desa di Garut berbatasan langsung dengan kawasan hutan, dengan jumlah penduduk sekitar 71.925 jiwa yang hidup di sekitar kawasan tersebut. Hal ini menunjukkan besarnya ketergantungan masyarakat pada sumber daya kawasan hutan, serta pentingnya perhutanan sosial sebagai instrumen untuk pemerataan ekonomi dan keberlanjutan ekologi.

Kabupaten Garut memiliki 66 Kelompok Perhutanan Sosial yang terdiri dari 21 KPS dengan skema Hutan Desa, 22 KPS dengan skema Hutan Kemasyarakatan, dan 23 KPS dengan skema Kemitraan Kehutanan. Dari 66 KPS tersebut terdapat 93 KUPS, yang terdiri dari 5 KUPS dengan kelas Platinum (5,37%); 7 KUPS dengan kelas Emas (7,5%), 34 dengan kelas Silver (36,5%) dan 47 KUPS dengan kelas Blue (50,5%) (<https://gokups.hutsos.kehutan.go.id/public/chart/scheme> tanggal 4 Desember 2025). Sementara dari pengolahan peta PIAPS Kabupaten Garut diperoleh data KPS sebanyak 55 yang memiliki areal kelola dengan luas mencapai 14.204,15 hektar dengan melibatkan 7.943 kepala keluarga (BPS Bogor, 2025)

Tabel 8. Daftar Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) di Kabupaten Garut

No	Nama KPS	Alamat	Skema PS	Luas Lahan	Jumlah KK
1	Gapoktan Baru Bojong	Bungbulang, Bojong	HKm	548	554
2	Gapoktan Wangunjaya Hijau Lestari	Bungbulang, Wangunjaya	HKm	146	139
3	KPS Puncak Lestari	Garut Kota, Sukanegla	HKm	36	58
4	KT Girihurip	Banjarwangi, Padahurip	HKm	318	175
5	KT Makmur	Pasirwangi, Barusari	HKm	72	43
6	KTH Alam Lestari	Malangbong, Barudua	HKm	41	25
7	KTH Berkah Ilahi	Sucinaraja, Tenjonagara	HKm	25	30
8	KTH Bina Sejahtera	Pamulihan, Panawa	HKm	77.15	58
9	KTH Buana Mukti	Kadungora, Harumansari	HKm	73	115
10	KTH Giri Purnama Alam	Cikajang, Giriawas	HKm	133	145
11	KTH Griya Bukit Jaya	Cisurupan, Sirnajaya	HKm	35	33
12	KTH Kamodjan Fillage	Samarang, Sukakarya	HKm	25	21

No	Nama KPS	Alamat	Skema PS	Luas Lahan	Jumlah KK
13	KTH Karamatjaya	Cisurupan, Karamatwangi	HKm	166	232
14	KTH Karang Sewu	Cisewu, Cisewu	HKm	255	145
15	KTH Karya Mekar Lestari	Pasirwangi, Karyamekar	HKm	74	59
16	KTH Lingkungpasir	Cibiuk, Lingkungpasir	HKm	90	38
17	KTH Mekar Hurip	Pasirwangi, Padaawas	HKm	46	79
18	KTH Mekar Mukti	Cisompet, Sukamukti	HKm	193	136
19	KTH Motekar	Cisurupan, Sukawargi	HKm	102	123
20	KTH Mutiara Hitam Cikuray	Banjarwangi, Wangunjaya, Kedongdong	HKm	78	195
21	KTH Nangklak Jaya	Cisurupan, Sirnajaya	HKm	175	141
22	KTH Perempuan Kamojang Hejo	Samarang, Cisarua	HKm	96	0
23	KTH Relawan Dapur Areung	Pasir Wangi, Padaawas Dan Barusari	HKm	624	534
24	KTH Rimba Jaya	Cikajang, Margamulya	HKm	152	145
25	KTH Sabilulungan	Garut Kota, Kelurahan Margawati	HKm	28	15
26	KTH Sinar Mandalawangi	Kadungora, Mandalasari	HKm	31	21
27	KTH Tambak Baya	Leles, Dano	HKm	336	423
28	KTH Tenjolaut	Cisompet, Sukanagara	HKm	224	112
29	KTH Wanariksa	Cisurupan, Cisero	HKm	90	63
30	LD Gemah Ripah	Sukaresmi, Mekarjaya	HD	466	320
31	LD Mekarjaya Saluyu	Cikajang, Cikandang	HD	994	693
32	LD Wanajaya	Pakenjeng, Jayamekar	HD	893	185
33	LD Wanariksa	Pamulihan, Panawa	HD	659	288
34	LMDH Mandalagiri	Kadungora, Rancasalak	IPHPS	60	37
35	LMDH Mekar Harum	Leles, Lembang	Kulin KK	109	48
36	LMDH Pamulihan	Cisurupan, Pamulihan	IPHPS	29	25
37	LMDH Panyingkiran	Leles, Cipancar	Kulin KK	70	29
38	LMDH Wangun Lestari	Leles, Haruman	Kulin KK	39	34
39	LPHD Alam Lestari	Bungbulang, Mekarjaya	HD	28	42
40	LPHD Berkah Tani	Cilawu, Sukamurni	HD	856	17
41	LPHD Cihaurkuning Pananjung	Cisompet, Cihaurkuning	HD	416	183
42	LPHD Karya Muda	Cilawu, Sukamaju	HD	178	19
43	LPHD KP2M Mentari	Cilawu, Dayeuhmanggung	HD	89	45
44	LPHD Karamat Sejahtera	Bayongbong, Panembong	HD	159	356
45	LPHD Leuweung Dayeuh	Bungbulang, Bojong	HD	389	34
46	LPHD Mekar Mukti	Cihurip, Jayamukti	HD	225	59
47	LPHD Mekar Tani	Sucinaraja, Linggamukti	HD	93	48
48	LPHD Panyindangan Matandang	Cisompet, Panyindangan	HD	418	298
49	LPHD Pesona Lemah Cai	Sucinaraja, Cigadog	HD	110	178
50	LPHD Rindu Alam	Cihurip, Cisangkal	HD	163	107
51	LPHD Sanghyang Taraje	Pamulihan, Pakenjeng	HD	768	99
52	LPHD Sinar Mandiri	Bungbulang, Mekarbakti	HD	588	193
53	LPHD Sukatani Lestari	Cilawu, Sukatani	HD	139	15
54	LPHD Wangi Lestari 1	Cihurip, Mekarwangi	HD	990	566
55	LPHD Wangi Lestari 2	Cihurip, Mekarwangi	HD	987	168

Dari 55 KPS di Kabupaten Garut, 49 KPS di antaranya yang menjadi lokasi intervensi Program FPV dan menjadi target kegiatan *baseline* studi. Informasi lebih rinci tentang KPS-KPS tersebut dapat

dilihat pada Tabel 9 di bawah.

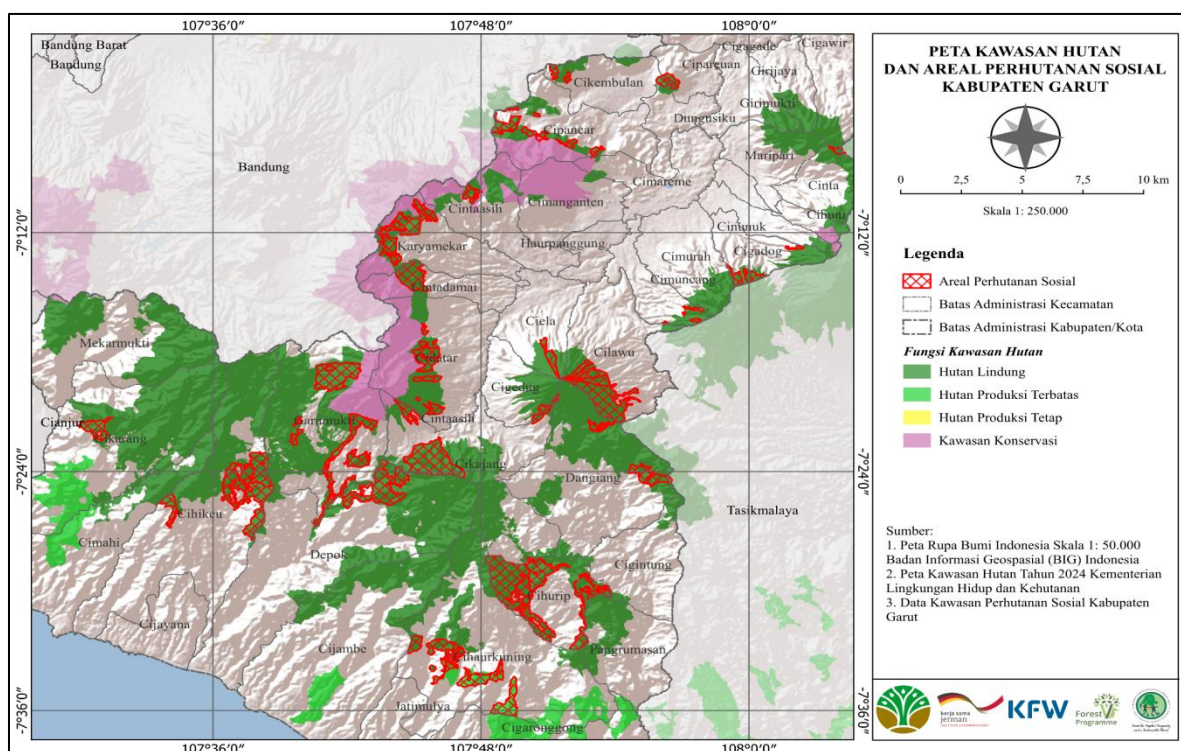
Tabel 9. Daftar KPS dampingan *Forest Programme V* di Kabupaten Garut

No	Kecamatan	Desa	Lembaga	Luas Lahan	Jumlah KK
1	Banjarwangi	Padahurip	KT Girihurip	318	175
2	Banjarwangi	Wangunjaya, Kedongdong	KTH Mutiara Hitam Cikuray	78	195
3	Bayongbong	Panembong	LPHD Karamat Sejahtera	159	356
4	Bungbulang	Bojong	Gapoktan Baru Bojong	548	554
5	Bungbulang	Wangunjaya	Gapoktan Wangunjaya Hijau Lestari	146	139
6	Bungbulang	Mekarjaya	LPHD Alam Lestari	28	42
7	Bungbulang	Bojong	LPHD Leuweung Dayeuh	389	34
8	Bungbulang	Mekarbakti	LPHD Sinar Mandiri	588	193
9	Cibiuk	Lingkungpasir	KTH Lingkungpasir	90	38
10	Cihurip	Jayamukti	LPHD Mekar Mukti	225	59
11	Cihurip	Cisangkal	LPHD Rindu Alam	163	107
12	Cihurip	Mekarwangi	LPHD Wangi Lestari 1	990	566
13	Cihurip	Mekarwangi	LPHD Wangi Lestari 2	987	168
14	Cikajang	Giriawas	KTH Giri Purnama Alam	133	145
15	Cikajang	Margamulya	KTH Rimba Jaya	152	145
16	Cikajang	Cikandang	LD Mekarjaya Saluyu	994	693
17	Cilawu	Sukamurni	LPHD Berkah Tani	856	17
18	Cilawu	Sukamaju	LPHD Karya Muda	178	19
19	Cilawu	Dayeuhmanggung	LPHD KP2M Mentari	89	45
20	Cilawu	Sukatani	LPHD Sukatani Lestari	139	15
21	Cisewu	Cisewu	KTH Karang Sewu	255	145
22	Cisompet	Sukamukti	KTH Mekar Mukti	193	136
23	Cisompet	Sukanagara	KTH Tenjolaut	224	112
24	Cisompet	Cihaurkuning	LPHD Cihaurkuning Pananjung	416	183
25	Cisompet	Panyindangan	LPHD Panyindangan Matandang	418	298
26	Cisurupan	Sirnajaya	KTH Griya Bukit Jaya	35	33
27	Cisurupan	Karamatwangi	KTH Karamatjaya	166	232
28	Cisurupan	Sukawargi	KTH Motekar	102	123
29	Cisurupan	Sirnajaya	KTH Nangklak Jaya	175	141
30	Cisurupan	Cisero	KTH Wanariksa	90	63
31	Garut Kota	Sukanegla	KPS Puncak Lestari	36	58
32	Garut Kota	Kelurahan Margawati	KTH Sabilulungan	28	15
33	Kadungora	Harumansari	KTH Buana Mukti	73	115
34	Kadungora	Mandalasari	KTH Sinar Mandalawangi	31	21
35	Leles	Dano	KTH Tambak Baya	336	423
36	Malangbong	Barudua	KTH Alam Lestari	41	25
37	Pakenjeng	Jayamekar	LD Wanajaya	893	185
38	Pamulihan	Panawa	KTH Bina Sejahtera	77.15	58
39	Pamulihan	Panawa	LD Wanariksa	659	288

No	Kecamatan	Desa	Lembaga	Luas Lahan	Jumlah KK
40	Pamulihan	Pakenjeng	LPHD Sanghyang Taraje	768	99
41	Pasir Wangi	Padaawas Dan Barusari	KTH Relawan Dapur Areung	624	534
42	Pasirwangi	Barusari	KT Makmur	72	43
43	Pasirwangi	Karyamekar	KTH Karya Mekar Lestari	74	59
44	Pasirwangi	Padaawas	KTH Mekar Hurip	46	79
45	Samarang	Sukakarya	KTH Kamodjan Fillage	25	21
46	Sucinaraja	Tenjonagara	KTH Berkah Ilahi	25	30
47	Sucinaraja	Linggamukti	LPHD Mekar Tani	93	48
48	Sucinaraja	Cigadog	LPHD Pesona Lemah Cai	110	178
49	Sukaesmi	Mekarjaya	LD Gemah Ripah	466	320

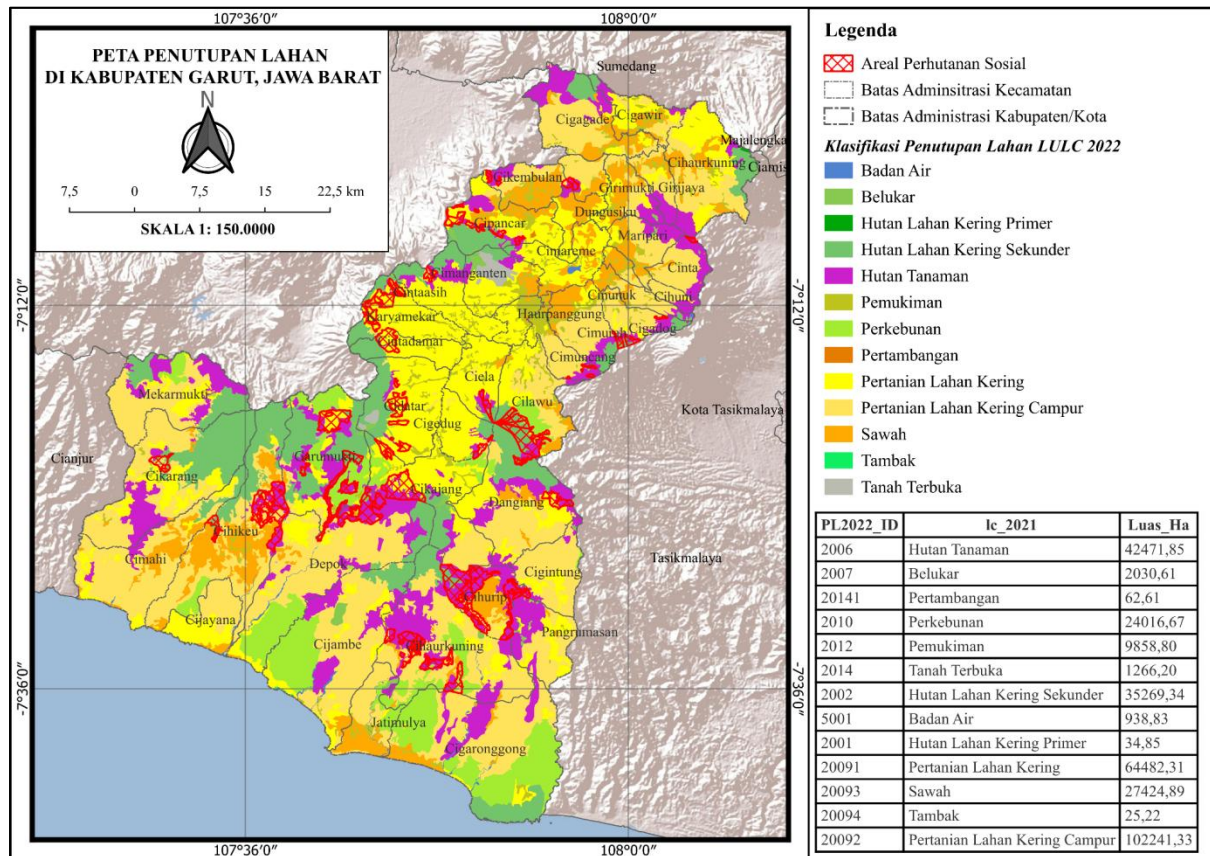
Secara umum, kawasan hutan yang dikelola masyarakat di Kabupaten Garut memiliki tutupan hutan yang masih relatif baik, terutama karena sebagian besar areal Perhutanan Sosial berada di Hutan Lindung dengan vegetasi rapat dan kontur curam. Berdasarkan peta dan observasi di beberapa blok PIAPS, kondisi biofisik menunjukkan bahwa hutan berada pada zona perbukitan dan pegunungan dengan kemiringan lereng yang tinggi, sehingga perubahan penggunaan lahan cenderung terbatas pada area yang lebih dekat pemukiman atau jalur akses.

Pengelolaan PS di Garut berkembang dari kebiasaan masyarakat mengelola agroforestri di kawasan hulu yang sudah berlangsung lama. Relasi kelembagaan lebih bertumpu pada Kelompok Tani Hutan (KTH), perangkat desa, dan kemitraan dengan Perhutani. Pada saat proses pengusulan PS dilakukan, skema yang dipilih mayoritas adalah HKm dan Kemitraan Kehutanan, sesuai dengan kondisi sosial dan kerangka regulasi pada saat itu.



Gambar 2. Peta fungsi kawasan hutan dan areal PS di Kabupaten Garut

Ciri umum pengelolaan area PS oleh masyarakat di Garut adalah adanya pembagian ruang pemanfaatan yang bersifat kesepakatan lokal, meskipun tidak formal seperti zonasi adat. Masyarakat biasanya membedakan area lindung lokal, yakni bagian hutan yang dianggap penting secara ekologis atau berada di lereng sangat curam dan tidak dibuka, dan area pemanfaatan untuk pengembangan kebun campuran. Pada area lindung lokal, pemanfaatan terbatas pada hasil hutan bukan kayu seperti aren, bambu, madu, atau tanaman obat. Sedangkan pada area pemanfaatan, masyarakat menerapkan pola agroforestri campuran yang telah menjadi praktik umum di wilayah hulu Garut.



Gambar 3. Peta penggunaan lahan dan tutupan hutan di Kabupaten Garut

Pola tanam agroforestri yang ditemukan meliputi pohon keras (manglid, suren, puspa, mahoni), tanaman buah dan MPTS (alpukat, kopi, kapulaga, aren, bambu), serta tanaman bawah seperti porang, jahe, kunyit, talas, dan hijauan pakan. Pola ini terbentuk secara organik sesuai kondisi iklim Garut yang lembab dan sejuk, sekaligus kebutuhan ekonomi rumah tangga yang mengandalkan kombinasi tanaman jangka pendek dan jangka panjang. Pada lokasi yang lebih dekat jalan desa, intensifikasi tanam lebih tinggi, sedangkan di lereng yang jauh dari akses, vegetasi cenderung lebih alami karena sulitnya perawatan dan transportasi.

Komoditas dominan yang dikelola KPS di Garut adalah kopi, kapulaga, padi, aren, kayu, dan alpukat. Komoditas ini berkembang karena sesuai dengan agroklimat serta permintaan pasar. Namun demikian, sebagian rangkaian nilai komoditas tersebut masih menghadapi masalah klasik: posisi tawar petani lemah terhadap pedagang pengumpul yang menentukan harga. Pada komoditas seperti kapulaga dan aren, skema pembelian di muka (ijon) atau “uang cepat” masih terjadi, mengurangi nilai ekonomi yang diterima masyarakat.

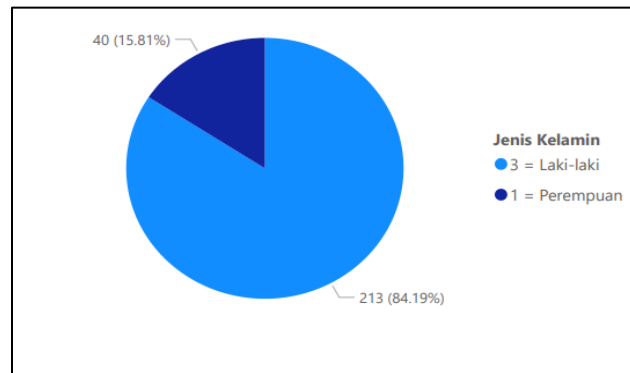
Tantangan yang paling banyak muncul dari kondisi biofisik Garut adalah keterbatasan aksesibilitas dan topografi curam. Jalur menuju lahan seringkali berupa setapak kecil dengan kemiringan $>30^\circ$, sehingga kegiatan penanaman, pemeliharaan, dan pengangkutan hasil panen harus dilakukan

secara manual dengan dipanggul. Kondisi ini membuat biaya tenaga kerja tinggi dan menjadi hambatan dalam meningkatkan produktivitas lahan PS. Sebagian besar petani PS juga memiliki lahan non-hutan yang terbatas, sehingga hutan menjadi sumber pendapatan utama rumah tangga, terutama melalui kopi, padi, kapulaga, dan aren.

3.1.2. Hasil Survei *Baseline* Sosial Ekonomi di Kabupaten Garut Jawa Barat

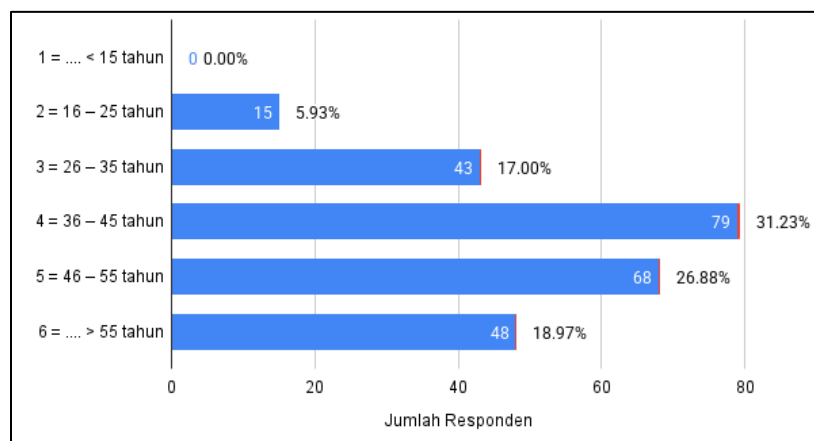
A. Identitas dan Rumah Tangga Responden

Sebanyak 253 responden (3.5%) dari 7.191 anggota KPS yang menjadi sampel untuk disurvei di Kabupaten Garut. Berdasarkan jenis kelamin, responden di Kabupaten Garut adalah 213 atau 84.19% laki-laki dan 40 atau 15.81% perempuan (Gambar 4). Selain itu, dari hasil responden 253. Jumlah anggota keluarga di kabupaten garut adalah sebanyak 1021. Maka hasil survei menunjukkan bahwa jumlah rata-rata anggota keluarga di kabupaten garut adalah 4 orang per keluarga.



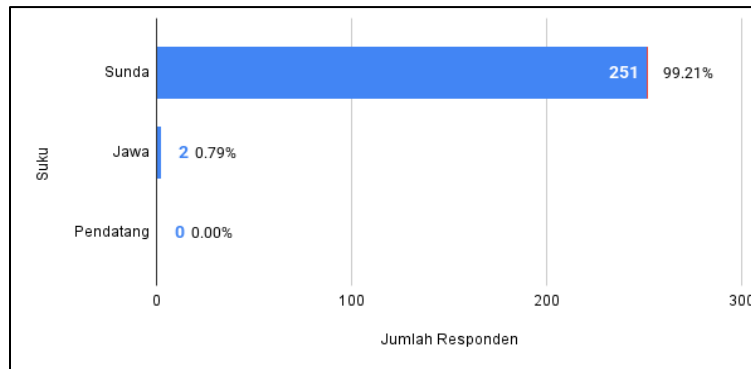
Gambar 4. Komposisi responden berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Garut

Berdasarkan usia, mayoritas responden adalah usia produktif yaitu antara 16-55 tahun dengan total 205 responden atau 81%, sedangkan yang telah berumur 55 tahun ke atas atau usia tidak produktif sebanyak 48 orang atau 19%. Responden di Kabupaten Garut berdasarkan umur dapat dilihat pada Gambar 5.



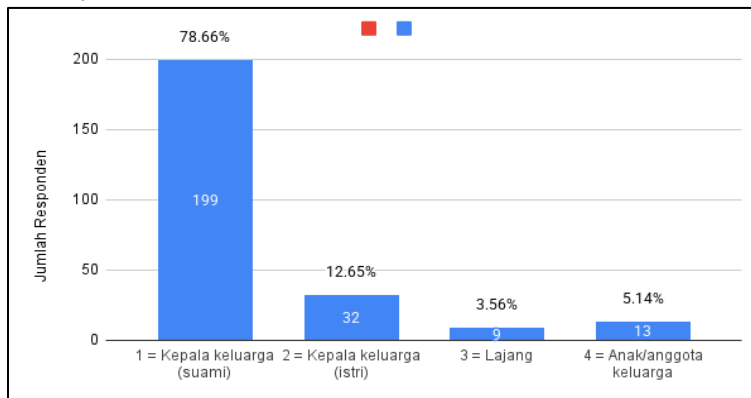
Gambar 5. Responden berdasarkan kelompok umur di Kabupaten Garut

Berdasarkan asal-usul responden, 99% merupakan penduduk bersuku Sunda dan 1% merupakan suku Jawa, namun 100% dianggap suku asli dan tidak ada pendatang. Bagi masyarakat Sunda di Garut, bahwa semua Suku Sunda dan Suku Jawa yang ada di areal yang disurvei sudah menetap lama dan adanya perkawinan campur sehingga tidak ada kategori asli dan pendatang. Konsep asli bagi kelompok Suku ini adalah Suku Sunda dan Suku non-Sunda jika telah melakukan pernikahan dengan Orang Sunda, maka sudah dianggap suku asli.



Gambar 6. Responden berdasarkan asal-usul Kabupaten Garut

Mayoritas posisi responden di Kabupaten Garut adalah sebagai suami yaitu sebanyak 199 orang (78,65%), sebagai istri sebanyak 32 orang (12,64%), dan sisanya berstatus lajang sebanyak 9 orang (3,55%). Selain itu, sebanyak 13 responden (5,13%) memiliki posisinya sebagai anak atau sebagai anggota keluarga, detailnya bisa dilihat dalam Gambar 7.



Gambar 7. Posisi responden dalam rumah tangga di Kabupaten Garut

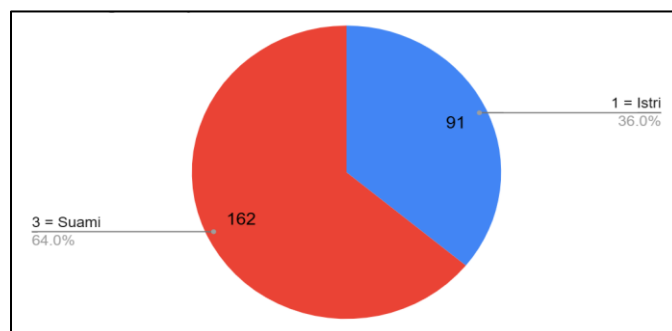
Posisi tersebut turut mempengaruhi pola pengelolaan lahan dan pengambilan keputusan dalam PS. Pembagian peran antara anggota keluarga pemegang persetujuan PS, baik dalam kegiatan pengelolaan lahan, panen, dan pasca panen dapat dilihat Tabel 10. Pembagian peran antara suami, istri dan anak lebih ditentukan pada pekerjaan yang berat seperti penyiapan lahan, pengolahan lahan hingga pemupukan. Sementara istri dan anak khususnya perempuan lebih kepada penanaman tanaman dan pengelolaan pasca panen.

Tabel 10. Pembagian tugas pengelolaan PS berdasarkan posisi dalam keluarga di Garut

Suami	Istri	Lajang	Anak/ Anggota Keluarga
Penebasan atau pembersihan lahan; pengolahan tanah; pemupukan tanaman; panen; pengemasan, penjualan; dan pemasaran	Penanaman; panen; pengelolaan pascapanen; pengolahan lahan ringan; pengemasan dan pemasaran	Penebasan; pembersihan lahan; pengolahan tanah; pemupukan tanaman; panen; pengelolaan pasca panen; penjualan	Melaksanakan berbagai tugas sesuai arahan orang tua, di mana sebagian besar kegiatan dilakukan untuk mendukung pekerjaan keluarga.

Pengambilan keputusan keuangan dalam keluarga anggota KPS di Kabupaten Garut lebih banyak ditentukan oleh suami, yakni sekitar 64%, sementara 36% diputuskan oleh istri (Gambar 8).

Pola ini mencerminkan struktur peran dan pembagian tugas dalam rumah tangga, di mana suami tetap memegang peranan dominan dalam pengelolaan keuangan rumah tangga.



Gambar 8. Pengambilan keputusan dalam pengelolaan keuangan keluarga responden Garut

Dari 253 responden total penguasaan lahan dalam areal KPS adalah 291,80 ha, sehingga rata-rata penguasaan lahan setiap responden/anggota KPS dalam areal PS di Garut adalah sebanyak **1,15 hektar** (Tabel 11). Dari Tabel 11 bisa dilihat rata-rata penguasaan lahan tertinggi seluas 10 Ha oleh 8 KPS yaitu, KTH Bina Sejahtera, KTH Karangsewu, LD Wanajaya, LD Wanariksa, LPHD Cihaur Kuning Pananjung, LPHD Karya Muda, LPHD KP2M Mentari, dan LPHD Sinar Mandiri dan diikuti dengan kedua tertinggi adalah LPHD Cihaur Kuning Pananjung seluas 2,5 ha. Sementara penguasaan lahan terendah adalah 0.275 Ha dari LPHD Alam lestari dengan kedua terkecil dari KTH Karamat Jaya seluas 1.655 Ha.

Perlu diberikan catatan, tidak semua areal Perhutanan Sosial dapat dikelola secara produktif, karena berbagai faktor, yaitu masih terdapat aset Perhutani, akses terbatas, dan lahan dalam kondisi kritis atau kering. Untuk itu perlu dilakukan penanganan, baik dari sisi kebijakan, infrastruktur pengadaan air, dukungan keterampilan tata kelola lahan, dan bantuan peralatan pertanian.

Tabel 11. Penguasaan lahan dalam areal PS oleh KPS di Kabupaten Garut

No.	Nama KPS	Jumlah Responden	Total penguasaan garapan dalam areal PS (ha)	Rata-rata Penguasaan garapan areal PS per Responden (ha)
1	Gapoktan HKm Baru Bojong	5	6.5	1.30
2	Gapoktan Wangunjaya Hijau L	5	4	0.80
3	KPS Puncak Lestari	5	6	1.20
4	KT Giri Hurip	5	4.9	0.98
5	KT Makmur	5	4.6	0.92
6	KTH Alam Lestari	5	6	1.20
7	KTH Berkah Ilahi	5	2.7	0.54
8	KTH Bina Sejahtera	5	10	2.00
9	KTH Buana Mukti	5	4	0.80
10	KTH Giri Purnama Alam	5	4.1	0.82
11	KTH Griya Bukit Jaya	8	2.654	0.33
12	KTH Kamodjan Fillage	4	2.38	0.60
13	KTH Karamat Jaya	7	1.655	0.24
14	KTH Karang Sewu	5	10	2.00

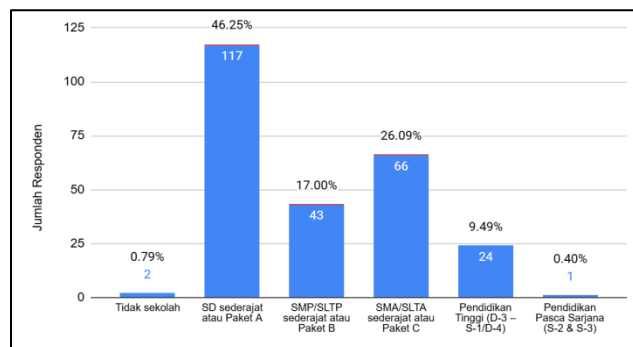
No.	Nama KPS	Jumlah Responden	Total penguasaan garapan dalam areal PS (ha)	Rata-rata Penguasaan garapan areal PS per Responden (ha)
15	KTH Karya Mekar Lestari	6	6.87	1.15
16	KTH Lingkungpasir	5	3.91	0.78
17	KTH Mekar Hurip	6	4.85	0.81
18	KTH Mekar Mukti	5	9	1.80
19	KTH Motekar	5	2	0.40
20	KTH Mutiara Hitam Cikuray	5	5	1.00
21	KTH Nangklak Jaya	6	5.3744	0.90
22	KTH Relawan Dapoer Areng	3	5.84	1.95
23	KTH Rimba Jaya	7	9.9	1.41
24	KTH Sabilulungan	5	2.26	0.45
25	KTH Sinar Mandalawangi	5	6.8	1.36
26	KTH Tambakbaya	5	8	1.60
27	KTH Tendjo Laut	5	9	1.80
28	KTH Wanariksa	5	6	1.20
29	LD Gemah Ripah	5-	6.5	1.30
30	LD Mekarjaya Saluyu	5	3.38	0.68
31	LD Wanajaya	5	10	2.00
32	LD Wanariksa	5	10	2.00
33	LPHD Alam Lestari	5	0.275	0.06
34	LPHD Berkah Tani	5	8	1.60
35	LPHD Cihaur Kuning Pananjung	5	10	2.00
36	LPHD Karamat Sejahtera	5	4.14	0.83
37	LPHD Karya Muda	5	10	2.00
38	LPHD KP2M Mentari	5	10	2.00
39	LPHD Leuweung Dayeuh	4	2.62	0.66
40	LPHD Mekar Mukti	5	9	1.80
41	LPHD Mekar Tani	5	4.64	0.93
42	LPHD Panyindangan Matandang	5	2.05	0.41
43	LPHD Pesona Lemah Cai	6	6	1.00
44	LPHD Rindu Alam	5	3.4	0.68
45	LPHD Sanghyang Taraje	5	3.5	0.70
46	LPHD Sinar Mandiri	6	10	1.67
47	LPHD Sukatani Lestari	5	8	1.60
48	LPHD Wangi Lestari 1	5	8	1.60

No.	Nama KPS	Jumlah Responden	Total penguasaan garapan dalam areal PS (ha)	Rata-rata Penguasaan garapan areal PS per Responden (ha)
49	LPHD Wangi Lestari 2	5	8	1.60
Grand Total		253	291.80	1.15

Sumber: Hasil survei teknis, 2025

B. Pendidikan

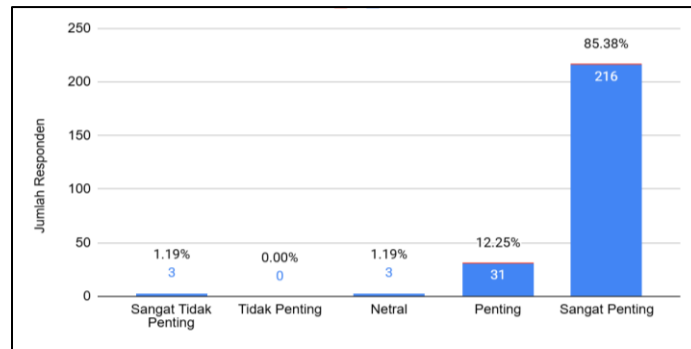
Untuk tingkat pendidikan, dari 253 responden tingkat pendidikan terbesar adalah SD sederajat atau Paket A sebanyak 117 orang (46.24%), kemudian SMA/SLTA sederajat atau Paket C sebanyak 66 orang (26,08%), kemudian SMP/SLTP sederajat atau Paket B sebanyak 43 orang (16,99%), selanjutnya Pendidikan Tinggi (D-3, S-1/D-4) sebanyak 24 orang (9,48%), diikuti dengan Tidak Sekolah sebanyak 2 orang (0.79%), dan yang terakhir Pendidikan Pasca Sarjana (S-2 & S-3) sebanyak 1 orang (0,39%). Tingkat pendidikan responden dapat dilihat pada Gambar 9.



Gambar 9. Tingkat pendidikan responden Kabupaten Garut

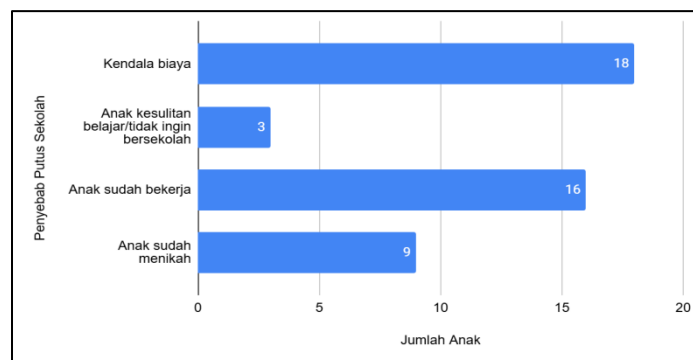
Berdasarkan hasil survei tersebut, bahwa mayoritas responden 46.24% berpendidikan rendah (SD) dan sekolah menengah sebesar 43.07%, maka diperlukan pendekatan peningkatan kapasitas yang lebih intensif. Modul dan pendekatan pelatihan yang akan dilakukan juga disesuaikan dengan pendidikan mayoritas anggota KPS yang memiliki pendidikan rendah dan menengah.

Bagi responden pendidikan anak merupakan hal yang penting. Pendidikan dianggap dapat membantu meningkatkan status sosial dan status ekonomi keluarga. Dari 253 responden terdapat 216 orang (85,37%) yang mempunyai persepsi pendidikan anak sangat penting, kemudian 31 orang (12,25%) mempunyai persepsi pendidikan anak penting, sebanyak 3 orang (1,185%) mempunyai persepsi anak sangat tidak penting, dan sebanyak 3 orang (1,185%) mempunyai persepsi netral. Detail persepsi responden terhadap pendidikan anak dapat dilihat pada Gambar 10.



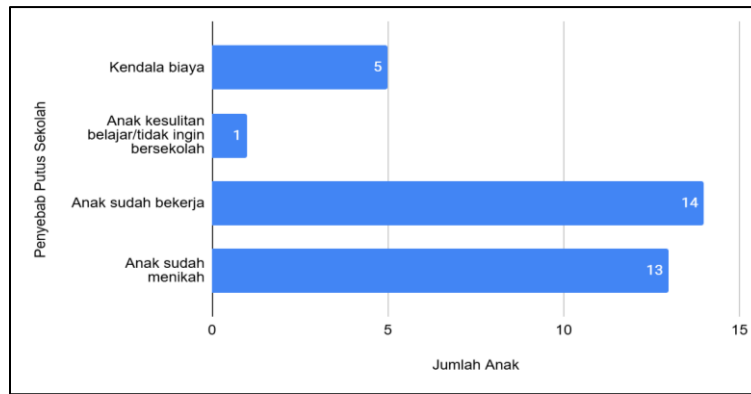
Gambar 10. Persepsi tentang pendidikan anak responden Kabupaten Garut

Dari 253 responden, terdapat 46 anak laki-laki yang putus sekolah. Alasan utamanya adalah kendala biaya (18 anak atau 39%), disusul anak yang berhenti karena sudah bekerja (16 anak atau 35%), dan anak menikah (9 anak atau 17%), serta kesulitan belajar atau tidak berminat melanjutkan sekolah (3 anak atau 6,5%). Temuan ini menunjukkan bahwa hambatan ekonomi menjadi faktor terbesar, menandakan pendapatan keluarga dari PS belum memadai untuk membiayai pendidikan anak hingga ke perguruan tinggi. Selain itu, keterbatasan transportasi dan tingginya kebutuhan sekolah turut mempengaruhi putus sekolah anak.



Gambar 11. Penyebab putus sekolah anak laki-laki Kabupaten Garut

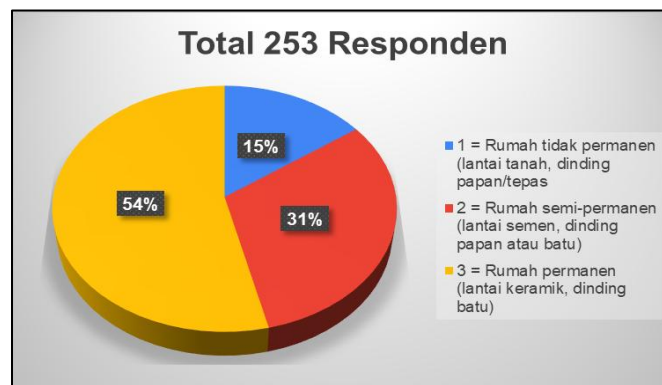
Dari 253 responden mereka menjawab bahwa ada 33 anak perempuan yang putus sekolah. Alasan terbesar adalah karena sudah bekerja (14 anak atau 42%), diikuti dengan karena menikah (13 anak atau 39%), kendala biaya (5 anak atau 15%), serta kesulitan belajar atau kurang minat bersekolah (1 anak atau 3%). Temuan ini menunjukkan bahwa pernikahan dini masih menjadi faktor signifikan dalam putus sekolah anak perempuan. Di banyak desa di Kabupaten Garut, dengan pola sosial tradisional atau transisi, orang tua kerap memandang pernikahan anak perempuan sebagai prioritas, sehingga pendidikan lanjutan kurang dianggap penting. Secara budaya, jika anak perempuan di atas 25 tahun belum menikah, maka orang tua khawatir anak perempuannya tidak laku (tidak ada yang meminang).



Gambar 12. Penyebab putus sekolah anak perempuan Kabupaten Garut

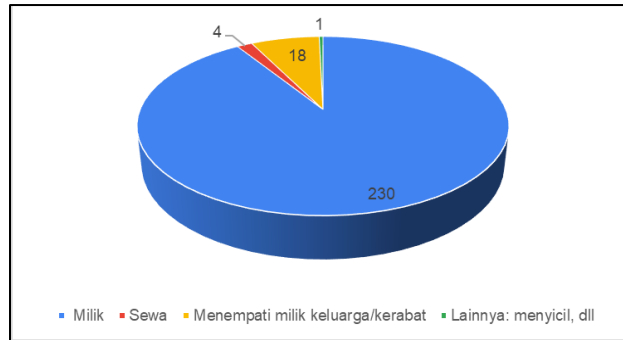
C. Kepemilikan Infrastruktur Dasar Responden

Untuk kondisi rumah, mayoritas responden (54%) tinggal di rumah permanen (rumah dinding batu dan lantai keramik). Sebanyak 31% memiliki rumah semi permanen (berlantai semen dengan dinding papan atau batu) dan 15% lainnya tinggal di rumah tidak permanen atau sederhana (rumah berdinding papan/bambu atau berlantai tanah). Mengacu pada standar rumah layak huni dari Kementerian PUPR, sebagian besar rumah di Garut termasuk kategori layak huni, sehingga mayoritas responden jika dilihat dari aspek kepemilikan rumah, bukan tergolong miskin.



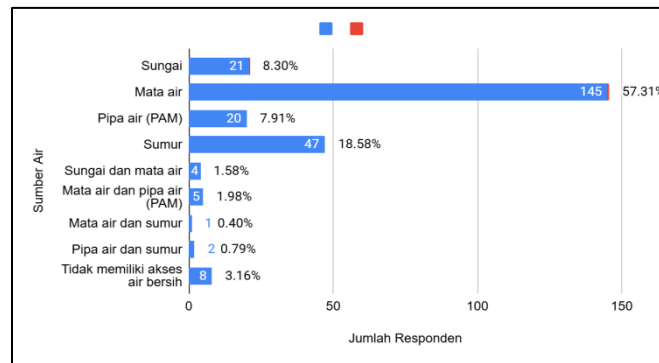
Gambar 13. Kondisi rumah responden di Kabupaten Garut

Sementara itu, dari sisi kepemilikan rumah, mayoritas responden yakni 90,9% (230 orang) menyatakan bahwa rumah yang ditempati adalah milik sendiri. Sebanyak 7,1% (18 responden) menempati rumah milik keluarga, dan sekitar 2% sisanya tinggal dengan status kontrak atau masih dalam proses mencicil. Kepemilikan rumah bagi responden di Kabupaten Garut dapat dilihat pada Gambar 14 di bawah.



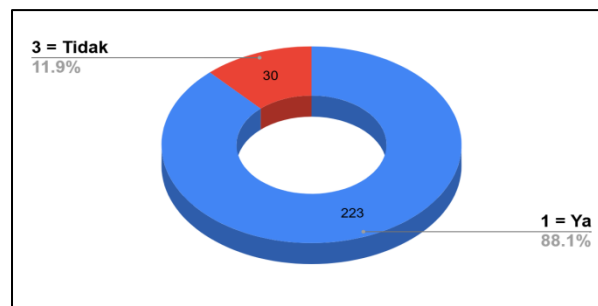
Gambar 14. Kepemilikan rumah responden di Kabupaten Garut

Sebagian besar (155 responden atau 60%) anggota KPS Garut mengakses air bersih dari mata air, disusul air sumur 50 responden (19,5%), sumber air/PAM 27 responden (10,5%), dan pemanfaatan air sungai 25 responden (9,7%). Ketersediaan mata air yang melimpah, ditambah masih dimanfaatkannya sungai sebagai sumber air bersih, menunjukkan bahwa kawasan PS memiliki kemampuan resapan yang baik serta tutupan lahan yang rapat, sehingga keberlanjutan sumber air alami tetap terjaga.



Gambar 15. Sumber air bersih bagi KPS di Kabupaten Garut

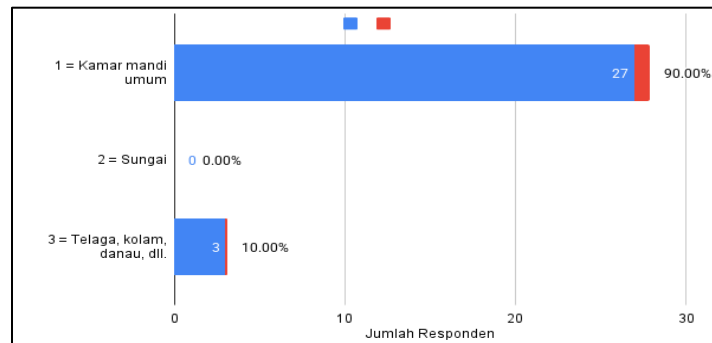
Berdasarkan Gambar 15, sebagian besar rumah tangga responden telah memiliki fasilitas MCK pribadi, yaitu sebanyak **223 responden (88,1%)**, sedangkan **30 responden (11,9%)** masih belum memiliki MCK. Temuan ini menunjukkan bahwa akses terhadap sanitasi dasar di kawasan PS relatif baik, namun masih terdapat sebagian kecil rumah tangga yang belum memiliki fasilitas sanitasi mandiri.



Gambar 16. Rumah tangga responden yang memiliki sarana MCK di Garut

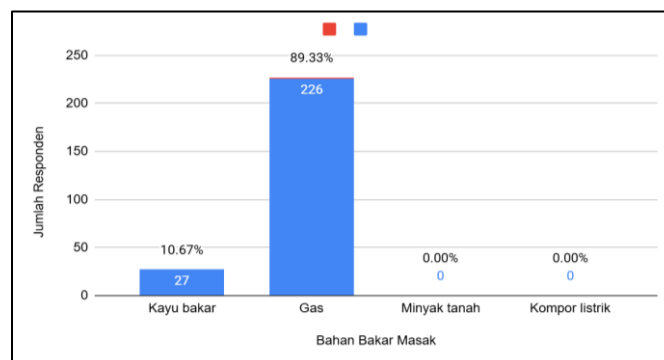
Berdasarkan Gambar 16 terlihat bahwa sebanyak 30 responden tidak memiliki sarana MCK di rumah dan mereka menggunakan akses MCK umum bukan MCK sungai. Dari 30 responden tersebut, 27 responden bergantung pada fasilitas mandi umum, dan 3 responden menggunakan telaga, kolam,

danau, atau sumber air terbuka lainnya. Temuan ini mengindikasikan perlunya upaya peningkatan akses MCK yang layak bagi 11% anggota KPS.

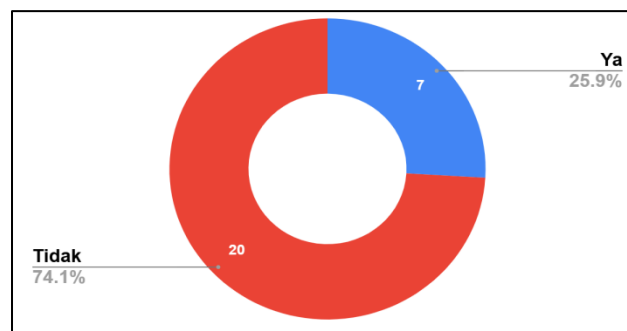


Gambar 17. Rumah tangga responden yang tidak memiliki sarana MCK sendiri di Garut

Sebagian besar keluarga responden menggunakan gas sebagai bahan bakar masak, yaitu 226 responden (89%), sementara 27 responden (11%) masih memakai kayu bakar. Dari pengguna kayu bakar tersebut, hanya 7 responden (25.9%) yang mengambilnya dari areal Perhutanan Sosial, sedangkan 20 responden (74.1%) mendapatkannya dari luar kawasan. Pola konsumsi energi ini menunjukkan pergeseran menuju sumber energi yang lebih modern, dan dengan rendahnya ketergantungan pada kayu bakar, sekitar 89% anggota KPS di Garut dapat dikategorikan telah keluar dari kemiskinan energi.

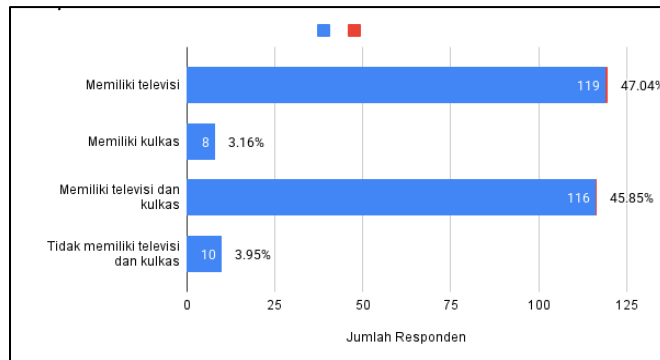


Gambar 18. Penggunaan bahan bakar memasak di Kabupaten Garut



Gambar 19. Pemanfaatan kayu bakar dari areal PS dan non-PS di Kabupaten Garut

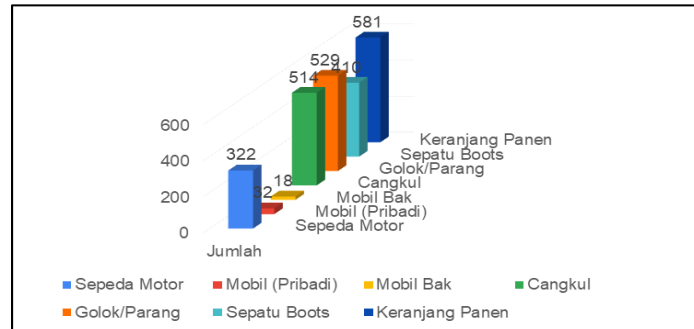
Untuk kepemilikan televisi dan kulkas, dari 253 responden, sebanyak 119 responden (47,04%) memiliki televisi, sebanyak 116 responden (45,85%) memiliki televisi dan kulkas, sebanyak 10 responden (3,95%) tidak memiliki televisi dan kulkas, dan sebanyak 8 responden (3,16%) hanya memiliki kulkas (Gambar 20).



Gambar 20. Kepemilikan televisi dan kulkas keluarga responden Garut

Seluruh responden atau anggota keluarga KPS telah memiliki akses listrik fasilitas dari PLN, sehingga kebutuhan dasar energi rumah tangga sudah terpenuhi. Akses ini juga memungkinkan kepemilikan berbagai peralatan elektronik seperti televisi, kulkas, dan perangkat lainnya yang mendukung aktivitas harian masyarakat.

Untuk mendukung kegiatan wanatani dan meningkatkan pendapatan rumah tangga di kawasan Perhutanan Sosial, anggota KPS memiliki beragam aset produktif yang digunakan dalam aktivitas harian. Aset transportasi meliputi 322 sepeda motor, 32 mobil pribadi, serta 18 mobil bak terbuka yang dimanfaatkan untuk mengangkut hasil produksi. Selain itu, tersedia pula berbagai peralatan kerja seperti 581 keranjang panen, 529 golok/parang, 514 cangkul, dan 410 pasang sepatu *boots*. Kepemilikan sarana transportasi dan peralatan produksi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden telah memiliki fasilitas dasar yang mendukung usaha tani dan pengelolaan lahan. Rincian lengkap aset produktif dapat dilihat pada Gambar 21 di bawah.



Gambar 21. Kepemilikan aset produksi bagi anggota KPS di Kabupaten Garut

Meskipun sebagian besar rumah tangga memiliki aset produksi dasar seperti alat kerja (golok, cangkul, sepatu *boot*, keranjang), namun alat produksi hasil PS belum dimiliki. Aset transportasi pengangkut hasil produksi juga masih terbatas seperti mobil bak terbuka. Saat ini alat pengangkutan produksi PS masih terbatas pada sepeda motor.

D. Profil Pendapatan Rumah Tangga KPS di Kabupaten Garut

Masyarakat anggota KPS di Kabupaten Garut pada umumnya menyambut positif pemberian/persetujuan PS. Sebelumnya, areal tersebut merupakan wilayah kerja Perhutani dengan skema PHBM/Kemitraan Kehutanan yang mewajibkan masyarakat berbagi hasil atau bahkan menyewa lahan. Setelah berubah menjadi KHDPK, skema HKm maupun HD memberikan hak penuh atas hasil tanaman tanpa kewajiban bagi hasil, sehingga manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

Di KTH Karamat Jaya, adanya legalitas PS meningkatkan rasa aman dalam mengelola lahan dan dapat meningkatkan pendapatan secara signifikan. Sebelum memperoleh legalitas PS, masyarakat

masih memiliki kekhawatiran dalam memanfaatkan lahan hutan sehingga kontribusi ekonomi dari kawasan tersebut belum dapat dioptimalkan. Persetujuan PS juga meningkatkan kepastian hak kelola dan mengurangi risiko konflik, diperkuat melalui sosialisasi dan pendampingan teknis yang mendorong intensifikasi penanaman komoditas unggulan seperti kopi. Setelah adanya legalitas PS, mereka tidak khawatir dalam pemanfaatan areal PS, mereka juga bersemangat bergiat menanam kopi dalam areal PS. Giat penanaman kopi karena kenaikan harga kopi dari Rp4.000/kg menjadi Rp14.000–15.000/kg, sehingga masyarakat secara mandiri menanam kopi tanpa perlu dorongan eksternal.

Bagi masyarakat, areal PS menjadi sumber pangan, air, energi dan pendapatan utama. Sumber pangan berupa padi, komoditas buah-buahan, kacang-kacangan, umbi-umbian, dan sayuran. Sumber energi seperti kayu bakar, sumber air seperti mata air yang disuplai dari areal PS, dan sumber pendapatan seperti dari hasil penjualan kopi, nangka, dan alpukat. Pendapatan keluarga umumnya berasal dari dua sumber: pendapatan tahunan dari kopi dan alpukat, serta pendapatan bulanan dari hortikultura seperti kentang, labu siam, wortel, kol, sawi, cabai, dan tomat. Pola ini juga terlihat di LD Wanariksa, LD Relawan Dapur Areung, dan LD Griya Bukit Jaya mereka bisa memproduksi semua komoditi di atas.

E. Sumber Pendapatan Rumah Tangga Anggota KPS

Sumber-sumber pendapatan rumah tangga KPS di Kabupaten Garut terdiri dari 2 kategori, yaitu:

1. Sumber pendapatan dari areal Perhutanan Sosial, terdiri dari:
 - a. Komoditas atau hasil tanaman yang dikonsumsi sendiri, yang dapat dihitung berdasarkan banyaknya jumlah panen dikalikan harga;
 - b. Komoditas atau hasil tanaman yang dijual baik di tingkat tapak, desa kecamatan, kabupaten, antar provinsi, serta ekspor ke luar negeri.

Adapun *baseline* pendapatan rumah tangga anggota KPS di Kabupaten Garut berdasarkan sumber dari areal Perhutanan Sosial adalah **Rp 6,674,733.12/tahun** atau **Rp 556,227.76 per bulan**. Detail pendapatan anggota KPS dari areal PS di Kabupaten Garut dapat dilihat pada **Tabel 12**.

2. Sumber pendapatan dari luar areal Perhutanan Sosial
Pendapatan anggota KPS di Kabupaten Garut yang berasal dari luar areal Perhutanan Sosial adalah sebesar Rp4,400,520,000.00/tahun atau Rp1,449,446.64
3. Sehingga dari ***baseline* pendapatan rumah tangga KPS di Kabupaten Garut adalah 2,005,674,40/KK/bulan atau Rp501.419/kapita/bulan.**

Dari Tabel 12 terlihat bahwa setelah memperhitungkan biaya produksi, pendapatan bersih rumah tangga KPS yang berasal dari areal Perhutanan Sosial hanya mencapai **28%**, sementara **72%** sisanya berasal dari sumber pendapatan di luar kawasan PS. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun Perhutanan Sosial dimanfaatkan untuk konsumsi sendiri dan penjualan komoditas, kontribusi ekonominya masih relatif kecil terhadap total pendapatan rumah tangga, terutama karena tingginya biaya produksi yang mengurangi pendapatan bersih.

Tabel 12. Pendapatan anggota KPS dari areal PS dan non-PS di Garut

No	Jenis Pendapatan	Total Pendapatan/tahun (Rp)	Rata-rata pendapatan/KK/Tahun (Rp)	Rata-rata pendapatan/KK/bulan (Rp)	Persentase (%)
1	Pendapatan dari konsumsi sendiri	923,865,480.00	3,651,642	304,303.50	
2	Pendapatan dari komoditas dijual	3,742,792,000.00	14,793,644	1,232,803.67	
Total Sumber pendapatan dari		4,666,657,480.00	18,445,286	1,537,107.17	

No	Jenis Pendapatan	Total Pendapatan/tahun (Rp)	Rata-rata pendapatan/KK/Tahun (Rp)	Rata-rata pendapatan/KK/bulan (Rp)	Persentase (%)
PS					
Biaya Produksi PS		2,977,950,000.00	11,770,553	980,879.42	
Pendapatan bersih dari PS		1,688,707,480.00	6,674,733.12	556,227.76	28%
3	Pendapatan Lain	4,400,520,000.00	17,393,359.68	1,449,446.64	72%
Grand Total		6,089,227,480.00	24,068,092,80	2,005,674,40	100%

Walaupun komposisi pendapatan anggota KPS dari areal PS lebih kecil, namun komoditas yang dihasilkan dari lahan PS tetap memiliki nilai penting bagi rumah tangga dan sumber ketahanan pangan. Hasil panen juga membantu mengurangi beban pengeluaran melalui konsumsi sendiri, sehingga cadangan pangan selalu tersedia di areal PS. Pola tanam yang tidak monokultur meliputi tanaman pangan, hortikultura, buah-buahan, rempah, serta komoditas tahunan seperti kopi dan alpukat menjadikan areal PS sebagai sumber komoditas yang beragam. Dengan peningkatan tata kelola dan efisiensi budidaya, Perhutanan Sosial berpotensi memberikan kontribusi pendapatan yang lebih kuat dan berkelanjutan bagi anggota KPS kedepannya.

A. Komoditas yang Dikonsumsi Sendiri Dari Areal PS

Rumah tangga responden mengkonsumsi sembilan jenis komoditas Perhutanan Sosial, meliputi sayuran, sumber protein (ikan, hewan buruan, ternak), madu, padi, umbi-umbian, rempah-rempah, buah-buahan, tanaman obat, serta tanaman tahunan seperti kopi, aren, dan kelapa. Total jumlah nilai yang dikonsumsi dari areal PS oleh seluruh responden adalah Rp 923,865,480 per tahun. Adapun jenis komoditas PS yang dikonsumsi bisa dilihat di Tabel 13.

Dari temuan ini dapat disimpulkan bahwa areal PS menjadi salah satu sumber pangan utama bagi rumah tangga responden. Keragaman komoditas dari kebutuhan pokok seperti padi, sayuran, protein, dan umbi-umbian hingga kebutuhan pelengkap seperti rempah, buah, dan tanaman obat mencerminkan praktik polikultur yang mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus mengurangi pengeluaran rumah tangga. Jenis-jenis komoditas yang dikonsumsi sendiri dapat dilihat pada Tabel 13. Untuk komoditi sayuran tidak bisa detail dirinci karena responden menjawab sayur secara umum.

Tabel 13. Jenis-jenis komoditas PS yang dikonsumsi sendiri di Garut

Komoditas	Total komoditas yang dikonsumsi per bulan (kg)	Total komoditas yang dikonsumsi per tahun (kg)
Sayuran (daun singkong)	1,515.50	18,186.00
Protein (ikan, ternak ayam, hasil buruan)	203.00	2,436.00
Padi	1,175.00	14,100.00
Umbi-umbian (ubi, singkong)	810.00	9,720.00
Rempah-rempah	193.00	2,316.00
Buah-buahan (alpukat, nangka)	618.68	7,424.16
Tanaman obat	29.70	356.40
Tanaman tahunan (kopi)	1,226.90	14,722.80

Komoditas	Total komoditas yang dikonsumsi per bulan (kg)	Total komoditas yang dikonsumsi per tahun (kg)
Lainnya	4,525.00	54,300.00
Total	10,296.78	123,561.36

B. Pendapatan yang Berasal dari Komoditi PS yang Dijual

Pendapatan anggota KPS dari Jenis kategori komoditas yang dijual berupa : HHBK (Aren, Kopi, Buah-buahan, Lainnya), Jasa Lingkungan (Wisata alam, pemandu, dagang, dan lainnya), Pemanfaatan Kawasan dan HHK (Sengon, Kayu Afrika, dan lainnya yang sebelumnya sudah ditanam). Total pendapatan komoditas dijual dari areal PS Rp 3,742,792,000 per tahun dan Rp 311,899,333.33 per bulan. Sementara warga produksi cukup besar yaitu Rp 2,977,950,000, sehingga pendapatan yang berasal dari komoditas PS yang dijual Rp 140,725,623.33/bulan. Dapat dilihat di Tabel 14

Tabel 14. Pendapatan anggota KPS yang berasal dari komoditas PS yang dijual di Garut

Jenis Kategori	Jenis Komoditas	Total Pendapatan/tahun	Total Pendapatan/bulan
HHK	Sengon	25,500,000.00	2,125,000.00
	Kayu Afrika	38,500,000.00	3,208,333.33
	Lainnya	10,500,000.00	875,000.00
HHBK	Aren	9,200,000.00	766,666.67
	Kopi	1,427,200,000.00	118,933,333.33
	Buah - buahan	78,102,000.00	6,508,500.00
	Lainnya	178,960,000.00	14,913,333.33
Jasa Lingkungan	Wisata alam (pemandu, penyedia akomodasi, dagangan)	72,000,000.00	6,000,000.00
	Lainnya	23,200,000.00	1,933,333.33
Pemanfaatan Kawasan	Makanan pokok	50,970,000.00	4,247,500.00
	Umbi-umbian	859,060,000.00	71,588,333.33
	Sayuran	870,530,000.00	72,544,166.67
	Ternak	50,800,000.00	4,233,333.33
	Lainnya	48,270,000.00	4,022,500.00
Total pendapatan kotor		3,742,792,000.00	311,899,333.33
Biaya produksi		2,977,950,000.00	248,162,500.00
Pendapatan komoditas PS yang dijual		1,688,707,480.00	140,725,623.33

C. Pendapatan Lain dari Luar Areal PS

Dilihat dari sumber pendapatan, anggota KPS di Kabupaten Garut tidak hanya mengandalkan areal Perhutanan Sosial, tetapi juga memperoleh penghasilan dari luar PS. Terdapat 11 jenis sumber pendapatan non-PS (lihat Tabel 15), namun masih mayoritas dengan sumber pendapatan dari kegiatan pertanian. Walaupun sumber pendapatan berasal dari berbagai jenis kegiatan, namun sumber mata pencaharian utama dari pertanian.

Secara rinci, pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan petani sebesar 34% (58 responden), diikuti pegawai swasta 14,7% (25 responden), dan pedagang 14,2% (24 responden). Delapan jenis pekerjaan lainnya, seperti buruh, guru, wirausaha, pekerja bangunan, perangkat desa, ASN, pekerja rumah tangga, hingga tenaga kerja luar negeri memberikan kontribusi lebih kecil dibandingkan tiga kategori utama tersebut (Tabel 15)

Total pendapatan lain-lain di luar PS mencapai Rp4.400.520.000/KK/tahun dari 169 responden yang memiliki sumber pendapatan tambahan. Atau rerata dari anggota KPS Rp1,449,446,64/bulan. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun pendapatan dari areal non-PS cukup signifikan, namun dukungan pendapatan dari areal PS menjadikan anggota masyarakat PS di Garut menjadi kategori tidak miskin.

Tabel 15. Sumber pendapatan rumah tangga responden yang berasal dari luar PS di Garut

No	Pekerjaan Utama responden	Jumlah RT disurvei	Jumlah Pendapatan berd Jenis (Rp/bulan)	Jumlah penghasilan dari setiap jenis pekerjaan (Rp/tahun)	Rata-rata penghasilan dari setiap jenis pekerjaan (Rp/bulan)
1	Petani	58	104,900,000.00	1,258,800,000.00	2,185,416.67
2	Pedagang	24	66,250,000.00	795,000,000.00	2,760,416.67
3	Guru	12	34,100,000.00	409,200,000.00	3,100,000.00
4	Pekerja bangunan	11	18,100,000.00	217,200,000.00	1,645,454.55
5	Aparatur Sipil Negara (ASN)	3	19,400,000.00	232,800,000.00	6,466,666.67
6	Pegawai swasta	25	58,200,000.00	698,400,000.00	2,425,000.00
7	Wirausaha	12	18,900,000.00	226,800,000.00	1,575,000.00
8	Buruh	13	19,560,000.00	234,720,000.00	1,778,181.82
9	Pegawai Desa	9	15,800,000.00	189,600,000.00	1,975,000.00
10	ART	1	1,500,000.00	18,000,000.00	1,500,000.00
11	TKI di Arab Saudi	1	10,000,000.00	120,000,000.00	10,000,000.00
Responden memiliki pekerjaan diluar PS		169	366,710,000.00	4,400,520,000.00	3,219,194.22
Total Responden		253	366,710,000.00	4,400,520,000.00	1,449,446,64

F. Pasca Panen dan Pemasaran

Pada umumnya hasil produk yang dijual dari PS di Kabupaten Garut berupa bahan mentah dan sebagian setengah jadi, terutama komoditas hortikultura seperti kentang, kol, sawi, wortel, cabai, serta komoditas MPTS seperti kopi, alpukat, pisang, dan nangka. Pola penjualan dalam bentuk mentah ini terjadi karena masyarakat membutuhkan pendapatan cepat, keterbatasan alat pascapanen, serta belum berkembangnya unit usaha kolektif sehingga hasil panen langsung dijual setelah dipetik.

Pemasaran produk PS relatif mudah karena adanya pengepul desa dan pedagang keliling yang rutin masuk kampung, sehingga masyarakat cenderung menjual hasil panennya di desa tempat mereka

tinggal. Sebagian petani menjual produk ke pasar kecamatan atau kabupaten, namun jumlahnya jauh lebih sedikit dan biasanya hanya untuk komoditas bernilai tinggi atau volume panen yang besar, seperti kopi, cabai, atau hortikultura.

Belum terdapat kelompok yang mengeksport produk secara langsung, dan akses ke pasar luar daerah maupun industri pengolahan, tetapi ada yang sudah ekspor melalui perantara seperti perusahaan pembeli bahan mentah ataupun setengah jadi. Komoditas yang dijual ke pembeli besar biasanya memiliki harga lebih baik dibandingkan penjualan ke pengepul desa. Namun, jarak, keterbatasan transportasi, dan kebutuhan harian membuat masyarakat tetap menjual di tingkat lokal meski terdapat selisih harga sekitar Rp1.000–2.000 per kilogram.

Jika akses jalan, fasilitas pascapanen, dan pasar diperkuat, maka harga komoditas tersebut berpotensi meningkat sehingga memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat. Informasi terkait jenis komoditi, olahan pasca panen, dan pemasaran dapat dilihat pada Tabel 16.

Tabel 16. Pengolahan dan pemasaran hasil PS pasca panen Kabupaten Garut

No	Komoditi	Bahan Mentah	Setengah Jadi	Bahan Jadi	Pengumpul	Pedagang Keliling	Pembeli Besar	Desa	Kecamatan/ Kabupaten	Nasional	Luar Negeri
1	Kopi	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓
2	Kentang	✓			✓	✓		✓	✓	✓	
3	Kol	✓			✓	✓		✓			
4	Sawi	✓			✓	✓		✓			
5	Wortel	✓			✓	✓		✓			
6	Cabai	✓			✓	✓		✓	✓	✓	
7	Pisang	✓	✓		✓	✓		✓	✓		
8	Nangka	✓			✓	✓		✓	✓		
9	Alpukat	✓			✓	✓		✓	✓		
10	Rempah	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	

G. Analisis Mata Pencarian

Di Kabupaten Garut, kebutuhan konsumsi rumah tangga KPS sebagian besar dipenuhi dari areal PS, terutama : Sayuran, Padi, umbi-umbian, dan buah-buahan serta protein dari ternak/buruan. Nilai konsumsi ini mencapai **Rp 923,8 juta/tahun**, menunjukkan peran PS sebagai penyangga ketahanan pangan keluarga cukup kuat. Berikut ini fungsi-fungsi ekonomi areal PS:

- Sumber pangan, di mana masyarakat memperoleh kebutuhan pangan seperti sayuran, buah-buahan, umbi-umbian, serta protein dari ternak dan hasil buruan/ikan sungai dari areal PS. Areal PS menjadi bagian penting pemenuhan kebutuhan gizi rumah tangga KPS.
- Sumber air, karena sebagian besar rumah tangga KPS di Garut bergantung pada mata air yang berasal dari kawasan hutan lindung sebagai sumber air minum dan kebutuhan sehari-hari. Dari 253 responden, 155 keluarga menggunakan mata air sebagai sumber utama air bersih, menunjukkan pentingnya tutupan hutan PS dalam menjaga ketersediaan air bagi masyarakat sekitar. Namun beberapa KPS di wilayah lereng curam tetap menghadapi keterbatasan akses air karena jarak dan kondisi topografi.
- Sumber papan/rumah, di mana kawasan PS menyediakan bahan bangunan seperti kayu manglit dan material tanaman tahunan yang digunakan masyarakat untuk kebutuhan rumah, peralatan

kerja, dan infrastruktur sederhana di kebun. Pemanfaatan material ini mengurangi beban biaya rumah tangga dan menjadi bagian dari aset penghidupan yang berasal langsung dari PS.

- Penyeimbang iklim mikro, karena sebagian besar areal PS di Garut berada di hutan lindung dengan vegetasi rapat dan kontur curam. Keberadaan tutupan hutan ini menjaga kelembaban, menurunkan suhu lokal, mengurangi erosi, serta menjaga kestabilan tanah dan air merupakan faktor penting bagi keberlanjutan pertanian dan agroforestri yang menjadi sumber nafkah utama masyarakat KPS.

Sementara itu, pendapatan dari penjualan hasil PS terutama HHBK dan pemanfaatan kawasan mencapai **Rp3,74 miliar/tahun**, namun pendapatan masih belum optimal karena sebagian besar komoditas dijual dalam bentuk mentah. Jika komoditas sudah dalam bentuk setengah jadi atau jadi, maka nilai produk akan meningkat. Selain itu, pengorganisasian koperasi belum berjalan baik sehingga harga-harga ditentukan pengepul. Kondisi tersebut sejalan dengan temuan Sulastri & Kurniawan (2020), bahwa petani kopi Garut hanya menerima sekitar **Rp15.000/kg**, jauh di bawah harga pedagang **Rp21.000/kg**, memperlihatkan rendahnya harga dan dominasi perantara dalam menentukan nilai jual. Temuan ini selaras dengan studi Ramadhan dkk. (2023), yang menunjukkan bahwa pendapatan tahunan petani kopi Arabika di Garut hanya sekitar **Rp21,8 juta**, menegaskan terbatasnya margin keuntungan di tingkat petani. Berdasarkan jenis penghasilan, maka pendapatan anggota KPS dari areal PS masih **28%** dan **72%** masih tergantung dari pendapatan luar PS. Namun demikian, dengan adanya persetujuan PS, maka pendapatan PS seluruhnya milik masyarakat sehingga pendapatan rata-rata anggota KPS menjadikan mereka “tidak kategori miskin”. Oleh karena itu, pengolahan kualitas pascapanen, penguatan kelembagaan pemasaran, serta konsolidasi penjualan menjadi langkah kunci untuk meningkatkan nilai tambah komoditas PS dan pendapatan anggota rumah tangga KPS.

Berdasarkan data BPS Garut 2024, bahwa garis kemiskinan per kapita di Kabupaten Garut sebesar Rp 393.464 per bulan. Sementara berdasarkan survei rata-rata anggota rumah tangga KPS Garut adalah 4 orang, maka batas garis kemiskinan per rumah tangga penduduk Garut adalah Rp 1.573.856 per bulan. Jika dibandingkan dengan pendapatan responden berdasarkan survei ini sebesar Rp 2.005.674S per bulan atau Rp501.419/kapita/bulan, maka pendapatan anggota keluarga masih memiliki selisih di atas 400 ribu per bulan. Sehingga rata-rata pendapatan anggota keluarga KPS pada 49 KPS yang menjadi subjek studi di Kabupaten Garut terkategori “tidak miskin”. Hasil survei ini juga mengindikasikan bahwa pengelolaan areal PS berkontribusi penting dalam mengurangi kemiskinan masyarakat di sekitar kawasan hutan di Kabupaten Garut.

H. Nilai Transaksi Ekonomi KPS di Kabupaten Garut

Kabupaten Garut memiliki karakter ekonomi yang sangat bergantung pada sektor pertanian dan agroforestri, sehingga kegiatan PS menjadi salah satu sumber penghidupan utama bagi rumah tangga KPS. Secara bruto, PS memberikan nilai ekonomi yang besar melalui pendapatan dari areal PS, namun tingginya biaya produksi dan belum efisiennya pengelolaan menyebabkan kontribusi pendapatan bersih terlihat rendah. Dalam konteks ini, Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) menjadi indikator penting untuk menunjukkan besarnya potensi ekonomi PS. Dengan kondisi biofisik Garut yang didominasi kawasan perbukitan dan tradisi kuat pada budidaya hortikultura dan kopi, NTE merepresentasikan bagaimana PS tetap menjadi penopang penghidupan masyarakat, meskipun efisiensi usaha masih perlu ditingkatkan. Rincian kontribusi dari masing-masing KTH disajikan pada tabel berikut. Data NTE ini diperoleh melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) yang dilaksanakan di 2 KPS : KTH Karamat Jaya, Desa Karamatwangi, Kecamatan Cisurupan dan LD Wanasari, Desa Cikandang Kecamatan Cikajang. Jumlah keseluruhan NTE yang terekam pada rangkaian FGD di Kabupaten Garut adalah sebesar **Rp 32,340,200,000 /tahun** atau **Rp16,170,100,000/KTH/tahun**. Untuk detail NTE pada kedua KPS tersebut bisa dilihat dari Tabel 17.

Tabel 17. Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) KTH di Kabupaten Garut

Kecamatan	Nama KPS	Komoditas	Nilai Transaksi Ekonomi (Rp)
Cisurupan	KTH Karamat Jaya	Kopi (Jerman)	6,000,000,000
		Sawi	2,400,000,000
		Tomat	9,600,000,000
		Labu Siam	360,000,000
		Cabe	150,000,000
		Wortel	7,200,000,000
		Alpukat	35,000,000
		Nangka	45,000,000
		Kentang	900,000,000
	Total		26,690,000,000
Cikajang	LD Wanariksa	Kopi	3,600,000,000
		Kentang	1,125,000,000
		Wortel	400,000,000
		Kol	25,200,000
		Cabai	500,000,000
	Total		5,650,200,000
Grand Total NTE			32,340,200,000
Rata rata NTE			16,170,100,000

NTE di KTH Karamat Jaya tercatat lebih besar karena kelompok ini telah menerapkan pengelolaan lahan yang relatif lebih optimal dan memiliki komoditas unggulan dengan volume produksi yang stabil. Sementara itu, LD Wanariksa SK persetujuan PS-nya terbit 2024 jadi masih berada pada tahap awal, belum ada rencana pengelolaan dan pengembangan usaha. Tanaman kopi di LD Wanariksa masih tanaman kopi sejak kerjasama dengan Perhutani. LD Wanariksa juga tidak/belum mempunyai pendamping. Sehingga pemanfaatan areal perhutanan sosial dilakukan belum optimal, yang berdampak pada NTE yang lebih rendah.

Selain pendapatan dari penjualan dan konsumsi, masyarakat juga menerima manfaat lain dari PS yang tidak terhitung sebagai pendapatan. Manfaat-manfaat tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Sumber kayu bakar. Sekitar 10,67% dari responden yang masih menggunakan kayu bakar untuk memasak memperoleh kayu bakar dari areal PS.

2. Pakan ternak. Masyarakat di Kecamatan Dagangan memanfaatkan areal PS untuk pakan ternak hewan kambing dan sapi.
3. Areal PS juga memberikan manfaat dalam menyediakan dan menjaga sumber air bersih untuk masyarakat. Sebanyak 245 dari 253, atau sekitar 96,84% responden survei Kabupaten Garut menyebutkan mata air ataupun sumur sebagai sumber air bersih mereka

I. Analisis Indeks Desa Mandiri pada Areal PS di Lokasi FPV

Studi ini juga melakukan perbandingan antara desa yang terdapat KPS dan KUPS dengan angka IDM (Indeks Desa Membangun), dengan fokus pada desa yang mempunyai produk komoditi unggulan, telah diolah menjadi produk setengah jadi, produk jadi, serta bahan jadi. Dari 49 KPS dan KUPS maka didapatkan desa-desa yang mempunyai produk komoditi unggulan, yaitu Desa Karamatwangi dan Sirnajaya dengan produk kopi, yang telah diolah bahkan di ekspor ke Jerman dan Amerika.

Didalam Indeks Desa Membangun (IDM) terdapat 5 status desa, (<https://idm.kemendesa.go.id/view/detil/1/tentang-idm>), yaitu:

1. Desa Sangat Tertinggal (nilai IDM < 0,491).
2. Desa Tertinggal (nilai IDM > 0,491 dan < 0,599).
3. Desa Berkembang (nilai IDM > 0,599 dan < 0,707).
4. Desa Maju (nilai IDM > 0,707 dan < 0,815).
5. Desa Mandiri (nilai IDM > 0,815).

Untuk melakukan penilaian terhadap status desa didasarkan pada 3 komponen (<https://idm.kemendesa.go.id/view/detil/1/tentang-idm>), yaitu:

i. Dimensi Ketahanan Sosial

Dimensi ini mencakup aspek kesehatan, pendidikan, modal sosial, dan pemukiman. Beberapa indikator yang diukur antara lain akses terhadap fasilitas kesehatan, angka partisipasi sekolah, solidaritas sosial, serta kualitas perumahan dan lingkungan.

ii. Dimensi Ketahanan Ekonomi

Dimensi ekonomi meliputi keragaman produksi masyarakat desa, perdagangan, akses kredit dan lembaga ekonomi, serta keterbukaan wilayah. Indikator yang digunakan misalnya keragaman komoditas unggulan, keberadaan pasar desa, akses ke lembaga keuangan, serta ketersediaan jalan dan transportasi.

iii. Dimensi Ketahanan Ekologi/Lingkungan

Dimensi ini berfokus pada kualitas lingkungan, potensi rawan bencana, dan tanggap bencana. Beberapa indikator yang diukur yaitu kualitas air, udara, dan lahan, potensi bencana alam, mitigasi bencana, serta kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

Dari data IDM dari Kementerian Desa Karamatwangi dan Desa Sirnajaya berada pada status **Mandiri dan Maju**. Untuk rinciannya bisa dilihat pada Tabel 18.

Tabel 18. Status IDM Desa dengan produk unggulan KPS di Kab. Garut

Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Status IDM	Nama KPS	Produk Unggulan
Jawa Barat	Garut	Cisurupan	Karamatwangi	Mandiri	KTH Karamat Jaya	Kopi
Jawa Barat	Garut	Cisurupan	Sirnajaya	Maju	KTH Griya Bukit Jaya	Kopi

Dari data di atas dapat dibangun analisis bahwa terdapat kaitan positif keberadaan KPS dan KUPS dengan status IDM. Dengan penilaian status IDM berdasarkan 3 komponen, yaitu dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan selaras dengan tujuan PS yaitu untuk penurunan kemiskinan, peningkatan

ekonomi, dan perbaikan lingkungan, maka status 2 desa (Mandiri dan Maju dan) tersebut didukung oleh keberadaan KPS dan KUPS, meskipun perlu dilakukan pengukuran lebih detail dan mendalam untuk hal ini.

Dari analisis terhadap data di atas, kemudian dilakukan juga wawancara mendalam, maka di Kabupaten Garut terdapat KPS *role model*, yang dapat menjadi contoh maupun inspirasi untuk tata kelola KPS dan KUPS yang baik. Dapat dirangkum beberapa pembelajaran untuk menggambarkan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan KPS ini, untuk detailnya lihat Tabel 19.

Tabel 19. KPS *role model* dan faktor-faktor tata kelola yang mempengaruhi di Garut

Nama KPS	Tata Kelola Kelembagaan	Tata Kelola Kawasan	Tata Kelola Usaha
KTH Karamat Jaya (komoditi kopi)	Memiliki RKPS dan KUPS, Pengurus dan Anggota aktif, Ketua KPS aktif bersama anggota mengelola lahan PS, Ketua aktif dalam pemberdayaan SDM, serta aktif menggalang dukungan dari berbagai pihak dan mencari pasar komoditi baik nasional maupun ekspor.	Seluruh kawasan ditanami kopi sesuai kondisi iklim dan ketinggian. Kondisi tanah sesuai dengan jenis kopi. Jenis bibit sesuai dengan kondisi tanah. Petani juga mengembangkan pembibitan kopi secara mandiri.	Pengolahan kopi secara campuran (tradisional dan modern). Memiliki mitra usaha. Pencatatan produksi, dan penjualan dilakukan dengan baik.
KTH Griya Bukit Jaya (komoditi kopi)	Memiliki RKPS dan KUPS, dengan Pengurus serta Anggota yang aktif. Ketua KPS dan KUPS turut menggalang dukungan dari berbagai pihak serta aktif mencari pasar bagi produk komoditi.	Petani mengembangkan pembibitan kopi secara mandiri. Seluruh kawasan ditanami kopi sesuai kondisi iklim dan ketinggian. Pengelolaan areal dilakukan dengan pembagian peran yang jelas. Kondisi tanah sesuai untuk budidaya kopi dan dikelola secara konsisten.	Memiliki mitra usaha untuk ekspor (Olam, Sundahejo, Starbucks). Pengolahan kopi secara campuran (tradisional dan modern) dan kopi HS kering dilakukan secara tradisional (dikeringkan menggunakan matahari). Pencatatan produksi, dan penjualan dilakukan dengan baik



Gambar 22. *Local champion* Garut, Ibu Hendah (Ketua KTH Griya Bukit Jaya) bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni

J. Analisis SWOT KPS Kabupaten Garut

Untuk mendapatkan dan memberikan strategi peningkatan pendapatan bagi petani KPS di Kabupaten Garut, maka diperlukan analisis kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman atau dikenal dengan istilah *Strengths, Weakness, Opportunities, and Threats* (SWOT) sebagai berikut (Tabel 20):

Tabel 20. Analisis SWOT KPS Kabupaten Garut

Eksternal Internal	OPPORTUNITIES 1. Perpres 28 tahun 2023 tentang percepatan pengelolaan PS yang melibatkan 12 Kementerian dan Lembaga terkait ada peluang peningkatan keterampilan dalam budidaya, pengolahan produk dan pasar 2. Permen LHK No 4 tahun 2023 tentang KHDPK yang memberikan pengakuan legal terhadap petani untuk akses kawasan hutan. 3. Ada peluang pasar domestik dan internasional 4. Pasar digital tersedia (Tiktok, Shopee, Tokopedia, dll) 5. IAD Garut telah ditandatangani oleh Bupati Garut, dan sedang menyusun Rencana Aksi.	THREATS 1. Topografi curam dan akses jalan buruk meningkatkan biaya produksi dan mempersulit pengangkutan hasil panen. 2. Risiko longsor, erosi, dan kekeringan musiman pada wilayah perbukitan Garut bagian selatan. 3. Ketergantungan pada pengepul membuat harga petani rendah sehingga nilai tidak sebanding dengan harga pasar. 4. Ancaman hama dan penyakit pada kopi, tanaman MPTS, serta hortikultura. 5. Potensi kebakaran di musim kemarau dan degradasi lahan pada zona rawan kritis. 6. Ketergantungan pendapatan rumah tangga pada pekerjaan luar PS yang fluktuatif.
STRENGTHS 1. Kawasan PS Garut memiliki tutupan hutan relatif baik, terutama di Hutan Lindung (73.488 ha) yang menjadi sumber air dan stabilitas ekologis masyarakat. 2. Masyarakat memiliki pengalaman panjang dalam agroforestri hulu serta pengetahuan lokal dalam mengelola kebun campuran. 3. KPS/KUPS telah terbentuk di seluruh wilayah intervensi (49 KPS FPV) dengan komoditas unggulan kopi, kapulaga, aren, bambu, alpukat, dan padi.	STRATEGI S-O 1. Meningkatkan produktivitas kopi, kapulaga, aren, dan MPTS dengan bibit unggul serta pola agroforestri <i>multi-layer</i>. 2. Memperluas areal garapan agroforestri produktif di PIAPS ±70.000 ha untuk meningkatkan pendapatan jangka pendek-menengah-panjang. 3. Mengembangkan produk bernilai tambah (kopi olahan, gula aren premium, kapulaga kering <i>grade</i> ekspor, keripik hortikultura). 4. Memanfaatkan pasar digital dan jejaring pemasaran lintas desa/kabupaten untuk	STRATEGI S-T 1. Menanami areal rawan kritis dengan kombinasi tanaman cepat tumbuh, MPTS, dan tahunan untuk menahan erosi dan menjaga air. 2. Mendorong pembangunan akses jalan produksi yang mendukung pengangkutan hasil panen dari lereng curam. 3. Melindungi dan memperkuat sumber air (mata air, embung, pipa gravitasi) untuk mengurangi risiko kekeringan. 4. Mengembangkan sistem pengendalian hama terpadu (IPM) untuk kopi, kapulaga, padi, dan hortikultura.

4. Pola agroforestri campuran sudah mapan dan sesuai iklim (buah–MPTS–pohon keras–tanaman bawah). 5. PS menyediakan manfaat <i>non-monetary</i>: sumber air (155 keluarga bergantung mata air), sumber pangan, material rumah, dan penyeimbang iklim mikro. 6. Legalitas PS memperkuat kepastian akses lahan bagi masyarakat di 213 desa yang berbatasan hutan.	memperkuat posisi tawar KUPS. 5. Memanfaatkan kelembagaan KPS/KUPS yang sudah kuat untuk mempercepat implementasi program melalui IAD Garut sebagai payung koordinasi lintas dinas. 6. Mengoptimalkan legalitas PS dan IAD untuk membuka akses pembiayaan serta dukungan OPD dalam pengembangan komoditas unggulan.	
WEAKNESS 1. Biaya yang dikeluarkan untuk mengelola lahan PS masih sangat besar sehingga menunjukkan pengelolaan yang tidak efisien. 2. Pemasaran didominasi pengepul; komoditas dijual mentah → nilai tambah rendah dan petani tidak menikmati margin pasar. 3. Akses jalan produksi sangat terbatas; banyak areal hanya dapat dijangkau dengan jalan setapak terjal. 4. Tata kelola kelembagaan (administrasi, SOP, rencana usaha, pencatatan produksi) masih belum kuat. 5. Belum adanya zonasi formal dalam banyak areal PS sehingga perencanaan areal usaha–lindung tidak jelas. 6. Keterampilan pascapanen terbatas (kopi, aren, kapulaga) sehingga mutu produk tidak konsisten.	STRATEGI W–O 1. Meretas sistem pengepul/ijon melalui pembentukan koperasi pemasaran dan konsolidasi produk di tingkat KUPS. 2. Pelatihan tata kelola usaha, administrasi, dan rencana bisnis untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan KPS. 3. Pengembangan pasar baru melalui kemitraan dengan <i>roaster</i> lokal, UMKM, <i>marketplace</i>, dan pembeli regional. 4. Peningkatan keterampilan pascapanen (grading, roasting, packing kedap udara, fermentasi aren) untuk meningkatkan harga jual. 5. Meningkatkan efisiensi biaya produksi melalui pelatihan budidaya hemat <i>input</i> dan pemanfaatan bantuan alat/bibit dari program lintas kementerian. 6. Menggunakan IAD Garut untuk memperkuat tata kelola KPS/KUPS (administrasi, SOP, rencana usaha). 7. Mengintegrasikan perbaikan	STRATEGI W–T 1. Mengaktifkan pengetahuan lokal dan kerja kolektif untuk menjaga area rawan kebakaran dan longsor. 2. Membangun akses transportasi bersama pemerintah daerah untuk mengatasi isolasi lahan dan biaya panen tinggi. 3. Meningkatkan keterampilan budidaya dan sistem irigasi sederhana (tetes/pipa gravitasi) untuk menghadapi musim ekstrem. 4. Pengurangan ketergantungan pada pengepul dengan sistem kontrak pemasaran langsung KUPS–pembeli besar. 5. Mengurangi beban biaya produksi melalui kerja kolektif (sharing alat & tenaga) untuk menghadapi ancaman topografi curam, biaya angkut tinggi, dan ketergantungan pada pengepul.

7. Ketergantungan pada “uang cepat” (<i>early selling</i>) menyebabkan petani cenderung menjual panen sebelum nilai optimal.	akses jalan produksi dan pemasaran dalam Rencana Aksi IAD untuk mengurangi ketergantungan pada pengepul.	
--	--	--

Berdasarkan analisis SWOT di atas, maka strategi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga dan mendukung peningkatan tutupan hutan dengan kekuatan dan kesempatan yang dimiliki KPS—yang sejalan dengan pengelolaan hutan berkelanjutan—adalah:

- Untuk meningkatkan pendapatan yang dikonsumsi sendiri, maka diperlukan beberapa strategi yaitu meningkatkan pendapatan dari *cash/short crops* dengan cara memberikan bibit unggul untuk jenis tanaman pangan unggulan seperti sayuran, talas, jahe, dan kunyit. Pendekatan diversifikasi tanaman jangka pendek ini sesuai rekomendasi *livelihood framework* (Chambers & Conway, 1992) serta praktik agroforestri dataran tinggi Jawa Barat (Michon & de Foresta, 1999). Selain itu peningkatan keterampilan budidaya termasuk sistem tetes air dan pengendalian hama sangat penting, terutama pada topografi curam Garut (Suryanto, 2015).
- Untuk menambah pendapatan dalam jangka menengah, maka memperkaya tanaman *cash crop* dan penanaman *long term crops* dengan menanam minimal 100 batang ditambah tanaman *middle crop* seperti alpukat, pisang, atau kapulaga yang telah terbukti adaptif dan bernilai tinggi di Garut (Awang dkk., 2014). Selain itu, memperluas wilayah garapan karena masih tersedia areal PS yang dapat dikembangkan menjadi kombinasi *cash crop–middle crop–long term crop*. Penanaman disarankan mengikuti musim hujan serta menggunakan pipa gravitasi dan sistem tetes untuk meningkatkan keberhasilan (Suryanto, 2015).
- Untuk meningkatkan produktivitas komoditas yang akan dijual ke pasar diperlukan keterampilan pengolahan produk, pembukaan akses pasar dan peningkatan mutu pascapanen. Pengolahan pascapanen untuk pasar *offline* dan digital sangat diperlukan untuk meningkatkan nilai tambah produk seperti kopi, aren, kapulaga, dan bambu. Hal ini sejalan dengan studi rantai nilai hasil hutan bukan kayu yang menunjukkan bahwa sebagian besar nilai ekonomi berada pada segmen pengolahan dan pemasaran (Belcher dkk., 2005). Penyediaan bibit unggul untuk komoditas primadona seperti kopi Arabika juga diperlukan mengingat potensi harga kopi Garut meningkat signifikan apabila mutu terjaga (Sulastris & Kurniawan, 2020).
- Untuk peningkatan pendapatan petani KPS secara keseluruhan, sangat diperlukan akses transportasi dari kebun ke pemukiman, mengingat banyaknya lokasi KPS berada di lereng-lereng curam. Hal ini sangat berpengaruh terhadap harga jual yang diterima petani (Ramadhan dkk., 2023). Perlu juga meretas sistem pengepul dan ijon dengan menciptakan pasar kecamatan, kabupaten, dan provinsi, serta penguatan digital marketing. Studi pemasaran menunjukkan bahwa petani memperoleh nilai lebih tinggi apabila mereka mengakses pasar langsung (Fatmawati, 2019). Jika strategi ini berjalan, KUPS di Garut sangat berpotensi naik kelas.
- Pengurus KPS dan pendamping PS dapat mengoptimalkan peluang kolaborasi lintas kementerian sesuai Perpres 28/2023. Studi FAO (2018) menegaskan bahwa dukungan *multi-stakeholder* adalah faktor kunci keberhasilan organisasi petani hutan di negara berkembang. Selain itu, anggaran desa yang kini dapat mendukung PS memberikan peluang besar untuk perbaikan kelembagaan dan usaha.
- Memanfaatkan kelembagaan KPS/KUPS yang sudah terbentuk untuk mempercepat implementasi IAD Garut, karena dokumen IAD menjadi dasar koordinasi lintas dinas.

Penguatan ini sejalan dengan praktik *landscape governance* yang menekankan pentingnya konsolidasi kelembagaan untuk percepatan program di tingkat tapak.

- Mengoptimalkan legalitas PS dan dukungan IAD untuk membuka akses pembiayaan dan program lintas OPD, sehingga pengembangan komoditas unggulan dapat dilakukan lebih terstruktur. Banyak studi pengelolaan hutan berbasis masyarakat menegaskan bahwa legalitas dan dukungan pemerintah daerah mempercepat peningkatan produktivitas dan investasi lokal.

Strategi untuk mencegah ancaman melalui Kekuatan KPS (S–T)

1. Menanami areal terbuka dengan *middle crop* dan *long-term crop* seperti kopi, alpukat, aren, dan bambu untuk menjaga tanah, menahan erosi, dan memperkuat cadangan air (Michon & de Foresta, 1999).
2. Membuka akses transportasi produksi sehingga hasil panen dapat keluar lebih cepat dan petani memperoleh harga lebih baik (Ramadhan dkk., 2023).
3. Membangun embung, penampungan air kecil, atau pipa gravitasi untuk mengurangi risiko kekeringan musiman yang umum terjadi di lereng Garut (Suryanto, 2015).
4. Memelihara mata air dengan mempertahankan tutupan hutan dan tanaman tahunan, sesuai pendekatan konservasi sumber air dalam sistem hutan rakyat Jawa (Awang dkk., 2014).

Strategi untuk mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang (W–O)

1. Meningkatkan efisiensi biaya produksi melalui pelatihan budidaya hemat input, seperti pemupukan berimbang, teknik pemangkasan, dan pengendalian hama terpadu, dengan memanfaatkan dukungan lintas kementerian sesuai Perpres 28/2023. Efisiensi input dan teknik budidaya terbukti menurunkan biaya dan meningkatkan produktivitas pada sistem agroforestri dataran tinggi (Suryanto, 2015; Chambers & Conway, 1992).
2. Memanfaatkan peluang bantuan alat produksi dan bibit unggul untuk menurunkan biaya produksi pada komoditas bernilai ekonomi seperti kopi, alpukat, kapulaga, dan hortikultura, hal ini sekaligus memperbaiki pendapatan petani (Awang dkk., 2014; Belcher dkk, 2005).
3. Mengembangkan akses pasar bernilai tambah, baik melalui kemitraan dengan *roaster* lokal, UMKM, pembeli regional, maupun pemanfaatan pasar digital (Tokopedia, Shopee, TikTok), untuk mengurangi ketergantungan pada pengepul dan meningkatkan margin. Akses pasar langsung terbukti meningkatkan nilai tambah produk dan memperbaiki posisi tawar petani (Fatmawati, 2019; Sulastri & Kurniawan, 2020).
4. Memperkuat kelembagaan KPS/KUPS melalui pelatihan administrasi, SOP, dan perencanaan usaha, dengan memanfaatkan peluang pendampingan dari pemerintah dan mitra. Kelembagaan kelompok tani hutan yang kuat berpengaruh langsung terhadap efisiensi usaha dan keberlanjutan organisasi (FAO, 2018; Siscawati, 2017).
5. Mendorong pengolahan produk pascapanen sederhana (*grading*, *drying*, fermentasi, pengemasan) untuk meningkatkan nilai tambah komoditas yang selama ini dijual mentah. Nilai ekonomi terbesar dalam rantai nilai HHBK berada pada tahap pengolahan dan pemasaran, bukan pada penjualan bahan mentah (Belcher dkk., 2005).
6. Menggunakan IAD Garut sebagai platform memperkuat tata kelola KPS/KUPS (administrasi, SOP, pencatatan produksi). Pendekatan ini efektif karena IAD melibatkan berbagai perangkat daerah yang dapat membantu perbaikan kelembagaan secara langsung.
7. Mengintegrasikan kebutuhan akses jalan produksi dan pemasaran ke dalam Rencana Aksi IAD untuk mengurangi ketergantungan pada pengepul. Model ini sejalan dengan pendekatan pembangunan rantai pasok lokal, di mana intervensi infrastruktur dan pemasaran yang didukung pemerintah daerah terbukti menurunkan biaya produksi dan meningkatkan posisi tawar petani.

Strategi untuk meminimalkan potensi bahaya pada sektor kelemahan–ancaman (W–T)

1. Menggunakan pengetahuan lokal untuk melindungi dan menanami bersama areal rawan kebakaran dan erosi dengan tanaman jangka menengah dan panjang, sebuah pendekatan yang umum dalam manajemen kolaboratif hutan di Indonesia (Siscawati, 2017).
2. Membuka akses jalan produksi bersama pemerintah daerah untuk menurunkan biaya angkut dan mengurangi ketergantungan pada pengepul (Fatmawati, 2019).
3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengendalian hama untuk kopi, kapulaga, dan komoditas lainnya yang sering terdampak gangguan produksi (Sulastri & Kurniawan, 2020).
4. Meningkatkan keterampilan budidaya adaptif seperti sistem tetes air, konservasi tanah, dan teknik tanam lereng (Suryanto, 2015).
5. Efisiensi biaya melalui kerja kolektif penting dilakukan untuk menghadapi ancaman topografi curam dan biaya angkut tinggi, sejalan dengan praktik manajemen kolektif pada agroforestri pegunungan (Michon & de Foresta, 1999; Siscawati, 2017).

K. Persepsi Masyarakat terkait Perhutanan Sosial

Hasil wawancara dengan informan dan analisis jawaban responden menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Garut memandang PS membawa perubahan besar dalam kehidupan mereka. Sebelum memperoleh persetujuan PS, banyak anggota kelompok menggarap lahan tanpa kepastian, merasa serba dibatasi, dan khawatir dianggap melanggar karena tidak memiliki status legal atas lahan.

Setelah terbitnya SK Perhutanan Sosial, persepsi tersebut berubah signifikan. Masyarakat merasakan kepastian hak kelola dan perlindungan hukum sehingga dapat bekerja di lahan dengan lebih tenang dan percaya diri. Bagi sebagian responden, PS bahkan membuka peluang baru karena mereka yang sebelumnya tidak memiliki lahan kini memperoleh hak kelola untuk menanam kopi, hortikultura, dan komoditas bernilai ekonomi lainnya.

Walaupun implementasi PS berdasarkan Permen LHK 4/2023 masih memerlukan sosialisasi dan arahan teknis, terutama terkait zonasi dan penguatan kelembagaan, persepsi umum masyarakat menunjukkan bahwa PS memberikan rasa aman, membuka peluang usaha, serta meningkatkan motivasi untuk mengelola lahan secara lebih produktif dan berkelanjutan.



Gambar 23. Wawancara dengan Pak Jajang Ketua KTH Karamat Jaya, 15 November 2025

Masyarakat memahami bahwa PS mengharuskan mereka mematuhi sejumlah aturan, termasuk penataan kelola kawasan sesuai ketentuan KHDPK dan keberadaan aset Perhutani di beberapa lokasi. Walaupun proses penataan ini belum sepenuhnya selesai, para responden meyakini bahwa melalui pendampingan dan arahan kebijakan, berbagai isu tersebut dapat diselesaikan secara bertahap.

Secara keseluruhan, persepsi masyarakat Garut terhadap PS dapat diringkas sebagai berikut:

- PS dipandang sebagai program pemerintah yang memberikan akses legal bagi masyarakat untuk mengelola lahan secara produktif.
- PS memberi pengetahuan dan pedoman agar pengelolaan dilakukan seimbang antara peningkatan pendapatan dan keberlanjutan hutan.
- PS menghadirkan rasa aman karena adanya kepastian hak kelola.
- Melalui PS dan kelembagaan kelompok, masyarakat terlibat dalam upaya rehabilitasi dan perbaikan kawasan hutan.
- Meski baru mendapat persetujuan, masyarakat senang karena dapat kembali menanam sesuai mata pencaharian mereka sebagai petani.
- PS memperkenalkan pentingnya berorganisasi, membentuk KUPS, dan membuka akses terhadap berbagai bentuk dukungan pemerintah.



Gambar 24. Aktivitas penanaman di Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut.

Dalam studi ini masyarakat juga diminta untuk menyampaikan persepsi mereka terhadap Perhutanan Sosial ketika mereka sebelum maupun sesudah mendapatkan persetujuan. Uraian persepsi mereka dapat dilihat pada Tabel 21.

Tabel 21. Persepsi masyarakat terhadap PS berdasarkan tematik sebelum dan sesudah persetujuan di Kabupaten Garut

Tema	Sebelum Persetujuan	Sesudah Persetujuan
Tata Kelola Kawasan/Lahan	Merasa tidak mempunyai hak, karena kawasan hutan dikelola oleh Perhutani serta mereka takut dipolisikan	Merasa memiliki hak, karena mempunyai SK dari Kementerian
	Tidak memahami ada fungsi-fungsi hutan, dan batas-batasnya	Mengetahui ada tata batas kawasan hutan, dan fungsi hutan untuk lindung
	Belum ada perencanaan pengelolaan lahan, semua tanaman pertanian	Mereka membuat perencanaan dan menanam tanaman tegakkan dan juga tanaman agroforestri dan menggunakan pola tanam “tumpang sari” di areal PS
	Tidak ada beda antara tanaman masyarakat dengan aset Perhutani	Saat sekarang sudah mengetahui di mana area kelola masyarakat, dan mana aset Perhutani

Tema	Sebelum Persetujuan	Sesudah Persetujuan
Tata Kelola Usaha	Belum ada rencana usaha, terutama rencana kelompok, karena belum ada wadah yang bisa membantu atau memulai seperti KUPS	Sudah mempunyai rencana usaha kelompok, dan telah membentuk KUPS
	Mempunyai keinginan untuk peningkatan nilai produk, tapi tidak mengetahui bagaimana caranya?	Sekarang mempunyai tempat konsultasi untuk peningkatan produk, yaitu pendamping, CDK, dan sekarang FPV
	Tidak berani mengembangkan jenis-jenis tanaman, karena khawatir tidak menikmati hasilnya	Sudah bisa menanam berbagai jenis tanaman, seperti kopi, alpukat, dan pepaya
	Ada keinginan untuk mengembangkan tanaman kopi dengan ekowisata, namun belum mempunyai akses legal	Dapat mengembangkan, bahkan terlibat dalam perencanaan agroforestri dan ekowisata melalui IAD (<i>Integrated Area Development</i>)
Budidaya Tanaman/Hortikultura	Hanya menanam tanaman untuk konsumsi, yang sejenis saja, serta menanam tanaman yang tidak diperbolehkan berdasarkan aturan PS	Mengembangkan berbagai jenis tanaman dalam satu areal, seperti kopi, aren, umbi-umbian, Buah-buahan, dan tanaman kayu
	Sumber air hanya berharap dari tadah hujan dan mata air dari gunung	Membangun rencana untuk sumber air dengan dukungan dari Dana Desa atau Dana keuntungan dari KPS
Tata Kelola Kelembagaan	Belum ada KPS, struktur pengelolaan Lembaga Desa	Terbentuk KPS dan Lembaga Desa yang mendapatkan akses legal untuk pengelolaan lahan, mempunyai keanggotaan dan pengurus
	Belum ada kegiatan dan peningkatan kapasitas untuk pengelolaan lembaga dan lahan	Mendapatkan pengetahuan dan peningkatan keterampilan dalam pengelolaan Lembaga Desa, terutama oleh CDK, BPS, dan kementerian
	Tidak mempunyai kepercayaan diri untuk berkomunikasi karena tidak ada lembaga	Mempunyai kepercayaan diri untuk berkomunikasi dengan pihak CDK dan pemerintah, karena mempunyai organisasi yang disahkan oleh negara

L. Masukan terhadap FPV

Berikut merupakan masukan dari informan dan responden terkait FPV (Tabel 22), berdasarkan keterampilan yang mereka miliki serta kebutuhan yang diperlukan untuk meningkatkan tata kelola Perhutanan Sosial dan meningkatkan manfaatnya bagi anggota KPS maupun desa.

Tabel 22. Keterampilan yang dimiliki dan dibutuhkan anggota KPS di Kabupaten Garut

Tematik	Keterampilan yang dimiliki saat ini	Keterampilan yang dibutuhkan
---------	-------------------------------------	------------------------------

Budidaya tanaman dan peternakan	Perawatan kopi masih dilakukan dengan cara-cara dasar seperti penyiangan manual, pemangkasan ringan, dan pemupukan seadanya	Adanya peralatan produksi dasar (gunting pangkas, alat pengukur pH tanah, komposter, dan alat pembibitan) akan meningkatkan efisiensi pemeliharaan dan kualitas tanaman.
	Penanaman kopi dilakukan bebas sesuai pengalaman masing-masing petani, menghasilkan variasi besar dalam jarak tanam, pengendalian hama, pemupukan, dan pemeliharaan, sehingga kualitas dan produksi tidak konsisten.	Diperlukan pelatihan teknis pemangkasan, pemupukan, pengendalian hama, serta pengenalan teknologi sederhana (<i>soil tester</i> , kompos terstandar) agar perawatan tidak lagi tradisional dan hasil lebih seragam.
	Penanaman kopi tanpa pendampingan sehingga teknik belum seragam	Pendampingan rutin dari penyuluh/ahli diperlukan untuk menetapkan SOP budidaya (jarak tanam, pemupukan, pembibitan) sehingga teknik yang digunakan antar petani menjadi seragam.
Pengelolaan Produk	Mayoritas petani menjual kopi dalam bentuk <i>cherry</i> tanpa proses lanjutan karena keterampilan pascapanen terbatas dan belum tersedia fasilitas pengolahan dasar seperti <i>pulper</i> atau <i>drying bed</i> .	Untuk mencapai pengolahan dasar, petani memerlukan pelatihan pascapanen serta akses alat sederhana seperti <i>pulper</i> dan <i>drying bed</i> , disertai SOP yang mudah diikuti agar prosesnya konsisten.
	Kapasitas pengolahan sangat rendah karena kekurangan peralatan dasar (<i>pulper</i> , <i>huller</i> , alat sangrai) dan keterbatasan modal, sehingga tidak banyak produk bernilai tambah yang bisa dihasilkan.	Diperlukan alat pengolahan sederhana, akses permodalan, dan pelatihan produksi serta pengemasan agar kelompok dapat menghasilkan kopi sangrai atau bubuk secara berkelanjutan.
	Kualitas bibit yang tidak terstandar membuat hasil panen tidak seragam, sehingga petani kesulitan melakukan proses pengolahan lanjutan karena mutu bahan baku tidak stabil.	Perlu penyediaan bibit unggul, pendampingan pembibitan dan perawatan, serta penerapan SOP budidaya supaya kualitas panen stabil dan sesuai kebutuhan pengolahan.
	Hampir semua hasil panen dijual dalam bentuk mentah (buah segar atau gabah (Biji Kopi HS Kering)) tanpa proses fermentasi, pengeringan, atau <i>grading</i> , sehingga margin usaha sangat rendah.	Untuk mengolah sebagian panen, petani membutuhkan keterampilan pascapanen dasar, ruang produksi sederhana, dan kerja kolektif agar volume panen yang diolah mencukupi.
	Sebelum ada rujukan standar, proses pengolahan sering tidak mengikuti prosedur baku seperti tingkat fermentasi, kebersihan alat, atau kualitas air, sehingga kualitas gabah (Biji Kopi HS Kering) tidak konsisten dan belum memenuhi standar pasar premium.	Diperlukan pelatihan kontrol kualitas, alat ukur sederhana seperti <i>moisture meter</i> , dan pendampingan penerapan standar agar proses pengolahan konsisten sesuai SNI.
	Salah satu contoh adalah Produk keripik yang dikembangkan masih bersifat coba-	Pengembangan keripik dan komoditas membutuhkan uji pasar, perbaikan kemasan,

	coba, tanpa analisis pasar, kemasan standar, atau saluran distribusi, sehingga produksinya belum berkelanjutan dan tidak menghasilkan pendapatan stabil.	dan akses ke saluran penjualan lokal maupun digital agar produk memiliki pasar yang jelas dan berkelanjutan.
Pemasaran	Mayoritas pemasaran kopi hanya mengandalkan pembeli lokal sehingga tidak mampu menyerap seluruh produksi.	Diperlukan konsolidasi volume, identifikasi pembeli potensial, dan pelatihan pemasaran agar kelompok dapat memenuhi permintaan pasar yang lebih besar.
	Seluruh hasil hortikultura dijual ke pengepul dengan harga yang kurang kompetitif di beberapa tempat.	Kemampuan untuk menciptakan <i>leverage</i> terhadap harga yang kurang kompetitif, kemampuan sortasi dan kemasan sederhana, serta akses ke pasar lokal
	Hanya beberapa kelompok seperti Griya Bukit Jaya yang memiliki akses pasar luas.	Diperlukan penguatan manajemen pemasaran, peningkatan kualitas produk, serta pendampingan untuk memenuhi standar pembeli besar dan ekspor.

Berikut adalah beberapa masukan dan tanggapan anggota KPS ke FPV dalam rangka perbaikan pengelolaan areal PS dan peningkatan ekonomi masyarakat:

- Masyarakat membutuhkan dukungan pemerintah pusat berupa pelatihan dan pendampingan untuk tata kelola PS, karena selain belum ada arahan yang jelas, mereka juga belum memiliki pengetahuan teknis yang memadai. Alhasil, meskipun memiliki lahan, mereka masih kekurangan modal kerja, baik dari sisi keterampilan maupun bibit.
- Pendamping yang ditugaskan belum FPV secara rutin turun ke lapangan dan koordinasi melalui telepon, sehingga perkembangan pengelolaan lahan PS belum mendapatkan dukungan teknis yang optimal. Sosialisasi dan peningkatan kapasitas dari FPV masih dibutuhkan masyarakat.
- Masyarakat sangat membutuhkan dukungan berupa alat produksi dan infrastruktur yang memadai. Mereka telah menyampaikan kebutuhan ini kepada pemerintah desa, namun di beberapa desa terdapat kendala internal sehingga penanganan infrastruktur—terutama yang menunjang pengangkutan hasil pertanian—belum dapat dilakukan secara optimal.
- Dukungan dari BPS dan pendamping diperlukan untuk menyelesaikan persoalan aset Perhutani yang masih berada di areal PS, seperti tegakan pinus.
- Memberikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan pengolahan kopi dan alpukat, termasuk teknik pengendalian bakteri yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman alpukat.
- Pelatihan pengolahan dan pemasaran produk PS diperlukan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan pendapatan rumah tangga.
- FPV telah beberapa kali berkunjung untuk berdiskusi dan meninjau kondisi lapangan, namun hingga saat ini masyarakat belum menerima program ataupun bentuk dukungan konkret. seperti dukungan alat ekonomi produktif serta fasilitas permodalan bergulir.
- Masyarakat memerlukan bantuan pembangunan sistem pengairan menuju lahan PS, karena pertanian dan perkebunan saat ini masih bergantung pada tadah hujan. Dukungan ini juga penting untuk memitigasi risiko seperti bibit yang terbawa arus serta untuk menjaga keberlangsungan pertumbuhan bibit.

IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1. Kesimpulan

Studi rumah tangga KPS di Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat bermaksud untuk menyediakan data dasar pendapatan rumah tangga khususnya yang berasal dari areal PS sebagai *baseline* alat ukur dalam melihat peningkatan ekonomi dari implementasi proyek FPV. Salah satu indikator keberhasilannya adalah peningkatan pendapatan rumah tangga dari areal PS 15% setelah masa FPV berakhir.

Studi *baseline* ini dilakukan bulan November dan Desember 2025 dengan metode kualitatif dan kuantitatif sederhana. Data yang dikumpulkan adalah data sekunder dan primer. Data sekunder berupa: profil KPS, laporan, hasil studi dan publikasi terkait PS yang diperoleh dengan pengumpulan langsung dan penelusuran internet. Data primer dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner untuk 253 responden yang diambil secara *purposive* yaitu masing-masing 5 responden dari 49 KPS di Kabupaten Garut serta ditambah 8 responden. Pemilihan responden dengan kriteria responden (1) aktif mengelola areal PS (2) telah berhasil membuat produk, (3) memiliki produk unggulan. Selain penyebaran kuesioner, data primer juga diambil dari diskusi kelompok terfokus (FGD) sebanyak 2 kali, wawancara mendalam dengan informan kunci, serta observasi lapangan. Adapun sumber pendapatan dari areal PS dihitung berdasarkan (1) komoditas yang dikonsumsi sendiri dan (2) komoditas yang dijual. Komoditas yang dikonsumsi sendiri berupa tanaman pangan, tanaman buah-buahan, kacang-kacangan, sayuran, rempah-rempah dan obat-obatan. Sedangkan Sumber pendapatan dari komoditas yang dapat dijual umumnya adalah tanaman tahunan di antaranya kopi, alpukat, sayuran dan umbi-umbian.

Hasil survei menemukan bahwa data dasar rata-rata pendapatan rumah tangga KPS yang berasal dari areal PS di Kabupaten Garut **Rp 6,674,733/KK/tahun** atau **Rp 556,228/KK/ bulan**. Sementara pendapatan rumah tangga dari luar areal PS adalah sebesar **Rp 17,393,360/tahun** atau **Rp1,449,447/bulan**. Sehingga rata-rata pendapatan rumah tangga KPS di Kabupaten Garut sebesar **Rp24,068,093/tahun** atau **Rp2,005,675/bulan**. Jika membandingkan pendapatan yang berasal dari areal PS dan non-PS, maka pendapatan dari areal PS lebih sedikit yaitu 28% dibandingkan dengan pendapatan di luar PS di Kabupaten Garut yang 72%. Hal ini dikarenakan antara lain: responden sebagian besar memiliki pekerjaan lain di luar pertanian, belum optimal pengelolaan areal PS, rendahnya modal kerja, dan jeleknya infrastruktur jalan dan pengairan. Ringkasan *baseline* pendapatan rumah tangga KPS Garut dapat dilihat pada Tabel 23.

Tabel 23. Ringkasan *baseline* data pendapatan rumah tangga petani KPS berdasarkan Kabupaten

No	Jenis Pendapatan	Kabupaten Garut		
		Total (Rp/tahun)	Per tahun/KK	Per bulan/KK
1	Pendapatan dari konsumsi sendiri	923,865,480	3,651,642	304,304
2	Pendapatan dari komoditas dijual	3,742,792,000	14,793,644	1,232,804
Pendapatan kotor dari PS		4,666,657,480	18,445,286	1,537,107
Biaya produksi		2,977,950,000	11,770,553	980,879
Pendapatan dari PS		1,688,707,480	6,674,733	556,228
3	Pendapatan luar PS	4,400,520,000	17,393,360	1,449,447
Grand Total		6,089,227,480	24,068,093	2,005,675

Jika dibandingkan dengan kriteria miskin yang ada di BPS Garut tahun 2024, di mana pendapatan per rumah tangga terkategori miskin per kapita adalah Rp393.464 /bulan atau Rp1.573.856 per keluarga/bulan. Dengan demikian pendapatan per kapita per bulan anggota KPS di Garut **Rp2,005,675/ keluarga./bulan atau Rp501.418/KK/bulan berada di atas garis kemiskinan** atau “terkategori tidak miskin”. Di luar pendapatan tersebut, masih terdapat lagi sumber-sumber pendapatan yang tidak dapat dihitung seperti air, sumber bahan bakar kayu, dan pakan ternak.

Selain dari aspek pendapatan, kategori miskin dan tidak miskin dapat dilihat dari aspek pendidikan dan rumah yang dimiliki. Rata-rata kepemilikan rumah bagi anggota KPS di Garut terkategori permanen dan semi permanen. Kepemilikan rumah sederhana sangat kecil di bawah 25 persen. Sementara untuk pendidikan, mayoritas pendidikan di Kabupaten Garut adalah tamat Sekolah Dasar.

Secara ekonomi, anggota KPS di Garut memiliki ketahanan pangan yang kuat dan tersedia di alam, dan anggota KPS mendapatkan manfaat ekonomi lainnya seperti sumber protein hewani, manfaat ekologi karena sumber air dan penyeimbang iklim mikro, serta sumber papan. Dalam perhitungan pendapatan di atas, ketiga manfaat ini tidak dihitung atau tidak termasuk. Jika terjadi resesi di Indonesia, maka kelompok-kelompok petani KPS di Garut akan memiliki daya lenting yang lebih baik dibandingkan kelompok masyarakat di kota walaupun pendapatannya mungkin lebih tinggi.

KPS-KPS yang ada di Kabupaten Garut memiliki kekuatan di mana areal PS sudah mendapatkan izin /persetujuan pengelolaan PS melalui skema HD dan HKm selama 35 tahun. Di areal PS tersebut sudah terdapat tanaman tahunan yang menghasilkan seperti kopi, alpukat, dan tanaman rempah/obat-obatan. Dengan adanya kebijakan Perpres nomor 28 tahun 2023 tentang Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial yang melibatkan dan mengintegrasikan 12 Kementerian dan Lembaga untuk mempercepat pengelolaan PS, pengembangan usaha dan pendampingan, menjadi kesempatan bagi KPS untuk mendapatkan dukungan infrastruktur ekonomi dari kementerian terkait melalui dinas-dinas, di mana sebelumnya sangat terbatas pada Kementerian Kehutanan. Adanya pendamping dan program FPV, sehingga mendapatkan asistensi dan pelatihan di lapangan yang memberikan pemahaman dan akses pasar ke luar daerah bagi KPS-KPS.

Selain kekuatan dan kesempatan, KPS di Kabupaten Garut memiliki kelemahan seperti: rendahnya akses modal, minimnya pengetahuan pengolahan produk menjadi bahan setengah jadi dan jadi, dan kurangnya akses pasar baik itu yang non-digital (pasar *offline*) dan *online*. Sedangkan yang menjadi ancaman seperti kekeringan.

Keberadaan PS sangat dirasa manfaatnya bagi masyarakat baik secara ekonomi, penyedia pangan, sumber protein, sumber sayuran dan umbi/karbohidrat, dan sumber-sumber obat-obatan. Keberadaan PS di Garut menjadi sumber pangan karena sebagai sumber sayuran dan kopi. Secara ekonomi, areal PS menjadi sumber pendapatan dominan seperti kopi dan alpukat.

Secara umum, mereka sangat senang dengan diberikan izin/persetujuan PS. Hal ini dikarenakan: ada kepastian dalam pengelolaan hutan dan lahan dan mendapatkan pendampingan dalam tata kelola kawasan, tata kelola ekonomi dan tata Kelola kelembagaan. Di samping itu, adanya dukungan dari pemerintah dan FPV dalam peningkatan keterampilan dan wawasan dalam pengelolaan areal PS. Agar ekonomi meningkat, anggota KPS sangat berharap program FPV dapat meningkatkan produktivitas hasil pertanian di PS, pemerintah dapat memperbaiki akses infrastruktur jalan dan air, pengolahan produk pasca panen dan pemasaran.

4.2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil survei, FGD, *interview* dan pengamatan di lapangan, data-data dan hasil analisa di atas, maka ada beberapa rekomendasi untuk peningkatan ekonomi rumah tangga KPS di Kabupaten Garut :

- a) Meningkatkan produktivitas komoditas baik itu yang dikonsumsi sendiri (padi, sayuran, palawija, padi, dan umbi-umbian) maupun yang dijual (kopi, alpukat). Strateginya memberikan peningkatan pengetahuan petani untuk budidaya tanaman mulai dari pemilihan bibit berkualitas, pemupukan, pengendalian hama dan sistem irigasi (tetes, atau membuat embung air).
- b) Memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja Pengelolaan PS (RKPS) dengan memanfaatkan objek potensial dalam areal PS seperti objek wisata dan jasa lingkungan.
- c) Memfasilitasi bantuan modal dan peralatan untuk pengolahan dan peningkatan nilai tambah.
- d) Meningkatkan nilai tambah produk dengan cara mengolah produksi bahan mentah menjadi bahan setengah jadi dan jadi. Membantu membuat kemasan yang bagus dan menarik serta menciptakan produk khas PS atau masing-masing KPS.
- e) Meningkatkan kapasitas kelembagaan KTH/LD dengan memfasilitasi pembentukan koperasi Merah Putih yang difasilitasi agar bisa menampung dan memasarkan produk PS.
- f) Perbaiki tata kelola pasar meliputi: pembukaan jalan akses produksi, dan penyediaan pasar *offline* di Kecamatan dan Kabupaten termasuk pasar *online*.

Rekomendasi untuk FPV dan Dirjen PS/BPS adalah:

- a) Melakukan kunjungan dan pelatihan kepada KPS agar pemahaman dalam tata kelola PS meningkat bagi anggota KPS.
- b) Masyarakat berharap dapat mendapatkan dukungan berupa alat produksi untuk pengolahan pasca panen seperti mesin integrasi pengolah kopi.
- c) Masyarakat membutuhkan bantuan penyelesaian terhadap aset Perhutani yang ada di dalam KPS.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Abdoellah, Oekan S. 2017. *Ekologi Manusia dan Pembangunan Berkelanjutan*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Awang, S. A., Widayanti, W., & Saharjo, B. H. (2014). *Hutan Rakyat di Indonesia: Konsep, Dinamika, dan Strategi Pengembangan*. Yogyakarta: Debut Press.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut. (28 Februari 2025). *Kabupaten Garut Dalam Angka 2025*. Diakses pada 8 Desember 2025, dari <https://garutkab.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/b3c16bf58071f639c9a9f404/kabupaten-garut-dalam-angka-2025.html>
- Belcher, B., Ruiz-Pérez, M., & Achdiawan, R. (2005). Global patterns and trends in the use and management of commercial NTFPs: Implications for livelihoods and conservation. *World Development*, 33(9), 1435–1452. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2004.10.007>
- Chambers, R., & Conway, G. (1992). *Sustainable rural livelihoods: Practical concepts for the 21st century*. IDS Discussion Paper 296. Brighton: Institute of Development Studies.
- Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan. (2023). IDM : Indeks Desa Membangun Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. <https://idm.kemendesa.go.id/view/detil/1/tentang-idm>
- FAO. (2018). *Forest and farm producer organizations: Supporting smallholders and promoting sustainable forestry*. Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- Fatmawati, U. (2019). Analisis pemasaran hasil pertanian dan peran tengkulak terhadap pendapatan petani. *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 7(2), 112–123.
- Kartodihardjo, Hariadi, Ismid Hadad (ed.). 2024. *Memulihkan Keanekaragaman Hayati: Ekologi Politik Sumber Daya Alam Indonesia*. LP3ES. Depok.
- Keraf, A. Sonny. 2022. *Ekonomi Sirkuler: Solusi Krisis Bumi*. Penerbit Buku Kompas. Jakarta.
- Michon, G., & de Foresta, H. (1999). Agroforests: Incorporating a forest vision in agroforestry. In L. Buck, J. Lassoie, & E. Fernandes (Eds.), *Agroforestry in Sustainable Agricultural Systems* (pp. 381–406). CRC Press.
- Pemerintah Kabupaten Garut. 2025. *Pengembangan Wilayah Terpadu (Integrated Area Development) Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat*. Kabupaten Garut.
- Ramadhan, M., Hidayat, R., & Sasmita, R. (2023). Analisis pendapatan petani kopi Arabika di Kabupaten Garut. *Journal of Agricultural Socio-Economics*, 12(1), 45–56.
- Reuter, Thomas, Graeme MacRae. 2024. *Petani Kecil untuk Ketahanan Pangan Global: Kejatuhan dan Penemuan Kembali Sistem Pangan Berdasar Ekologi Moral di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.
- Sallata, M Kudeng, Hunggul Y. S. H. Nugroho. 2019. *Pengelolaan Lahan Kering: Potensi, Fungsi, dan Permasalahan pada Lahan Kering Penyebab Degradasi Lahan, Dampak, Rehabilitasi dan Kebijakannya*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Sampurno. 2013. *Manajemen Strategik: Menciptakan Keunggulan Bersaing yang Berkelanjutan*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Sanudin, San Afri Awang. 2019. *Evaluasi Kehutanan Sosial: Tantangan Generasi 3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem*. Jakarta.
- Silalahi, M., Santosa, A, Regang, Y, Segapuldes, A. 2023. *Penyusunan Data Sosial Ekonomi di Lokasi Forest Program V di Kabupaten Sikka dan Sanggau*. Yayasan Kehutanan Masyarakat Indonesia Indonesia/Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat, Bogor , Indonesia

- Siscawati, M. (2017). Community-based forest management in Indonesia: A critical analysis. *Forest Policy and Economics*, 85, 1–9.
- Sugiono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Alfabeta. Bandung.
- Sulastri, T., & Kurniawan, A. (2020). Analisis integrasi pasar kopi di Kabupaten Garut. *Jurnal Manajemen Agribisnis*, 18(2), 134–145.
- Suryanto, P. (2015). Konservasi tanah dan air pada lahan miring menggunakan sistem vegetatif dan mekanik. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 20(1), 25–34.
- Winarto, Bambang. 2019. *Kamus Kehutanan*. IPB Press. Bogor.

Peraturan dan Surat Keputusan

- Perpres Nomor 28 Tahun 2023 tentang Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK)
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa
- Surat Keputusan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penugasan Pendamping Perhutanan Sosial Kabupaten Garut. Balai Perhutanan Sosial Bogor.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Panduan Wawancara (*interview Guide*)

PENYUSUNAN *BASELINE* PENDAPATAN MASYARAKAT PADA KPS DI LOKASI FOREST PROGRAM V DI KABUPATEN GARUT

1. Kondisi umum ekonomi desa
 - a. Bagaimana kondisi ekonomi secara umum di desa
 - b. Apa saja komoditas unggulan dari desa
 - c. Bagaimana peran KPS dalam mendukung perekonomian desa
2. Kondisi KPS (Hutan Desa, HTR, HKM, Hutan Adat, Kemitraan Kehutanan)
 - a. Bagaimana kondisi dan situasi KPS (HD/HTR/HKM/HA/NKK)
 - b. Bagaimana pandangan para pihak di desa terkait KPS?
3. Bagaimana Tata kelola kelembagaan KPS yang dijumpai? Apakah aturan main sudah ada dan dijalankan?
4. Bagaimana tata kelola hutan /manajemen areal PS?, zona lindung, zona usaha? Kesepakatan-kesepakatan pengelolaan?
5. Bagaimana tata kelola usaha?
 - a. Apakah KUPS sudah terbentuk, apa jenis KUPS nya?
 - b. Apakah aturan main kelola usaha sudah ada?
6. Apa saja jenis komoditas hutan, HHBK, *agroforestry* yang ada di areal PS?
7. Bagaimana sistem pemasarannya?
8. Jelaskan rantai pasok produk hutan (PS) yang sudah dijual?
9. Jelaskan jenis usaha dan produk potensial yang akan dikembangkan yang dapat meningkatkan pendapatan?
10. Keterampilan apa saja yang telah dimiliki oleh anggota KPS-KUPS dalam pengelolaan KPS-KUPS dan peningkatan pendapatan?
11. Kebutuhan ketrampilan apa yang diharapkan dalam pengelolaan dan pengembangan PS dan peningkatan pendapatan?
12. Dukungan seperti apa yang diharapkan dari Pemerintah Desa, Kecamatan, KPH dan *Forest Programme V*?
13. Apa masukan-masukan terhadap PROGRAM FPV?
14. Apakah Anda merasa lebih bahagia setelah menjadi anggota KPS dan diberikan persetujuan untuk mengelola areal PS?
15. Apa saja aset produktif yang Anda miliki dan bermanfaat untuk mengelola Perhutanan Sosial dan peningkatan pendapatan keluarga?
16. Bagaimana peran dan kontribusi perempuan dan pemuda di dalam pengelolaan Perhutanan Sosial?

Panduan Observasi-Lapangan

1. Melihat kondisi dan situasi desa yang dikunjungi di mana KPS berada.
2. Melihat kondisi permukiman, perumahan dan kebutuhan dasarnya: listrik, air minum, sarana prasarana, infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesehatan, dan lainnya.
3. Melihat kondisi jenis-jenis tanaman di areal Perhutanan Sosial.
4. Melihat kantor KPS dan bagaimana pengelolaan kelembagaannya.
5. Mengobservasi kondisi areal PS, pengelolaan areal PS nya.
6. Melihat fasilitas-fasilitas yang ada untuk mendukung pengembangan ekonomi KPS-KUPS.
7. Melihat kondisi ekosistem di desa dan di areal Perhutanan Sosial (kebersihan di sungai, pengelolaan sungai, pengelolaan sampah, limbah rumah tangga, perlakuan terhadap tanah, dll.)

Lampiran 2 Daftar informan *in-depth interview* di Kabupaten Garut

Nama Informan	L/P	Nama KPS	Posisi	Tanggal Wawancara
Hendah	P	KTH Griya Bukit Jaya	Ketua KTH	20 November 2025
Adam Siva Kusdinar	L	KTH Griya Bukit Jaya	Anggota	20 November 2025
Yogi Al Ayubi Bestari	L	KTH Griya Bukit Jaya	Anggota	20 November 2025
Aep Hamdan	L	KTH Nangklak Jaya	Ketua KUPS Wisata	19 November 2025
Achmad Nawawi	L	KTH Nangklak Jaya	Ketua KUPS Pertanian	19 November 2025
Firman	L	KTH Nangklak Jaya	Anggota	19 November 2025
Tajudin	L	KTH Nangklak Jaya	Anggota	19 November 2025
Ade Juhana	L	KTH Karya Mekar Lestari	Ketua KTH KML	18 November 2025
Nunung	P	KTH Karya Mekar Lestari	Anggota	18 November 2025
Abdul Tamam	L	KTH Karya Mekar Lestari	Anggota	18 November 2025
Mumun	L	KTH Karya Mekar Lestari	Anggota	18 November 2025
Imam Sapei	L	KTH Karya Mekar Lestari	Anggota	18 November 2025
Ade Rohana	L	KTH Relawan Dapoer Areung	Ketua KUPS Warta Daya	19 November 2025
Yudiana	L	KTH Relawan Dapoer Areung	Anggota	19 November 2025
Amin	L	KTH Relawan Dapoer Areung	Anggota	19 November 2025



Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat - Yayasan Kehutanan Masyarakat Indonesia

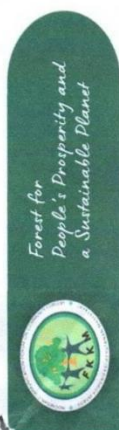
DAFTAR HADIR

Nama Kegiatan : Focus Group discussion
 Kode Kegiatan :
 Hari, Tanggal : 15 NOV 2025
 Waktu : 15.00 - selesai
 Lokasi : Kantor Desa

Jenis Kegiatan:
☐ Rapat
☐ Pelatihan
☐ Lokakarya
☒ Seminar
☐ FGD

NO.	NAMA	GENDER (L/P)	INSTITUSI	POSISI	NO. TELPON	EMAIL	TANDA TANGAN
1	Mulyana	L	BPD	Anggota.	085728868617	azuliam33@gmail.com	
2	BATIRUDIN	L	BPD	Anggota	08562470788	BATIRUDIN6707@gmail.com	
3	Isang S	L			0825 20490716		
4	NANDAG.S.	L					
5	Jana-PR	L		Anggota.			
6	Mumad.	L.			947029		
7	Euleng. S.	L	Desa	Anggota.			

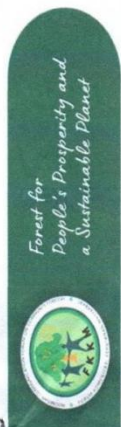
Laki-laki: ___ Perempuan: ___ Total: ___



Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat - Yayasan Kehutanan Masyarakat Indonesia

NO.	NAMA	GENDER (L/P)	INSTITUSI	POSISI	NO. TELPON	EMAIL	TANDA TANGAN
8	L/L/N	L		Anggota			
9	Cucu Laitah	P	BPD Perwakilan Perampunan	Anggota	081312706159	claitah@gmail.com	
10	Via Fulanti	P	Perwakilan Perampunan		082117892029	yuliantia88@gmail.com	
11	Gugun Gunawan	L	Pengurus LP	Sekretaris	082121077880	Gugun.surya@opn.org	
12	Hilman Wartinan	L	"	Bendahara	081573244639		
13	Juluh	L	"	anggota	- - -	-	
14	Dr.	L	"	anggota	082119942978	Desi.sasandiman@gmail.com	
15	DENI Rustandi	L	"		085351107746	berinadiana@gmail.com	
16	Filri Alfian	L	Nil. PUKMA	Anggota	0853077764	Filri.kirana@gmail.com	
17	R.A. Restha W. A	P	Dit. PUKMA	staf	08595469048	-	

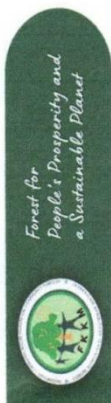
Laki-laki: ___ Perempuan: ___ Total: ___



Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat - Yayasan Kehutanan Masyarakat Indonesia

NO.	NAMA	GENDER (L/P)	INSTITUSI	POSISI	NO. TELPON	EMAIL	TANDA TANGAN
18	Muhamad Edual Subagya	L	Dit. PUTHA	STAF	081298356082	muhammedual5@gmail.com	18
19	Andira Digha Retrosari	P	lembaga PPV Diklat-PPV	Rakam	0813003735	andiradigharetrosari@gmail.com	19
20	Utang Sugandi	L	Cem Gopa dera Rakam CO	rekam W	0821157162210		20
21	ANNA SOFYANA	L	KADES Wanariksa	KADES	0812220109910		21
22	An Ambony	L	Pendamping- PS Mekar	AMISSAT	081385487479	---	22
23	Basya Ali M	L	PKKA				23
24	Samdhana Achmad S.	L	FK/KM	PO	085944639320	samdhana46@gmail.com	24
25	Ahmad Salim AlBarizy	L	FICKM	PO	0813107113886		25
26							26
27							27

Laki-laki: ___ / Perempuan: ___ Total: ___



Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat - Yayasan Kehutanan Masyarakat Indonesia

DAFTAR HADIR

Nama Kegiatan : Forum Grup Discussion KTH Komotajaya
 Kode Kegiatan :
 Hari, Tanggal : 15 November 2025
 Waktu : 9.30 - Selesai
 Lokasi : KTH Komotajaya

Jenis Kegiatan:
☐ Rapat
☐ Pelatihan
☐ Lokakarya
☐ Seminar
☒ FGD

NO.	NAMA	GENDER (L/P)	INSTITUSI	POSISI	NO. TELPON	EMAIL	TANDA TANGAN
1	CHOLID. Am.	L	ETH. Karamat Jaya	anggota			
2	Arip	L	---	---	081395998043		
3	ASER PURNAMA	L	KTH "	kepengurusan	082120001832		
4	ayti Sumartini	P	KTH Karamat Jaya	anggota	087819754845		
5	yani priyanti	P	" "	anggota	082129588364		
6	Momo Sudomo	P	KTH Karamat Jaya	Anggota	087321222875		
7	Astri Nurangani	P	KTH Karamat Jaya	Anggota	085681075912		

Laki-laki: ___ / Perempuan: ___ Total: ___



Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat - Yayasan Kehutanan Masyarakat Indonesia

NO.	NAMA	GENDER (L/P)	INSTITUSI	POSISI	NO. TELPON	EMAIL	TANDA TANGAN
8	Jayang Hermawan	L	KTH. Karamat Jaya	K. KTH	085871722212		
9	Riswan	L	KTH. Karamat Jaya	Angota	081241163635		
10	P.A. Regha W.A	P	Dit. PERTHA	STAF	081954691748	regha.p@gmail.com	
11	Muhammad Edwar S	L	Dit. PERTHA	STAF	081298356082	muhamedwarcs@gmail.com	
12	Fikri Alhan	L	D.I. PERTHA	jab fmg AH	085780772104	fikrikurinov@gmail.com	
13	Andina Deah Ratnasari	P	Dit. PERTHA - PS	Pakam	08121873925	andinadychratnasari@gmail.com	
14	Samantha	L	KTH Karamat Jaya	Angota			
15	Aylin	L	KTH Karamat Jaya	Angota			
16	Sandhiana Achmad Sudi	L	FKM		085944639320	sandhiana4@gmail.com	
17	Nayati Ali Nubly	L	FKM				

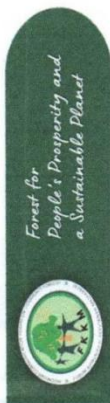
Laki-laki: ___ / Perempuan: ___ Total: ___



Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat - Yayasan Kehutanan Masyarakat Indonesia

NO.	NAMA	GENDER (L/P)	INSTITUSI	POSISI	NO. TELPON	EMAIL	TANDA TANGAN
18	Ch Ambony	L	ALMISEAT	Pendamping PC Mandiri	0813589487799	Chairuddin@almiseat.com	
19	Ahmad Saipon Alfarizy	L	FLKUM	Staff Po	081310711386	ahmadSaiponAlfarizy24@gmail.com	
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							

Laki-laki: ___ / Perempuan: ___ Total: ___



Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat - Yayasan Kehutanan Masyarakat Indonesia

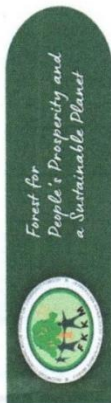
DAFTAR HADIR

Nama Kegiatan : Pengisian Kuisioner & FGD KPS
 Kode Kegiatan :
 Hari, Tanggal : Sabtu, 14 November 2025
 Waktu : 13.00 - Selesai
 Lokasi : Aula CDK Citarum

Jenis Kegiatan:
☐ Rapat
☐ Pelatihan
☐ Lokakarya
☐ Seminar
☒ FGD

NO.	NAMA	GENDER (L/P)	INSTITUSI	POSISI	NO. TELPON	EMAIL	TANDA TANGAN
1	Ikhsan Ekusman F	L	UPHD	Sekretaris	081223554029	ikhsan.fadai@uphd.go.id	
2	Atep Sumarta A	L	PPBM	Penanggung			
3	Ch Ambary	L	ALUMISAST	Pencamping	081385487975	cairnel@alumisast.com	
4	Hilman Fird	L	PKSM	Ketua Kelompok	085241933037		
5	AAP	L	LPNMU	Pencamping	081225874460	aap.61828416@gmail.com	
6	Ahmad S.	L	KPSISM	Ret.	081321258195		
7	Dandian S	L	Pencamping LPNMU	Ketua	08132157875		

Laki-laki: ___ / Perempuan: ___ Total: ___



Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat - Yayasan Kehutanan Masyarakat Indonesia

NO.	NAMA	GENDER (L/P)	INSTITUSI	POSISI	NO. TELPON	EMAIL	TANDA TANGAN
8	Fudimansyah.	L	KPS.	Set	082262976677	fudimansyah@ gmail.com	
9	Purnama Rawan	L	KPS	Anggota	08121245580	irawan.purnama@gmail.com	
10	DEDEP-1	L	KPS	Anggota	085197802511	depede@gmail.com	
11	Rizki Purnama	L	KTH	Sejahtera	081395227957	RizkiPurnama301@gmail.com	
12	Amzat Khin	L	FKM				
13	Jajang S. Hlin	L	PKU	PK	08529457287		
14	FEDIL	L	CDK	PK.	651321937411		
15	Sukernan	Z	CPK	PK	081224913276		
16	XADI		berkah ilahi		08316417947		
17	Wiwini		berkah ilahi				

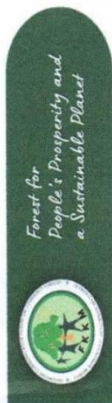
Laki-laki: ___ Perempuan: ___ Total: ___



Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat - Yayasan Kehutanan Masyarakat Indonesia

NO.	NAMA	GENDER (L/P)	INSTITUSI	POSISI	NO. TELPON	EMAIL	TANDA TANGAN
18	NUNU		berakoh, Lohi	kth	081495933166		18
19	URS ROCI		kurkat nahi	kth			19
20	Dede Ahmad Safinul		Sapta hjo. Prossopng	pendang ius	083024556335		20
21	Iwan	L	anggota KTH tambak baya	anggota	085860300134	iwan.samanthi25@gmail.com	21
22	Lia Yuliani	P	KTH Tambak baya	Anggota	085624371973	liay22455@gmail.com	22
23	Dede Rahmat	L	KTH Tambak baya	ketua	081572051947		23
24	Nina Sintiya	P	KTH Tambak baya	Bendahara	081220720797	ninasintia24@gmail.com	24
25	Agus Yogi P	L	KTH Tambak baya	Secretaris	085693099714	agus.yogi.pernu31@gmail.com	25
26	Samdhana Achmal	L	FKKM	PO	085944639328	samdhana41@gmail.com	26
27	App Hamdan	L	KTH Nangkalya	ketua			27

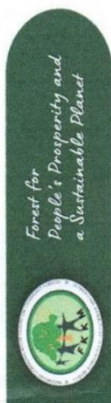
Laki-laki: ___ Perempuan: ___ Total: ___



Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat - Yayasan Kehutanan Masyarakat Indonesia

NO.	NAMA	GENDER (L/P)	INSTITUSI	POSISI	NO. TELPON	EMAIL	TANDA TANGAN
28	Rahma	L	CNGV	PCC	081799150100		
29	Marlin Agus	L	COICV	Tim KPS	091320719666		
30	HENATI	P	KTH BUKIT LUBA	KETUA	08528127766		
31	ADAM	L	-	ANGGOTA	08586419736	adam siva kusdinar@gmail.com	
32	AA YAYAN	L	-	-	085295062078	yan.st1224@gmail.com	
33	ALBULG	L	-	-	082120832186		
34	Bari	P	KTH / Kehutanan Laki	Anggota	~		
35	Yuli E	P	CNGV	PK	085380687815		
36	Irpan Anwar A	L	LPH Leweng dayeh	Anggota	085797059 040		
37	Siti Rahmawati	P	KTH Mekar Huri	Anggota	0822909 5355		

Laki-laki: ___ / Perempuan: ___ Total: ___



Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat - Yayasan Kehutanan Masyarakat Indonesia

NO.	NAMA	GENDER (L/P)	INSTITUSI	POSISI	NO. TELPON	EMAIL	TANDA TANGAN
38	Ani	P	KTH Matmur	KTH Matmur	081324658849		
39	yau		LS X / M	OG 670			
40	Deden Hermawati	P	KTH, Samudra	KTH, Samudra	081282404939		
41	Euis L	P	CDK V	Pendamping	081320400275		
42	Alin T	P	CDK V	PEH			
43	Ings. F	P	CDK U	PK	085220208206		
44	Atan. R	L	CDK V	PK	081313243852		
45	Uan Gurnam	L	CDK V	PK	081313459023		
46	Yadi. S	L	"	"	081222926679		
47	Pran. A.	L	-L	-L	081223653296		

Laki-laki: ___ / Perempuan: ___ Total: ___



Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat - Yayasan Kehutanan Masyarakat Indonesia

NO.	NAMA	GENDER (L/P)	INSTITUSI	POSISI	NO. TELPON	EMAIL	TANDA TANGAN
48	suherman	L	CPK V	Pendamping	0812264973276	suher 119@Com	
49							
50							
51							

Laki-laki: ___ / Perempuan: ___ Total: ___

Lampiran 4 Panduan FGD

Panduan *Focus Group Discussion* (FGD)

Baseline Study Pendapatan Rumah Tangga (RT)/Kepala Keluarga anggota KTH di Kabupaten Garut

Pengantar

Panduan ini dipergunakan dalam *Focus Group Discussion* Survei Pendapatan Rumah Tangga (RT)/Kepala Keluarga dalam Forest Programme V (FPV), di 2 lokasi yaitu Kabupaten Garut dan Kabupaten Madiun. Tujuan survei adalah: (1) Mendapatkan informasi terkait sistem mata pencaharian pada masyarakat penerima manfaat FPV dan menganalisis keterkaitan pendapatan masyarakat dengan kegiatan FPV, (2) Membangun data dasar (*baseline*) ekonomi sosial di tingkat masyarakat penerima manfaat dan mengintegrasikannya dengan sistem M&E FPV.

FGD akan dilaksanakan oleh Tim Konsultan Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM)/Yayasan Kehutanan Masyarakat Indonesia (YKMI) yang akan bekerjasama dengan Pendamping Perhutanan Sosial dan sekaligus sebagai enumerator.

Tujuan FGD

FGD bertujuan untuk menggali data dan informasi terkait pendapatan rumah tangga meliputi sumber-sumber, pendapatan yang berasal dari KTH, harga-harga komoditas, prioritas ketrampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh anggota KPS/KUPS dalam pengembangan ekonomi, aspek pasar dan rantai pasok.

Peserta FGD

Penentuan peserta FGD adalah pengurus KTH dan KUPS di beberapa KUPS di Kabupaten Garut dan Kabupaten Madiun. Selain itu, kriteria peserta antara lain: aktif menggarap/mengelola areal perhutanan sosial dan ada hasil dari areal perhutanan sosial yang digarap/dikelola baik untuk konsumsi sendiri atau untuk dijual. Total peserta FGD antara 10-15 orang. Waktu FGD sekitar 2-3 jam dilakukan di kantor KTH atau kepala desa tergantung tempat yang sesuai. FGD akan dilakukan 2 kali di setiap kabupaten. Diupayakan ada FGD dengan perempuan dan pemuda.

Untuk menggali pendapat dan memperkuat dinamika FGD, maka Tim Konsultan akan merumuskan beberapa pertanyaan kunci, sebagai berikut:

Pertanyaan Kunci FGD 1:

1. Sebutkan sumber-sumber pendapatan Bapak dan Ibu dari areal perhutanan Sosial, kategorikan berdasarkan (basis per KPS):
 - Hasil hutan kayu
 - Hasil hutan non-kayu (misal rotan, kulit kayu, etnobotani, dll)
 - Pemanfaatan kawasan (agroforestry, silvovasture, dll)
 - Jasa lingkungan (ekowisata, pendidikan lingkungan, PES, dll)
 - Perburuan untuk sumber protein (ada kemungkinan tidak ada praktik perburuan di lokasi studi. Perlu diamati terlebih dulu)
2. Berapa volume produksi komoditas yang Bapak dan Ibu hasilkan dalam satu tahun? (untuk menghitung NTE komoditas)
3. Berapa harga satuannya? (untuk menghitung NTE)
4. Jumlah masing-masing pendapatan, musim /tahun, harga pasar, dll (untuk memperjelas pertanyaan 2 dan 3, juga untuk menghitung NTE komoditas)
5. Berapa jumlah pengunjung dan harga karcis dalam satu tahun? (untuk menghitung NTE jasa lingkungan)

6. Bagaimana pemasaran produk-produk di atas? Apakah hanya di desa, kota kabupaten, kota provinsi?
 7. Apa kendala yang dihadapi bapak dan Ibu dalam mengembangkan usaha-usaha berbasis komoditas di atas?
 8. Apa upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi permasalahan di atas?
 9. Apa kebutuhan pengembangan kapasitas (pelatihan, kunjungan belajar, dukungan teknis, alat ekonomi produktif, modal usaha, dll.) yang diperlukan dalam pengembangan produk hingga pemasaran hasil tersebut?
 10. Apa saran dan masukan terhadap Forest Programme V?
- Pertanyaan lainnya, bisa dikembangkan di desa/KTH

Lampiran 5 Instrumen Survei

INSTRUMEN SURVEI PENDAPATAN RUMAH TANGGA KELOMPOK PERHUTANAN SOSIAL KABUPATEN GARUT

PERSETUJUAN RESPONDEN

[Baca Lembar informasi personal responden ini, Jika responden setuju untuk berpartisipasi, lengkapi form persetujuan ini]

Nama saya adalah dan saya enumerator yang bekerja untuk program FPV dan mengatasnamakan Yayasan Kehutanan Masyarakat Indonesia atau dikenal FKMM. Hari ini saya menginginkan Anda untuk berpartisipasi dalam studi ini. Studi ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran kondisi sosial dan ekonomi anggota Kelompok Perhutanan Sosial sebagai data dasar (*baseline*) sosio-ekonomi. Jika Anda setuju, maka saya akan melakukan wawancara dan akan merekam jawaban dalam lembar pertanyaan ini.

Apakah Anda mau terlibat dalam survei/studi ini?	1 = Ya	3 = Tidak
Nama enumerator:		
Tanggal :		
Lokasi KPS:		
Nama desa dan dusun:		
Kecamatan dan kabupaten:		
Titik GPS (jika ada):		

Modul A. Rumah Tangga Responden

a. Identitas Responden

AA1	Nama responden:	
Aa2	Jenis kelamin:	☐ 1 = Perempuan ☐ 3 = Laki-laki
AA3	Umur	☐ 1 = < 15 tahun ☐ 2 = 16 – 25 tahun ☐ 3 = 26 – 35 tahun ☐ 4 = 36 – 45 tahun ☐ 5 = 46 – 55 tahun ☐ 6 = > 55 tahun
AA4	Posisi dalam keluarga	☐ 1 = Kepala keluarga (suami) ☐ 2 = Kepala keluarga (istri) ☐ 3 = Lajang ☐ 4 = Anak/anggota keluarga
AA5	Pendidikan terakhir	☐ 1 = Tidak sekolah ☐ 2 = SD sederajat atau Paket A ☐ 3 = SMP/SLTP sederajat atau Paket B ☐ 4 = SMA/SLTA sederajat atau Paket C ☐ 5 = Pendidikan Tinggi (D-3 – S-1/D-4) ☐ 6 = Pendidikan Pasca Sarjana (S-2 & S-3)
AA6	Nama Kelompok Perhutanan Sosial?	

b. Komposisi keluarga

Semua pertanyaan ini mengacu pada kondisi rumah tangga Anda dalam 12 bulan terakhir.

Data Dasar Rumah Tangga: Anggota rumah tangga adalah orang yang masih tinggal bersama atau masih dalam tanggungan.

--

AB1	Berapa orang jumlah anggota keluarga dalam rumah tangga ini?	
AB2	(Jika di dalam satu rumah terdapat > 1 KK) Berapa kepala keluarga yang ada di dalam rumah tangga ini?	
AB3	Berapa orang anggota rumah tangga laki-laki yang masuk usia dewasa? (usia ≥ 17 tahun)	
AB4	Berapa orang anggota rumah tangga perempuan yang masuk usia dewasa? (usia ≥ 17 tahun)	
AB5	Berapa orang jumlah anak laki-laki (usia < 17 tahun)?	
AB6	Berapa jumlah anak perempuan (usia < 17 tahun)?	
AB7	Apa suku di rumah tangga Anda?	☐ 1 = Sunda ☐ 2 = Jawa ☐ 3 = Pendatang
AB8	Apakah ada dalam keluarga ini yang memiliki posisi kepemimpinan dalam masyarakat?	☐ 1 = Ya ☐ 3 = Tidak
AB8a	Jika menjawab <i>Ya</i> (lihat pertanyaan AB8), sebagai apa?	

Modul B. Pendidikan

a. Pendidikan

BA1	Apa tingkat pendidikan paling tinggi yang pernah ditempuh dari orang dewasa (usia ≥ 17 tahun) dalam keluarga ini?	☐ 1 = Tidak sekolah ☐ 2 = SD sederajat atau Paket A ☐ 3 = SMP/SLTP sederajat atau Paket B ☐ 4 = SMA/SLTA sederajat atau Paket C ☐ 5 = Pendidikan Tinggi (D-3 – S-1/D-4) ☐ 6 = Pendidikan Pasca Sarjana (S-2 & S-3)
BA2	Siapa yang menempuh jenjang pendidikan tersebut?	☐ 1 = Responden ☐ 2 = Suami/istri ☐ 3 = Anak dewasa
BA3	Bagaimana status kelulusannya?	☐ 1 = Lulus ☐ 2 = Belum lulus ☐ 3 = Tidak lulus

b. Pendidikan Anak

BB1	Menurut Anda, dalam skala 1 – 5, seberapa penting pendidikan untuk anak?	☐ 1 = Sangat tidak penting ☐ 2 = Tidak penting ☐ 3 = Netral ☐ 4 = Penting ☐ 5 = Sangat penting
BB2	Berapa banyak anak laki-laki (usia < 17 tahun) di keluarga ini yang sudah tidak bersekolah?	
BB2a	Jika terdapat anak laki-laki yang sudah tidak bersekolah, sebutkan alasannya (<i>bisa memilih lebih dari satu</i>).	☐ 1 = Kendala biaya

		☐ 2 = Anak kesulitan belajar/tidak ingin bersekolah ☐ 3 = Anak sudah bekerja ☐ 4 = Anak sudah menikah
BB3	Berapa banyak anak perempuan (usia < 17 tahun) di keluarga ini yang sudah tidak bersekolah?	
BB3a	Jika terdapat anak perempuan yang sudah tidak bersekolah, sebutkan alasannya (<i>bisa memilih lebih dari satu</i>).	☐ 1 = Kendala biaya ☐ 2 = Anak kesulitan belajar/tidak ingin bersekolah ☐ 3 = Anak sudah bekerja ☐ 4 = Anak sudah menikah

Modul C. Infrastruktur Dasar Rumah Tangga

C1	Kondisi rumah (<i>Jika wawancara dilakukan di rumah responden, petugas bisa melihat saja dan tidak perlu ditanyakan</i>)	☐ 1 = Rumah tidak permanen (lantai tanah, dinding papan/tepas) ☐ 2 = Rumah semi-permanen (lantai semen, dinding papan atau batu) ☐ 3 = Rumah permanen (lantai keramik, dinding batu)
C2	Apakah rumah ini milik Bapak/Ibu (keluarga)	☐ 1 = Milik ☐ 2 = Sewa ☐ 3 = Menempati milik keluarga/kerabat ☐ 4 = Lainnya: menyicil, dll
C3	Apakah Anda bisa memperoleh air bersih?	☐ 1 = Ya ☐ 3 = Tidak
C3a	Jika menjawab <i>Ya</i> , dari mana Anda memperoleh air bersih? (<i>bisa memilih lebih dari satu</i>)	☐ 1 = Sungai ☐ 2 = Mata air ☐ 3 = Pipa air (PAM) ☐ 4 = Sumur
C4	Apakah rumah Anda terhubung dengan jaringan listrik?	☐ 1 = Ya ☐ 3 = Tidak
C5	Apakah rumah ini memiliki toilet di dalam rumah? (<i>bisa dengan melakukan observasi</i>)	☐ 1 = Ya ☐ 3 = Tidak
C5a	(<i>Jika tidak ada toilet di rumah</i>) Di mana Anda memperoleh akses Mandi Cuci Kakus (MCK, bisa memilih lebih dari satu)	☐ 1 = Kamar mandi umum ☐ 2 = Sungai ☐ 3 = Telaga, kolam, danau, dll.
C6	Bahan bakar apa yang digunakan untuk memasak?	☐ 1 = Kayu bakar ☐ 2 = Gas ☐ 3 = Minyak tanah ☐ 4 = Kompor listrik
C7a	Jika menggunakan kayu bakar, apakah berasal dari areal Perhutanan Sosial?	☐ 1 = Ya ☐ 3 = Tidak

Modul D. Kesejahteraan dan Kekayaan

D1	Menurut penilaian Anda, dalam skala 1 – 5, seberapa sejahtera keluarga ini?	☐ 1 = Sangat miskin ☐ 2 = Miskin ☐ 3 = Cukup/pas-pasan ☐ 4 = Sejahtera ☐ 5 = Sangat sejahtera
D2	Dalam skala 1 sampai 5, seberapa bahagia Anda untuk tinggal di sini?	☐ 1 = Sangat tidak bahagia ☐ 2 = Tidak bahagia ☐ 3 = Netral ☐ 4 = Bahagia ☐ 5 = Sangat bahagia
D3	Apakah Anda menjadi semakin sejahtera setelah menjadi anggota KPS dan diizinkan untuk mengelola areal PS?	☐ 1 = Semakin miskin ☐ 2 = Tidak ada perubahan ☐ 3 = Semakin sejahtera
D4	Apakah Anda merasa lebih bahagia setelah menjadi anggota KPS dan diberikan persetujuan untuk mengelola areal PS?	☐ 1 = Semakin tidak bahagia ☐ 2 = Tidak ada perubahan ☐ 3 = Semakin bahagia

a. Aset Produktif

DA1	Berapa unit sepeda motor yang rumah tangga ini miliki?	
DA2	Berapa unit mobil (pribadi) yang rumah tangga ini miliki?	
DA3	Berapa unit mobil bak (untuk membawa hasil panen) yang rumah tangga ini miliki?	
DA4	Berapa unit cangkul yang rumah tangga ini miliki?	
DA5	Berapa unit golok/parang yang rumah tangga ini miliki?	
DA6	Berapa unit sepatu boots yang rumah tangga ini miliki?	
DA7	Berapa unit keranjang panen yang rumah tangga ini miliki?	
DA8	(Cukup diobservasi) Apakah rumah tangga ini mempunyai televisi atau kulkas? (bisa memilih lebih dari 1)	☐ 1 = Televisi ☐ 2 = Kulkas
DA9	(Bisa diobservasi atau ditanyakan) Apa saja barang berharga yang ada di rumah ini?	
DA10	Apakah Anda memiliki sawah/tanah di luar areal PS?	☐ 1 = Ya ☐ 3 = Tidak
DA10a	Jika menjawab Ya , berapa luasnya? (dalam meter persegi; m ²)	
DA10b	(Opsional, hanya jika responden bersedia menjawab) Jika menjawab Ya , berapa perkiraan harga tanahnya? (dalam rupiah)	

b. Penghasilan dari Perhutanan Sosial

DB1	Kepemilikan garapan dalam areal PS (dalam ha)	
-----	---	--

DB2	Berapa luas areal PS yang Anda garap? (dalam ha)	
DB3	Apakah Anda mendapat Penghasilan yang berasal dari kegiatan perhutanan sosial ?	☐ 1 = Ya ☐ 3 = Tidak
DB3a	Jika menjawab Ya , sebutkan jenis-jenis penghasilan yang Anda peroleh dari Perhutanan Sosial (bisa memilih lebih dari satu):	☐ 1 = Hasil Hutan Kayu ☐ 2 = Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) ☐ 3 = Jasa lingkungan ☐ 4 = Pemanfaatan kawasan (agroforestry, silvopasture, aquaculture)
DB3a1	Hasil hutan kayu: a. Sengon ($m^3 \times$ harga pasar) b. Kayu Afrika/Manii ($m^3 \times$ harga pasar) c. Lainnya. ($m^3 \times$ harga pasar)	a. Rp _____/tahun b. Rp _____/tahun c. Rp _____/tahun
DB3a2	Hasil Hutan Bukan Kayu a. Aren (kg x panen x harga) b. Kopi c. Buah-buahan d. Lainnya	a. Rp _____/tahun b. Rp _____/tahun c. Rp _____/tahun d. Rp _____/tahun
DB3a3	Jasa lingkungan (jika ada) a. Wisata alam (pemandu, akomodasi, dagangan) b. Lainnya	a. Rp _____/tahun b. Rp _____/tahun
DB3a4	Pemanfaatan kawasan a. Makanan pokok (padi) b. Umbi-umbian c. Sayuran d. Ternak e. Lain-lain	a. Rp _____/tahun b. Rp _____/tahun c. Rp _____/tahun d. Rp _____/tahun e. Rp _____/tahun
DB4	Pemanfaatan sumber daya hutan untuk konsumsi sendiri: a. Sayuran b. Protein (ikan, hewan buruan, ternak) c. Madu d. Padi e. Umbi-umbian (ubi, singkong, dll.) f. Rempah-rempah g. Buah-buahan h. Tanaman obat i. Tanaman tahunan (kopi, aren, kelapa) j. Lainnya	a. _____ kg /hari _____ kg/bulan b. _____ kg /hari _____ kg/bulan c. _____ ml/hari _____ ml/bulan d. _____ kg /hari _____ kg/bulan e. _____ kg /hari _____ kg/bulan f. _____ kg /hari _____ kg/bulan g. _____ kg /hari _____ kg/bulan h. _____ kg /hari _____ kg/bulan i. _____ kg /hari _____ kg/bulan j. _____ kg /hari _____ kg/bulan
DB5	Berapa perkiraan nilai (dalam rupiah) komoditas hasil PS (sayuran, buah-buahan, dll.) yang keluarga Anda konsumsi sendiri?	Rp _____/bulan

DB6	Dibandingkan sebelum ada KPS, apakah Ada perbedaan dalam pemanfaatan sumber daya hutan tersebut?	☐ 1 = Ya ☐ 3 = Tidak
-----	--	---

DB7	Dari daftar di bawah ini, jenis buah-buahan dan sayuran apa yang Anda tanam untuk dijual pada areal PS?				
		Checklist			Checklist
a	Mangga		n	Ubi	
b	Duku		o	Rambutan	
c	Alpukat		p	Jeruk	
d	Petai		q	Cempedak	
e	Jenang		r	Nangka	
f	Durian		s	Jambu	
g	Jengkol		t	Sawo	
h	Gaharu		u	Cokelat/kakao	
i	kopi		v	Sayuran	
j	Manggis		w	Kelapa	
k	Cabai		z	Dan lain lain (sebutkan, pisahkan dengan koma) (_____):	
l	Pisang				
m	karet				

DB8	Dari daftar di bawah ini, jenis buah-buahan dan sayuran apa yang Anda tanam untuk konsumsi sendiri pada areal PS?				
		Checklist			Checklist
a	Mangga		n	Ubi	
b	Duku		o	Rambutan	
c	Alpukat		p	Jeruk	
d	Petai		q	Cempedak	
e	Jenang		r	Nangka	
f	Durian		s	Jambu	
g	Jengkol		t	Sawo	
h	Gaharu		u	Cokelat	
i	kopi		v	sayuran	
j	Manggis		w	Kelapa	
k	Cabai		z	Dan lain lain (_____):	
l	Pisang				
m	karet				

DB9	Bagaimana Anda mendapatkan beras? (bisa memilih lebih dari satu)	☐ 1 = Menanam sendiri ☐ 2 = Membeli ☐ 3 = Bantuan pemerintah ☐ 4 = Lainnya (sebutkan: _____)
DB10	Berapa beras yang keluarga Anda konsumsi?	_____kg/hari_kg/bulan

DB11	Bagaimana kecukupan beras dalam rumah tangga Anda?	☐ 1 = Sangat tidak cukup (tidak bisa/sering tidak bisa memperoleh beras) ☐ 2 = Tidak cukup (terkadang tidak bisa memperoleh beras) ☐ 3 = Cukup (bisa memperoleh beras untuk konsumsi jangka pendek) ☐ 4 = Sangat cukup (bisa memperoleh beras untuk konsumsi sampai musim panen berikutnya)
------	--	--

c. Penghasilan dari Luar Perhutanan Sosial

DC1	Siapa saja anggota keluarga Anda yang memiliki pekerjaan selain dari menggarap areal PS? (kosongkan jika tidak ada)	☐ 1 = Responden ☐ 2 = Suami/istri ☐ 3 = Anak dewasa
DC2	(Kosongkan jika menjawab tidak ada pada pertanyaan DC1) Apakah jenis pekerjaan mereka?	☐ 1 = Petani ☐ 2 = Pedagang ☐ 3 = Guru ☐ 4 = Pekerja bangunan ☐ 5 = Aparatur Sipil Negara (ASN) ☐ 6 = Pegawai swasta ☐ 7 = Lainnya (sebutkan _____)
DC3	(Kosongkan jika menjawab tidak ada pada pertanyaan DC1) Dalam setahun terakhir, berapa penghasilan rata-rata per bulan dari pekerjaan ini? (dalam Rupiah)	Rp _____/bulan

d. Pengeluaran

DD1	Berapa perkiraan pengeluaran rata-rata keluarga Anda setiap bulan? (dalam rupiah)	
DD2	Pengeluaran jika dibagi dengan pengeluaran untuk : a. Kebutuhan biaya makan b. Kebutuhan biaya sekolah/pendidikan anak c. Kebutuhan biaya perawatan rumah d. Kebutuhan biaya transportasi e. Kebutuhan biaya sosial/keagamaan/adat f. Biaya sakit/perawatan kesehatan g. Kebutuhan biaya lainnya	a. Rp _____ b. Rp _____ c. Rp _____ d. Rp _____ e. Rp _____ f. Rp _____ g. Rp _____
DD3	Apakah ada biaya yang berkaitan dengan pengelolaan/pendapatan dari PS?	☐ 1 = Ya ☐ 3 = Tidak
DD3a	Jika ada, berapa biayanya? (dalam Rp/bulan)	
DD4	Berapa uang yang Anda tabung setiap bulan? (dalam Rp/bulan. Tuliskan 0 jika tidak memiliki tabungan)	
DD5	Apakah Anda memiliki utang?	☐ 1 = Ya ☐ 3 = Tidak
DD5a	Jenis utang (bisa memilih lebih dari satu)	☐ 1 = Utang kepada teman/kerabat

		☐ 2 = Utang bank ☐ 3 = Pinjaman daring ☐ 4 = Utang kepada rentenir
DD6	Siapa dalam keluarga Anda yang mengambil keputusan terkait keuangan keluarga?	☐ 1 = Istri ☐ 3 = Suami

Modul E. Persepsi, Keterampilan, dan Aspirasi

a. Persepsi

EA1	Apakah Anda lebih mudah mendapatkan pekerjaan/pendapatan setelah adanya PS?	☐ 1 = Ya ☐ 3 = Tidak
EA2	Apakah Anda merasa lebih nyaman dalam mengelola hutan dan lahan areal PS daripada sebelumnya?	☐ 1 = Ya ☐ 3 = Tidak
EA3	Apa rencana usaha dan kegiatan yang Anda pikirkan ke depan?	

b. Keterampilan dan Pengetahuan dalam Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial

EB1	Apa saja keterampilan yang Anda miliki saat ini untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarga? (sebutkan, pisahkan dengan koma)	
EB2	Apakah Anda mengetahui tata kelola lembaga Perhutanan Sosial?	☐ 1 = Ya ☐ 3 = Tidak
EB3	Apakah Anda mengetahui tata kelola konflik?	☐ 1 = Ya ☐ 3 = Tidak
EB4	Apakah Anda mengetahui tata kelola ekonomi?	☐ 1 = Ya ☐ 3 = Tidak
EB5	Apakah Anda mengetahui tata manajemen hutan?	☐ 1 = Ya ☐ 3 = Tidak
EB6	Menurut Anda, keterampilan apa saja yang saat ini diperlukan untuk dapat mengelola PS? (sebutkan, pisahkan dengan koma)	
EB8	Apa keterampilan yang Anda harapkan dan belum Anda miliki untuk mengelola PS? (sebutkan untuk masing-masing kategori, pisahkan dengan koma) a. Tata kelola konflik b. Tata kelola kelembagaan c. Tata kelola manajemen hutan d. Tata kelola usaha	a. _____ b. _____ c. _____ d. _____
EB9	Apa pengetahuan atau pelatihan yang Anda butuhkan untuk kesejahteraan Anda namun tidak berkaitan dengan pengelolaan PS? (sebutkan, pisahkan dengan tanda koma)	Sebutkan:

c. Aspirasi

EC1	Seperti apa keinginan hidup Anda lima (5) tahun mendatang?	
EC2	Apa yang Anda harapkan untuk anak-anak Anda dalam lima (5) tahun mendatang?	

EC3	Apa yang dapat pemerintah lakukan untuk meningkatkan taraf hidup Anda?	
EC4	Apa yang Program FPV bisa lakukan untuk meningkatkan taraf hidup Anda?	
EC5	Apa saran Anda untuk perbaikan tata kelola PS?	

Lampiran 6 Daftar responden di Kabupaten Garut

No	Nama Responden	Nama Kelompok Perhutanan Sosial	Kecamatan
1	Aay Farid F	LD Mekarjaya Saluyu	Cilawu
2	Abdul Hadi	LPHD Sinar Mandiri	Cilawu
3	Abdul Majid	KTH Tambakbaya	Cilawu
4	Abdul Rohmat Romansah	LPHD Sanghyang Taraje	Cilawu
5	Abdul Tamam	KTH Karya Mekar Lestari	Cilawu
6	Ac. Abdal Kholik	KPS Puncak Lestari	Cilawu
7	Achmad Nawawi	KTH Nangklak Jaya	Cilawu
8	Adam Siva Kusdinar	KTH Griya Bukit Jaya	Cilawu
9	Ade H	KT Giri Hurip	Cilawu
10	Ade Juhana	KTH Karya Mekar Lestari	Cilawu
11	Ade Rohana	KTH Relawan Dapoer Areng	Cikajang
12	Ade Sudrajat	LPHD Cihaur Kuning Pananjung	Cikajang
13	Ade Sutisna	KT Giri Hurip	Cikajang
14	Adi Rahayu	KTH Mekarmukti	Cikajang
15	Adi Wira Satia	LPHD Sukatani Lestari	Cikajang
16	Adin	KTH Mekarmukti	Cilawu
17	Adin Rustandi	KTH Alam Lestari	Cilawu
18	Aep Entang	KPS Puncak Lestari	Cilawu
19	Aep Hamdan	KTH Nangklak Jaya	Cilawu
20	Aep Saepuloh	LPHD Mekar Tani	Cilawu
21	Aep Saepuloh	KTH Sinar Mandalawangi	Cilawu
22	Agus	KTH Berkah Ilahi	Cilawu
23	Agus Kurtubi	LPHD Sukatani Lestari	Cilawu
24	Agus Setiawan	LPHD Karya Muda	Cilawu
25	Ahmad Slamet	KTH Buana Mukti	Pamulihan
26	Ai	KTH Mekar Hurip	Pamulihan
27	Ai Suryani	LPHD Karya Muda	Pamulihan
28	Aja Sutiawan	KTH Wanariksa	Pamulihan

No	Nama Responden	Nama Kelompok Perhutanan Sosial	Kecamatan
29	Ajah	LPHD Pesona Lemah Cai	Pamulihan
30	Alan Budi Kusuma	LPHD Karya Muda	Pamulihan
31	Alan Suparlan	LPHD Mekarmukti	Pamulihan
32	Alit Soni	KTH Mutiara Hitam Cikuray	Pamulihan
33	Alpi Syahbana	KTH Tendjo Laut	Pamulihan
34	Amad	LD Mekar Saluyu	Pamulihan
35	Amas S	KTH Karangsewu	Cilawu
36	Amih	KPS Puncak Lestari	Cisurupan
37	Amin	KTH Relawan Dapoer Areng	Cisurupan
38	Andri Firmansyah	KTH Karang Sewu	Cisurupan
39	Ani	KTH Makmur	Cisurupan
40	Ani	KTH Mekar Hurip	Cisurupan
41	Anwar	LPHD Leuweung Dayeuh	Cikajang
42	Anwar Sopyansah	KTH Buana Mukti	Cikajang
43	Apip Triana	LD Wanajaya	Cihurip
44	Apud	KTH Alam Lestari	Cihurip
45	Asa Muliana	KTH Karya Mekar Lestari	Cihurip
46	Asep	LD Mekarjaya Saluyu	Cihurip
47	Asep Amas	KTH Tambakbaya	Cihurip
48	Asep Suryana	LPHD Wangi Lestari 1	Sucinaraja
49	Atep Redi Risamwan	LPHD Pesona Lemah Cai	Sucinaraja
50	Ati Supardi	LPHD Gemahripah	Sucinaraja
51	Cahria	KTH Buana Mukti	Sucinaraja
52	Cecep Fitriadi	KTH Wanariksa	Sucinaraja
53	Cecep Kuswadin	KTH Giri Purnama Alam	Sucinaraja
54	Cucu Mulyana	KTH Makmur	Sucinaraja
55	D Irwan	KTH Rimba Jaya	Sucinaraja
56	Dadang	LPHD Sinar Mandiri	Sucinaraja
57	Dadang	KTH Lingkungpasir	Sucinaraja

No	Nama Responden	Nama Kelompok Perhutanan Sosial	Kecamatan
58	Dadang Hidayat	KPS Puncak Lestari	Sucinaraja
59	Daikin	LPHD Gemahripah	Sucinaraja
60	Daimah	KPS Alam Lestari	Sucinaraja
61	Danang Suyanto	KT Giri Hurip	Sucinaraja
62	Darmawan	LPHD KP2M Mentari	Sucinaraja
63	Dayat	KTH Nangklak Jaya	Sucinaraja
64	Dayat	KTH Giri Purnama Alam	Bungbulang
65	Dede Abdulrahman	KTH Rimba Jaya	Bungbulang
66	Dede Kurnia	LPHD KP2M Mentari	Bungbulang
67	Dede Suyandi	KTH Sabilulungan	Bungbulang
68	Dede Tata	LPHD Wangi Lestari 2	Bungbulang
69	Deden Hermawan	KTH Sinar Mandalawangi	Bungbulang
70	Dedi Yuhanda Hadian	KTH Tendjo Laut	Bungbulang
71	Deni	LPHD Wanariksa	Bungbulang
72	Deni	KT Giri Hurip	Bungbulang
73	Deni Malik	LPHD Berkah Tani	Bungbulang
74	Deni Sukmawan	KTH Sabilulungan	Bungbulang
75	Dian	LPHD Leuweung Dayeuh	Bungbulang
76	Diding Koswara	LPHD Rindu Alam	Pakenjeng
77	Dikdik Pandina	LPHD Mekarmukti	Bungbulang
78	Diki Sodikin	Gapoktan Wangunjaya Hijau Lestari	Pakenjeng
79	Dimas Harida	KTH Kamodjan Fillage	Pakenjeng
80	Dini	KTH Makmur	Bungbulang
81	Dodi Hermawan	LPHD Wanariksa	Pakenjeng
82	Dodin	KTH Mekarmukti	Bungbulang
83	Edin	LPHD Gemah Ripah	Pakenjeng
84	Edin Wahyudin	LPHD Leuweung Dayeuh	Bungbulang
85	Edwind Rusdiansyah	LPHD Cihaur Kuning Pananjung	Bungbulang
86	Eman	KTH Makmur	Bungbulang

No	Nama Responden	Nama Kelompok Perhutanan Sosial	Kecamatan
87	Emid	KTH Buana Mukti	Bungbulang
88	Endad	LPHD Mekar Tani	Bungbulang
89	Endang	LPHD Rindu Alam	Bungbulang
90	Endang	KTH Sinar Mandalawangi	Bungbulang
91	Endang Rustandi	LPHD Cihaur Kuning Pananjung	Bungbulang
92	Entinroswatin	KTH Nangklak Jaya	Bungbulang
93	Enyang	KT Mekar Hurip	Bungbulang
94	Fahmi Hilmi	KTH Wanariksa	Cisurupan
95	Ferry Hendriyanto	Gapoktan Wangunjaya Hijau Lestari	Cisurupan
96	Ganda	KTH Rimba Jaya	Cisurupan
97	H Amas	KTH Mutiara Hitam Cikuray	Cisurupan
98	H. Adar	LD Wanajaya	Cisurupan
99	Hamzah Fauzi	LPHD Karamat Sejahtera	Cisurupan
100	Hasan	LPHD Panyindangan Matandang	Cisurupan
101	Hendra	LPHD Gemahripah	Cisurupan
102	Hendra Anggara	LPHD Berkah Tani	Cisurupan
103	Hendra Gunawan	Gapoktan Baru Bojong	Cisurupan
104	Heri Jaenudin	KTH Giri Purnama Alam	Cikajang
105	Herman	LPHD Wangi Lestari 1	Cikajang
106	Hernawati	LPHD KP2M Mentari	Cikajang
107	Heryanto	LPHD Cihaur Kuning Pananjung	Cikajang
108	Hian	LPHD Sinar Mandiri	Cikajang
109	Hilman Farif	KTH Giri Purnama Alam	Cisurupan
110	Hotim	KTH Griya Bukit Jaya	Cisurupan
111	Ibu Hero	KTH Griya Bukit Jaya	Pasirwangi
112	Ida Jubaedah	LPHD Sanghyang Taraje	Pasirwangi
113	Iding S R	LPHD Karamat Sejahtera	Pasirwangi
114	Iin	KTH Makmur	Pasirwangi
115	Iji Sudarji	KTH Mutiara Hitam Cikuray	Pasirwangi

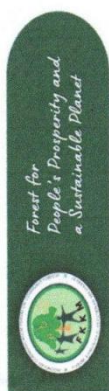
No	Nama Responden	Nama Kelompok Perhutanan Sosial	Kecamatan
116	Ikhsan Khusnan F	LPHD Sinar Mandiri	Cisurupan
117	Ikhsan Khusnan Firdaus	LPHD Sinar Mandiri	Cisurupan
118	Ikin Sodikin	KTH Kamodjan Fillage	Cisurupan
119	Imam Sapei	KTH Karya Mekar Lestari	Pasirwangi
120	Iman Rohiman	KTH Rimba Jaya	Pasirwangi
121	Imas	KT Mekar Hurip	Pasirwangi
122	Indra Daryana	KTH Berkah Ilahi	Cisurupan
123	Indra Hidayat	KTH Mutiara Hitam Cikuray	Cisurupan
124	Indrayana	LPHD Sinar Mandiri	Bayongbong
125	Ipan	LPHD Karamat Sejahtera	Bayongbong
126	Ira Nuryanti	LPHD Wangi Lestari 2	Pasirwangi
127	Isep Gunawan	LPHD Leuweung Dayeuh	Bayongbong
128	Iyep Saripudin	Gapoktan Wangunjaya Hijau Lestari	Kadungora
129	Jaja Subagja	KTH Rimba Jaya	Bayongbong
130	Jajang Hermawan	KTH Karamat Jaya	Pasirwangi
131	Jajang Kostaman	KTH Karangsewu	Kadungora
132	Jamaludin	Gapoktan Wangunjaya Hijau Lestari	Pasirwangi
133	Jana Abdul Rojak	LPHD Wanariksa	Bayongbong
134	Jeje	LPHD Mekar Tani	Kadungora
135	Jejen Jaenudin	KTH Alam Lestari	Pasirwangi
136	Julaeha	LPHD Rindu Alam	Kadungora
137	Karsana	Gapoktan Baru Bojong	Pasirwangi
138	Kartiwa	LD Wanajaya	Kadungora
139	Kholid Abdul Malik	KTH Karamatjaya	Kadungora
140	Kiki Suhiman	KTH Margamulya	Kadungora
141	Komar	KTH Motekar	Kadungora
142	Kundang	KTH Lingkungpasir	Kadungora
143	Kurnia Nurzaman	KTH Sabilulungan	Kadungora
144	Kurnia Sobari	KTH Sabilulungan	Malangbong

No	Nama Responden	Nama Kelompok Perhutanan Sosial	Kecamatan
145	Kusnadin	LPHD Wangi Lestari 2	Malangbong
146	Lala Rohala	KTH Kamodjan Fillage	Malangbong
147	Lili Suryadi	KTH Karamatjaya	Malangbong
148	Lomri	LPHD Mekarmukti	Malangbong
149	Madin Somadin	LPHD Wangi Lestari 1	Garut Kota
150	Maman	KTH Bina Sejahtera	Garut Kota
151	Maman	KTH Sabilulungan	Garut Kota
152	Maman Suherman	KTH Wanariksa	Garut Kota
153	Masitoh	LPHD Pesona Lemah Cai	Cisompet
154	Mimih	KT Mekar Hurip	Cisompet
155	Momo Sudomo	KTH Karamat Jaya	Cisompet
156	Moti Suherman	LPHD Mekar Tani	Cisompet
157	Muhamad Safii Zaelani	KTH Sinar Mandalawangi	Cisompet
158	Muhammad Furkon	LPHD Berkah Tani	Cisompet
159	Mumun	KTH Karya Mekar Lestari	Cisompet
160	Nanang Hidayat	LPHD Mekar Tani	Cisompet
161	Nanang Solihadin	LPHD Wanariksa	Cisompet
162	Nandang	KTH Tambakbaya	Cisompet
163	Nandang	KTH Tambakbaya	Cisompet
164	Nardi Trisnadi	LPHD Wangi Lestari 2	Cisompet
165	Neis	KTH Griya Bukit Jaya	Cisompet
166	Nendi Ruhiat	KT Mekar Hurip	Cisompet
167	Nina Herlina	LPHD Berkah Tani	Cisompet
168	Nina Sutisna	Gapoktan Baru Bojong	Cihurip
169	Nunu	KTH Berkah Ilahi	Cihurip
170	Nunung	KTH Karya Mekar Lestari	Cihurip
171	Nuryuliani	LD Wanajaya	Cihurip
172	Nyanyang Wahyudin	KTH Lingkungpasir	Cihurip
173	Odiman	KTH Karangsewu	Cihurip

No	Nama Responden	Nama Kelompok Perhutanan Sosial	Kecamatan
174	Pa Usep	KTH Kamodjan Fillage	Cihurip
175	Pathul Mubarak	KTH Alam Lestari	Cihurip
176	Pipin	KTH Lingunpasir	Cihurip
177	Pirman	KTH Lingkungpasir	Cihurip
178	Purnama Irawan	Gapoktan Baru Bojong	Cihurip
179	Rahmadin	KTH Wanariksa	Cihurip
180	Rahmat	KTH Alam Lestari	Cihurip
181	Rd. Sri Warningsih Dewi	LPHD Sanghyang Taraje	Cihurip
182	Rismayanti	KTH Griya Bukit Jaya	Cihurip
183	Romi Gunawan	KTH Tambakbaya	Garut Kota
184	Roni S	KTH Mekarmukti	Cisompet
185	Ruhyat	LPHD Karamat Sejahtera	Cisompet
186	Rully Firzan . K	KTH Tendjo Laut	Cisompet
187	Ruskan	LPHD Pesona Lemah Cai	Cisompet
188	Saeful Rohman	LPHD Sanghyang Taraje	Cisompet
189	Salsa Jesika Amanda	KTH Tendjo Laut	Samarang
190	Saripudin	KTH Berkah Ilahi	Samarang
191	Saroh	LPHD Mekarmukti	Samarang
192	Sasa Tarsodin	LPHD Alam Lestari	Samarang
193	Satiah	KTH Griya Bukit Jaya	Pasirwangi
194	Setiadi	LD Gemahripah	Pasirwangi
195	Shofia Herliani Fitriah	LPHD KP2M Mentari	Pasirwangi
196	Silvi Nuri Anjani	LPHD Sanghyang Taraje	Pasirwangi
197	Sindi Sasilah	KTH Alam Lestari	Pasirwangi
198	Sobur	LD Mekarjaya Saluyu	Pasirwangi
199	Soleh Kurnia	KTH Bina Sejahtera	Garut Kota
200	Solih	KTH Motekar	Garut Kota
201	Sudia	LPHD Wangi Lestari 1	Garut Kota
202	Sudrajat	KTH Sinar Mandalawangi	Garut Kota

No	Nama Responden	Nama Kelompok Perhutanan Sosial	Kecamatan
203	Suhendar	KTH Rimba Jaya	Garut Kota
204	Suhendar	LPHD Karya Muda	Pamulihan
205	Suhendrik	KTH Motekar	Pamulihan
206	Sumartini	KTH Karamat Jaya	Pamulihan
207	Sunaryaman	KTH Bina Sejahtera	Pamulihan
208	Supriatna	Gapoktan Baru Bojong	Pamulihan
209	Supyadin	LPHD Rindu Alam	Cibiuk
210	Suryana	LPHD Sukatani Lestari	Cibiuk
211	Susi Susanti	LPHD Panyindangan Matandang	Cibiuk
212	Syafaat	KTH Bina Sejahtera	Cibiuk
213	Tajudin	KTH Nangklak Jaya	Cibiuk
214	Taopik Soleh	LPHD Sukatani Lestari	Banjarwangi
215	Tarsa	LD Mekar Saluyu	Banjarwangi
216	Tita Rosita	KPS Puncak Lestari	Banjarwangi
217	Toyib Ali Lutfi	KTH Mekarmukti	Banjarwangi
218	Ucup	KTH Alam Lestari	Banjarwangi
219	Udung Sopandi	KTH Mutiara Hitam Cikuray	Sukaresmi
220	Uhana	LPHD Panyindangan Matandang	Sukaresmi
221	Ujang Sugandi	LPHD Wanariksa	Sukaresmi
222	Ujang Suparman	KTH Karamat Jaya	Sukaresmi
223	Ujer	KTH Motekar	Sukaresmi
224	Ukin	LD Wanajaya	Banjarwangi
225	Upun	KTH Sirnajaya	Banjarwangi
226	Usep Sutiawan	KTH Bina Sejahtera	Banjarwangi
227	Uus Setiawan	LPHD Cihaur Kuning Pananjung	Banjarwangi
228	Wadin	LPHD Karamat Sejahtera	Banjarwangi
229	Wahidin	LPHD Panyindangan Matandang	Cisurupan
230	Wahyu	LPHD Wangi Lestari 1	Cisurupan
231	Wahyudin	LPHD Rindu Alam	Cisurupan

No	Nama Responden	Nama Kelompok Perhutanan Sosial	Kecamatan
232	Wahyudin	KTH Buana Mukti	Cisurupan
233	Warman Nurdin	KTH Karangsewu	Cisurupan
234	Wati	KTH Griya Bukit Jaya	Cisurupan
235	Wawa Kartiwa	LPHD Pesona Lemah Cai	Cisurupan
236	Wawan Darmawan	LPHD Pesona Lemah Cai	Cisurupan
237	Wawan Hermawan	KTH Tenjolaut	Cisurupan
238	Wawan Kusmawan	LPHD Karya Muda	Cisurupan
239	Wilda Ratna	KTH Giri Purnama Alam	Cikajang
240	Yadi	KTH Berkahilahi	Cikajang
241	Yana Tharyana	KTH Motekar	Cikajang
242	Yani Apriyanti	KTH Karamat Jaya	Cikajang
243	Yaya	LPHD Sukatani Lestari	Cikajang
244	Yayan Taryana	LPHD Wangi Lestari 2	Cisewu
245	Yogi Al Ayubi Bestari	KTH Griya Bukit Jaya	Cisewu
246	Yogi Gunawan	KT Giri Hurip	Cisewu
247	Yona Yuliani	KTH Alam Lestari	Cisewu
248	Yosef Hendra	LPHD Berkah Tani	Cisewu
249	Yoyon Wahyono	LPHD Mekarmukti	Kadungora
250	Yudi Guntara	LPHD KP2M Mentari	Kadungora
251	Yudiana	KTH Relawan Dapoer Areung	Kadungora
252	Yudirmansyah	Gapoktan Wangunjaya Hijau Lestari	Kadungora
253	Zaenal Muttakin	LPHD Panyindangan Matandang	Kadungora



Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat - Yayasan Kehutanan Masyarakat Indonesia

DAFTAR HADIR

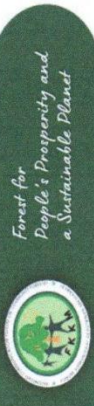
Nama Kegiatan : Pembekalan Enumerator
 Kode Kegiatan :
 Hari, Tanggal : Jumat, 14 November 2025
 Waktu : 10.00 - Selesai
 Lokasi : Aula CDK

Jenis Kegiatan:

Rapat	☒
Pelatihan	☐
Lokakarya	☐
Seminar	☐
FGD	☐

NO.	NAMA	GENDER (L/P)	INSTITUSI	POSISI	NO. TELPON	EMAIL	TANDA TANGAN
1	Dendin. S	L	Pendamping PC. LPPAD	Pendamping Ketua	081321370733	arochyusawandito@gmail.com	1
2	Dede Ahmad Rifal	L	Pendamping		08282456485	definide@mail.com	2
3	Ch Ambony	L	Pendamping ALMUSAT	Pendamping	081328948749	chaturku22@gmail.com	3
4	Suhendun	L	CDK W-U	Pendamping	081224913276	suhendun119@gmail.com	4
5	ATANI. RUSTANDI	L	CDK-WU	Pendamping	081313473852	atani.rustandi30@gmail.com	5
6	Yadi Supriyasa	L	CPR VU	Pendamping	081222925679	yskalaidar@gmail.com	6
7	APP	L	Pendamping PC. LPPAD	Pendamping	081223874460	app61884@gmail.com	7

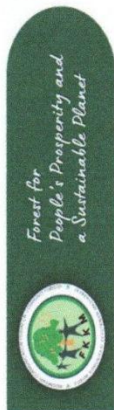
Laki-laki: ___ / Perempuan: ___ Total: ___



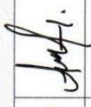
Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat - Yayasan Kehutanan Masyarakat Indonesia

NO.	NAMA	GENDER (L/P)	INSTITUSI	POSISI	NO. TELPON	EMAIL	TANDA TANGAN
8	Atep Sumiarta B	L	PKM		082424830815		
9	Wahana W	L	PKL		0813972516		
10	Rini E	P	PK		085380687811		
11	Dian H.	L	PKL		081223653296		
12	Indu K.	P	PK.		085220228226		
13	Tedi Lesmana.	L	PK.		081321237411		
14	Ari W	L	PK				
15	Jayung S Holis	L	PK		085294012887		
16	Gun Gunawan	L	PK		081313459023		
17	Euis Lemanati	P	PK		081320400275		

Laki-laki: ___ Perempuan: ___ Total: ___



Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat - Yayasan Kehutanan Masyarakat Indonesia

NO.	NAMA	GENDER (L/P)	INSTITUSI	POSISI	NO. TELPON	EMAIL	TANDA TANGAN
18	Ap Hamdan	L	KTH	Ketua	0856 03639260		18 
19	Marlan Agus-H	L	CDK	staf			19 
20	Alin +	P	CGK	staf			20 
21							21
22							22
23							23
24							24
25							25
26							26
27							27

Laki-laki: ___/ Perempuan: ___ Total: ___

Lampiran 8 Data Survei Kabupaten Garut

Data hasil pengisian kuesioner dapat diakses melalui tautan:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CRpEvk_NNPe-SVrLkFrt52a3wdYG9Yvl/edit?usp=sharing&ouid=105624972195701511734&rtpof=true&sd=true

atau juga dapat dibuka dengan memindai kode QR berikut:

